

Laporan Kinerja **TRIWULAN II** **TAHUN 2023**

DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

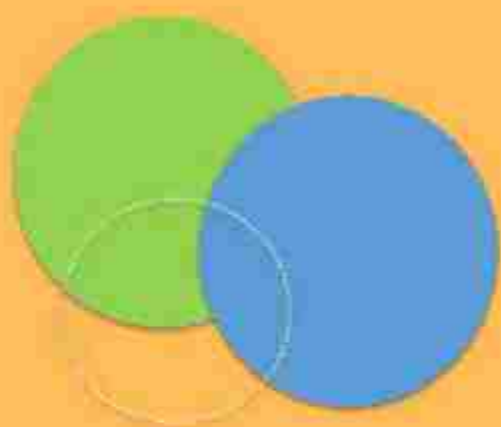


Klik untuk
mengunduh

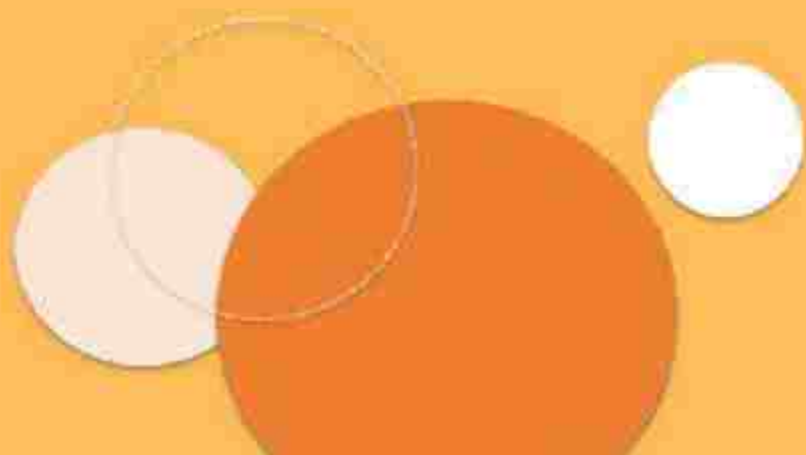


Scan QR Code untuk membaca online





Laporan Triwulan II





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	002
DAFTAR TABEL	003
DAFTAR GAMBAR	004
KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI	006
RINGKASAN EKSEKUTIF	008

BAB I

PENDAHULUAN	005
LATAR BELAKANG	016
MAKSUD DAN TUJUAN	016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA	020
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	021
B. REALISASI ANGGARAN	173

BAB III

PENUTUP	175
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2023	176
UPAYA DALAM MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN I 2023	177

LAMPIRAN

Lampiran 1	
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024	179
Lampiran 2	
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023	180
Lampiran 3	
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023	181
Lampiran 4	
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja	182
Lampiran 5	
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan I Tahun 2023	184



Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2023	018
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2023	021
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	024
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Triwulan II Tahun 2023	025
Tabel 5. Ringkasan Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi Indonesia hingga Triwulan II Tahun 2023	034
Tabel 6. Pangsa Perdagangan Indonesia Berdasarkan FTA Triwulan II 2023	039
Tabel 7. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2023	109
Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	110
Tabel 9. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)	112
Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3	116
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4	124
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	144
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6	154
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	160
Tabel 15. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2023	173

Gambar 1. Utilisasi SKA Form D ke Negara ASEAN Januari-Juni 2023	045
Gambar 2. Utilisasi SKA Form D ke Negara ASEAN Triwulan II 2022 dan 2023	045
Gambar 3. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara ASEAN ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023	047
Gambar 4. Utilisasi SKA ke Negara RCEP bulan Januari-Juni 2023	053
Gambar 5. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara RCEP ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023	054
Gambar 6. Utilisasi SKA Form IK-CEPA dan Form AK ke Korea Selatan Januari-Juni 2023	061
Gambar 7. Utilisasi SKA Form AK ke Korea Selatan Triwulan II 2022 dan 2023	061
Gambar 8. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Korea Selatan ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023	062
Gambar 9. Utilisasi Dokumen Asal Barang Form IE-CEPA Januari-Juni 2023	067
Gambar 10. Utilisasi DAB IE-CEPA Januari-Juni 2022 dan 2023	068
Gambar 11. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara EFTA ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023	068
Gambar 12. Komposisi Impor Januari-Juni 2023 Berdasarkan Penggolongan Barang	077
Gambar 13. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Januari-Juni 2023	078
Gambar 14. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Triwulan II 2022 dan 2023	075
Gambar 15. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Australia ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023	078
Gambar 16. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Januari-Juni 2023	083
Gambar 17. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Triwulan II 2022 dan 2023	083
Gambar 18. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Chili ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023	084
Gambar 19. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA	108
Gambar 20. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi	153
Gambar 21. Total Layanan FTA Center Triwulan II 2023 di Jakarta, Bandung dan Semarang	153
Gambar 22. Layanan FTA Center Triwulan II 2023	162
Gambar 23. Layanan Website FTA Center Triwulan II 2023	162
Gambar 24. Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2023	163
Gambar 25. Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2023	163
Gambar 26. Perbandingan Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2022 dan 2023	163
Gambar 27. Perbandingan Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2022 dan 2023	163
Gambar 28. Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2023	167
Gambar 29. Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2023	167
Gambar 30. Perbandingan Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2022 dan 2023	167
Gambar 31. Perbandingan Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2022 dan 2023	167
Gambar 32. Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2023	169
Gambar 33. Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2023	169
Gambar 34. Perbandingan Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2022 dan 2023	169
Gambar 35. Perbandingan Topik Layanan FTAC Semarang Triwulan II 2022 dan 2023	169
Gambar 36. Perbandingan Capaian Anggaran Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023	174

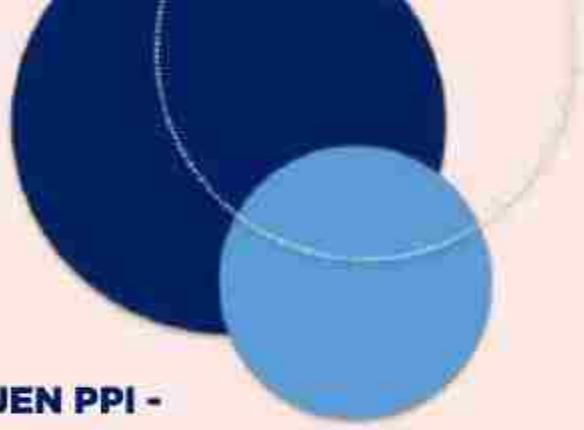
1

Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada peninjauan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).





PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI - DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

Pada tahun 2023, Indonesia fokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral dan menjadi tuan rumah atau ASEAN Chairmanship. Perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain adalah Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Iran PTA, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Mauritius PTA, Indonesia-Canada CEPA, dan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Sejumlah perkembangan dari perundingan yang terjadi sampai dengan Triwulan II 2023 antara lain di fora bilateral yaitu putaran ke-14 perundingan Indonesia-EU CEPA, putaran ke-4 Trade Negotiating Committee (TNC) Indonesia-Bangladesh PTA, putaran ke-15 Indonesia-Canada CEPA, serta dimulainya perundingan pertama Indonesia-EAEU FTA. Sementara itu di fora regional ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia dengan mengangkat tema "**ASEAN Matters: Epicentrum of Growth**" sejumlah capaian diantaranya tercakup dalam pertemuan the 4th ATIGA Upgrade Trade Negotiating Committee, 3rd ASEAN-Canada FTA Trade Negotiating Committee (TNC) Meeting, Senior Official Meeting (SEOM 2/54), dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. Pada kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pertemuan Menteri Perdagangan APEC ke-29 di mana Amerika Serikat selaku Tuan Rumah APEC 2023 mengangkat tema "Creating a Resilient and Sustainable Future for All" dan menghasilkan "The 2023 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair". Ditjen PPI juga secara aktif menyampaikan Specific Trade Concer (STC) offensive dan defensive Indonesia di forum World Trade Organization (WTO), serta notifikasi peraturan Indonesia ke WTO sebagai bentuk transparansi kebijakan.

Selain itu, capaian penting pada Triwulan II Tahun 2023 adalah penandatanganan perjanjian dagang Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (PTA) pada tanggal 23 Mei 2023. Penandatanganan Indonesia-Iran PTA ini adalah momentum bersejarah. Bagi Indonesia, perjanjian dagang dengan negara Persia ini adalah perjanjian perdagangan kedua dengan negara di kawasan Timur Tengah. Sementara bagi Iran, ini merupakan perjanjian dagang pertama kali dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan Indonesia-Iran PTA, Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi atas 239 pos tarif (PT), sementara Iran akan mendapatkan tarif preferensi atas 227 PT, untuk produk mineral, produk industri, produk pertanian dan produk perikanan. Indonesia – Iran PTA juga merupakan sarana yang dapat meningkatkan daya saing dan mampu menembus tidak hanya pasar Iran, namun juga negara-negara di kawasan Asia Barat pada umumnya.



Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan II ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d.Juni 2023 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020—2024.

Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.

Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Juli 2023
Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,

Djatmiko Bris Witjaksono

Ringkasan Eksekutif - Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan II Tahun 2023

6 April

Dirjen PPI menerima kunjungan Dirjen Perdagangan dan Industri Daerah Administratif Khusus Hong Kong, RRT, Maggie Wong Siu-chu. Kedua Pihak membahas upaya peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dalam skema ASEAN Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) dan ASEAN Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA).



12 April, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Sekretariat International Coconut Community (ICC) dan International Pepper Community (IPC). Mendag meminta ICC untuk terus aktif meningkatkan produk kelapa nasional dan menyatakan dukungan kepada IPC untuk memperluas keanggotaannya guna meningkatkan posisi tawar organisasi.



17 April

Dirjen PPI menerima kunjungan Dirjen e-Commerce dan Informasi, Kementerian Perdagangan RRT, Qian Fangli. Kedua Pihak membahas upaya peningkatan kerja sama e-commerce antara ASEAN dan RRT yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, inklusif, menciptakan peluang perdagangan digital, mendorong area pertumbuhan baru, dan mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan ASEAN-China.



18 April

Dirjen PPI selaku ASEAN Co-Chair dari perundingan ASEAN-Canada FTA (ACAFTA) memimpin pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC) ke-3. Pertemuan bertujuan untuk membahas perkembangan perundingan, serta mendorong kemajuan diskusi terkait isu-isu outstanding yang sedang dibahas dalam kerangka ACAFTA.



6 Mei

Dirjen PPI selaku SEOM Chair memimpin Pertemuan Preparatory Senior Economic Officials Meeting (SEOM) for the 22nd ASEAN Economic Community (AEC) Council yang dihadiri oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Pertemuan bertujuan untuk mempersiapkan agenda yang akan dibahas dalam Pertemuan the 22nd AEC Council. Pembahasan utama adalah Prioritas Capaian Ekonomi ASEAN di masa Ketekuaan Indonesia, kesiapan partisipasi Timor-Leste di ASEAN, Implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perkembangan penyusunan Visi Masyarakat ASEAN Pasca-2025.



10 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan mengadakan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia di sela KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT. Kedua menteri membahas isu-isu terkait ekspor komoditas Indonesia, termasuk produk olahan nanas, kelapa sawit, dan kain, serta rencana penandatanganan Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia, dan normalisasi perdagangan lintas batas di Entikong melalui Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong.



15 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding pembentukan Joint Trade Committee/Komitee Perdagangan Bersama (MoU JTC) Indonesia - Mesir oleh Mendag RI dengan Menteri Perdagangan dan Industri Mesir di Kairo, Mesir. JTC akan berfungsi untuk membahas peningkatan kerja sama perdagangan dan penyelesaian hambatan perdagangan. Kedua Menteri juga melakukan pertemuan bilateral yang membahas kemungkinan pembentukan PTA/CEPA antar kedua negara di waktu mendatang.



23 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI menandatangani Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement/ II-PTA) di Istana Bogor, Jawa Barat. Melalui persetujuan ini, Indonesia dapat meningkatkan ekspor menuju pasar yang lebih luas, khususnya ke negara mitra dagang nontradisional seperti Iran.



25 Mei, Dirjen PPI mendampingi Mendag RI saat bertemu dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil, dan Pembangunan Ekonomi Kanada di Detroit, Amerika Serikat di sela-sela pertemuan APEC MRT Tahun 2023.



25 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI pada APEC MRT 2023 yang mengajak seluruh Menteri Perdagangan APEC menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).



25 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI pada pertemuan bilateral Indonesia-Peru di sela-sela pertemuan APEC MRT Tahun 2023. Mendag RI mengajak Peru untuk meningkatkan komitmen perdagangan dengan Indonesia melalui perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-Peru CEPA. Hal tersebut penting untuk mengintensifkan perdagangan kedua negara tanpa melibatkan pihak ketiga atau hub.



2023

TRW II

25 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI saat bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Selandia Baru di Detroit, Amerika Serikat (AS) di sela-sela pertemuan APEC MRT 2023. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam penyelesaian peningkatan kerja sama AANZFTA. Ditandatangani protokol kedua untuk mengamendemen AANZFTA pun menjadi salah satu capaian prioritas ekonomi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023. Untuk itu, Indonesia mengharapkan peningkatan kerja sama AANZFTA dapat segera terwujud.



25 Mei, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI guna menyaksikan penandatanganan MoU peralatan dapur listrik antara PT Borine Technology Indonesia dengan Hamilton Beach Amerika Serikat dengan nilai mencapai 50 juta dolar AS atau setara dengan 748,95 miliar rupiah. Diperkirakan potensi transaksi di masa mendatang mencapai 350 juta

29 Mei, Dirjen PPI selaku Chief Negotiator memimpin delegasi Indonesia pada perundingan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) putaran kelima yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei - 2 Juni 2023 di Ottawa, Kanada. Dalam Opening Plenary Dirjen PPI menyampaikan pentingnya melanjutkan perundingan 17 Kelompok Kerja dan 3 Issue Tables dalam semangat kooperatif untuk mencapai kesepakatan bersama. ICA-CEPA akan menjadi perundingan pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara.



29 Mei, Dirjen PPI selaku Chief Negotiator Indonesia melakukan pertemuan dengan Aaron Fowler, Chief Negotiator Kanada di sela-sela Perundingan Putaran Kelima Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA). Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda penting yang menjadi kepentingan kedua negara, antara lain mengenai akses pasar perdagangan barang, jasa dan investasi, serta isu-isu baru seperti perdagangan inklusif, lingkungan dan tenaga kerja.



30 Mei, Dirjen PPI selaku Chief Negotiator Indonesia pada perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) bersama dengan Chief Negotiator Kanada melakukan Chief Negotiators Meeting pada hari kedua perundingan Putaran Kelima ICA-CEPA. Pertemuan dilakukan dalam rangka mendiskusikan progress perundingan serta penyajian deliverables ICA-CEPA pada pertemuan KIT ASEAN-Kanada pada bulan September 2023.



7 Juni, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI pada pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia. Pertemuan bilateral tersebut dilakukan tanggal 7 Juni 2023 di kantor Kementerian Investasi Perdagangan dan Perindustrian Malaysia. Kedua Menteri membahas persiapan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Perbatasan atau Border Trade Agreement (Indonesia - Malaysia BTA) yang akan ditandatangani 8 Juni 2023 di depan kedua kepala negara. Selain itu, keduanya membahas kerja sama di forum International Tripartite Rubber Council (ITRC) serta upaya kolaboratif dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa.



8 Juni, Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan RI dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement/ BTA) di Putrajaya, Malaysia. Kedua negara menyambut baik penandatanganan perjanjian ini yang diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat kedua negara yang tinggal di daerah perbatasan.

Setelah ditandatangani, kedua negara akan melanjutkan proses ratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara sebelum BTA diberlakukan dan dapat memfasilitasi masyarakat di perbatasan.

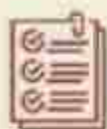


12 Juni, Dirjen PPI memimpin Delegasi RI pada pertemuan The 9th Senior Official Meeting of Trade and Investment Forum (SOMTIF) dengan Pemerintah Selandia Baru di Wellington, Selandia Baru. Delegasi Selandia Baru dipimpin oleh Mark Trainor, Principal Advisor, Ministry of Foreign Affairs and Trade. Pertemuan ini membahas isu akses pasar, perdagangan jasa dan kerjasama bilateral di bidang pertanian, halal, ketenagakerjaan, imigrasi, perkembangan di fora Multilateral, Regional dan isu terkait lainnya.



22 Juni, Dirjen PPI mewakili Wakil Menteri Perdagangan memimpin kegiatan Sosialisasi Hasil Perundingan Perdagangan Internasional dengan tema "Isu Prioritas ASEAN Chairmanship 2023 di Universitas Brawijaya yang berada di Kota Malang.





**INDEKS NON-TARIFF
MEASURES (NTMS) DENGAN
NEGARA MITRA FTA
INDONESIA S.D TRIWULAN II
2023 TERCATAT SEBESAR**

4,82

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 30 Juni 2023. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan II 2023.

Pencapaian Utama

Key Achievements



**NILAI EKSPOR KE NEGARA
MITRA PERJANJIAN
PERDAGANGAN S.D
TRIWULAN II 2023 MENCAPAI**

89,95

Milliar Dolar AS

Nilai ekspor Indonesia s.d. triwulan II 2023 ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **69,92%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia.



**PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL
DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK
EKSPOR INDONESIA DI NEGARA
MITRA S.D TRIWULAN II 2023
MENCAPAI**

70%

Sampai dengan triwulan II 2023, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.



**POSISI KEPENTINGAN
PERDAGANGAN INDONESIA YANG
DITERIMA DALAM
DEKLARASI/STATEMENT DI
TINGKAT REGIONAL DAN
INTERNASIONAL S.D TRIWULAN II
2023 MENCAPAI**

40%

Sampai dengan triwulan II 2023 Ditjen PPI telah berhasil memperjuangkan satu proposal mencerminkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari

**2023 APEC Ministers Responsible
for Trade Statement**



**PEMANGKU KEPENTINGAN DAN
PELAKU USAHA YANG
MENDAPATKAN INFORMASI
TENTANG PELUANG DAN TATA
CARA PEMANFAATAN FTA PADA
S.D TRIWULAN II 2023 MENCAPAI**

1127
Orang

Sampai dengan triwulan II 2023, FTA Center di tiga kota memberikan layanan kepada total 1127 orang. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat, selebihnya adalah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor, dan strategi promosi dan pemasaran ke negara mitra FTA.



**PERSENTASE PENYELESAIAN
PELIMPAHAN DOKUMEN RATIFIKASI
PERJANJIAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL KE INSTANSI YANG
MENANGANI**

50%

Sampai dengan triwulan II 2023 Ditjen PPI telah melimpahkan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional Indonesia-Chile CEPA TIS ke instansi yang menangani.





LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi sampai dengan triwulan II anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara berkala.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atauantisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap

perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.



REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN II TAHUN 2023

Pada tahun 2023 perekonomian global masih dihadapkan dengan perjuangan melawan inflasi dan perang Rusia dan Ukraina yang juga belum usai, Indonesia, dengan berbagai tantangan dan



dinamika perundingan yang terjadi memberikan perhatian lebih kepada penyelesaian perundingan perdagangan internasional. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2023, Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-Bangladesh PTA; (2) Indonesia-Iran PTA; (3) Indonesia-EU CEPA; (4) Indonesia-Mauritius PTA; (5) Indonesia-Canada CEPA dan (6) Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA.

Pada triwulan II Indonesia telah menyelesaikan perundingan Indonesia-Iran PTA, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan tersebut oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amirabdollahian, pada tanggal 23 Mei 2023 di Istana Presiden, Bogor. Indonesia – Iran PTA merupakan infrastruktur penting dalam mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani MoU on Establishment of Joint Trade Committee Indonesia-Egypt, pada 15 Mei 2023. Indonesia juga telah menandatangani pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement/ BTA) di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023.

Beberapa perkembangan perundingan menjadi capaian penting sampai dengan triwulan II tahun 2023 antara lain putaran ke-14 perundingan Indonesia-EU CEPA, putaran ke-4 Trade Negotiating Committee (TNC) Indonesia-Bangladesh PTA, putaran ke-5 Indonesia-Canada CEPA, dan dimulainya perundingan pertama Indonesia-EAEU FTA serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft teks perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Pada fora regional ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia dengan mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" sejumlah capaian diantaranya tercakup dalam pertemuan the 4th ATIGA Upgrade Trade Negotiating Committee, 3rd ASEAN-Canada FTA Trade Negotiating Committee (TNC) Meeting, Senior Official Meeting (SEOM 2/54), dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. Dengan kedua elemen besar tersebut yaitu ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth yang ada pada ASEAN 2023, menjadi progres dalam memperkuat Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat ASEAN.

Pada kerja sama perdagangan di forum antar kawasan dan organisasi internasional, Indonesia berpartisipasi aktif dalam pertemuan Menteri Perdagangan APEC ke-29 di mana Amerika Serikat selaku Tuan Rumah APEC 2023 mengangkat tema "Creating a Resilient and Sustainable Future for All" dan menghasilkan "The 2023 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair".

Ditjen PPI juga secara aktif menyampaikan Specific Trade Concer (STC) offensive dan defensive Indonesia di forum World Trade Organization (WTO), serta notifikasi peraturan Indonesia ke WTO sebagai bentuk transparansi kebijakan.

Laporan Kinerja Triwulan II disusun sebagai sarana pemantauan progres dari realisasi indikator kinerja dan capaian secara periodik, sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2023 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (DJPPi) sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional. Pada tahun 2023, dalam Perjanjian Kinerja DJPPi ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Tabel 1 menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan DJPPi sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	45	69,92	155,37
2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	5,0	4,82	103,65
3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0

2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	70	87
5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	1127	56
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2023					71,71
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2022					58,56

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Perhitungan capaian pada triwulan II tahun 2023 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan II dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tujuh indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan (progress), bahkan IK-1 menunjukkan capaian lebih dari 100% pada triwulan II. Satu indikator yang capaiannya masih belum dapat dihitung yaitu IK-3 "Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional". Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 71,71 persen.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp181.592.401.000,-. Adanya kebijakan Automatic Adjustment pada tahun 2023 mengakibatkan DJPPi memblokir anggaran sejumlah Rp15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pada triwulan II sejumlah Rp166.592.401.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2023 oleh DJPPi adalah Rp 65.831.490.068,- atau dengan nilai capaian sebesar 39,52 persen.

2

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2023, DJPPI telah menetapkan 3 sasaran program dengan 7 indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Secara rata-rata, capaian kinerja DJPPI sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 63,32 persen. Rata-rata ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada

periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,56. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja DJPPI triwulan II tahun 2023 dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	45	69,92	155,37
2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	5,0	4,82	103,65
3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	70	87
5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50

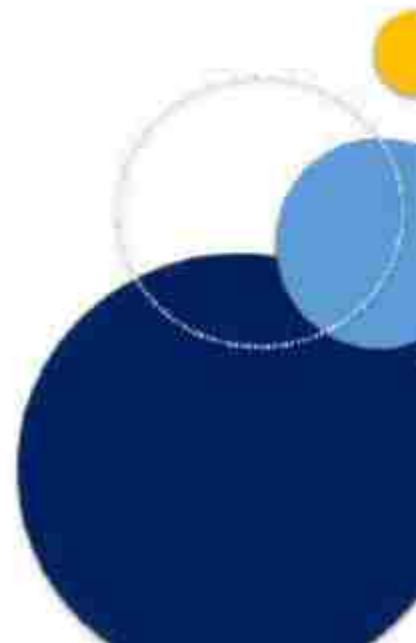
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku usaha	2.000	1127	56
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2023					71,71
Rata-rata Capaian Triwulan II Tahun 2022					58,56

Sumber: DJPPI (2023)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan perbandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capaian kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (s.d TW 2)}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Sasaran Program 1

Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional

Indikator Kinerja Program 1:

Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional membuka akses

pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK - 1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:

IK - 1_t = Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan

X_{kt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan

X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh DJPPI.

Terdapat 24 (dua puluh empat) negara mitra yang sudah memiliki perjanjian perdagangan internasional yang sudah berlaku dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), Chili, Hongkong, , India, Jepang, Korea Selatan, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Swis) Mozambik, Pakistan, Palestina, Cina, Selandia Baru.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

INDIKATOR : Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
44	67,77	154,01	45	69,92	155,37

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan outcome hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (*share*) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional sampai dengan triwulan II tahun 2023, dari data yang diolah pada periode Januari-Juni 2023 yaitu sebesar 89,95 miliar dolar AS, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar 128,65 miliar dolar AS. Sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 69,92 persen atau dengan capaian 155,37 persen dibandingkan target tahun 2023. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2023 mencapai 20,60 miliar dolar AS atau turun 5,09 persen dibanding ekspor pada bulan Mei 2023.

Dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2022 dengan menggunakan data Januari-Juni 2022, capaian triwulan II tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,53%. Meningkatnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juni 2023 mencapai 128,65 miliar dolar AS atau turun 37,68 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor non migas mencapai 120,81 miliar dolar AS atau turun 9,4 persen dibanding periode Januari-Juni 2022.
- Ekspor non migas Juni 2023 mencapai 19,34 miliar dolar AS, turun 5,18 persen dibanding Mei 2023, nilai ini turun 21,38 persen jika dibanding ekspor non migas Juni 2022.
- Peningkatan terbesar ekspor non migas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada lemak & minyak hewan/nabati sebesar 834,83 juta dolar AS (43,67 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 442,29 juta dolar AS (11,56 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 turun 10,19 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian turun 3,46 persen, dan ekspor hasil tambang turun 6,72 persen.
- Ekspor nonmigas Juni 2023 terbesar adalah ke ekspor ke Cina yaitu 4,58 miliar dolar AS, disusul Amerika Serikat 1,95 miliar dolar AS dan Jepang 1,45 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,30 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar 3,78 miliar dolar AS dan 1,32 miliar dolar AS.

Peningkatan tersebut juga didorong dengan beberapa perjanjian sudah memasuki tahap implementasi sehingga dimanfaatkan oleh pelaku usaha, serta pemahaman yang baik yang dimiliki oleh pelaku usaha atas perjanjian perdagangan yang telah diimplementasi sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkannya. Sampai dengan triwulan II 2023, Indonesia telah menyepakati 37 kesepakatan perdagangan internasional termasuk 18 PTA/FTA/CEPA di dalamnya. Dari 18 PTA/FTA/CEPA tersebut, 15 di antaranya telah diimplementasikan dan dapat

dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Cina, Hong Kong, EFTA, Mozambik dan Korea Selatan.

Berdasarkan data ekspor triwulan II tahun 2023 share ekspor negara ASEAN menempati urutan kedua setelah Cina yaitu sebesar 20,90 persen dengan nilai ekspor 26,89 miliar dolar AS. *Share* ekspor negara mitra yang lain dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

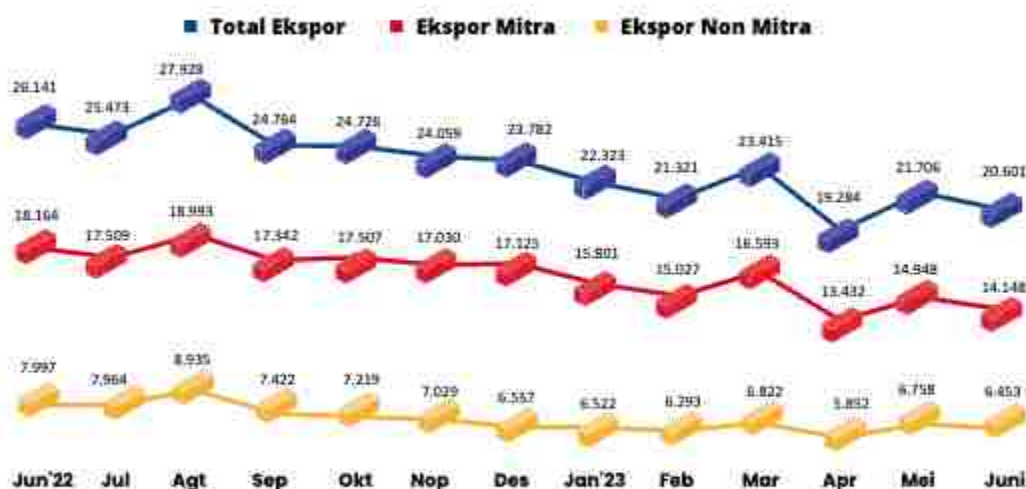
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Triwulan II Tahun 2023

No	Negara	Nilai Ekspor ()	Share Ekspor (%)
1.	REP.RAKYAT CINA	31.212.944.134	24,26
2.	ASEAN	26.890.073.630	20,90
3.	JEPANG	11.003.345.286	8,55
4.	INDIA	9.405.729.147	7,31
5.	KOREA SELATAN	5.052.745.008	3,93
6.	EFTA	1.615.940.331	1,26
7.	AUSTRALIA	1.533.700.346	1,19
8.	PAKISTAN	1.539.688.520	1,20
9.	HONGKONG	1.214.319.904	0,94
10.	SELANDIA BARU	291.774.391	0,23
11.	CHILI	127.673.313	0,10
12.	MOZAMBIK	61.929.826	0,05
13.	PALESTINA	1.243.940	0,00

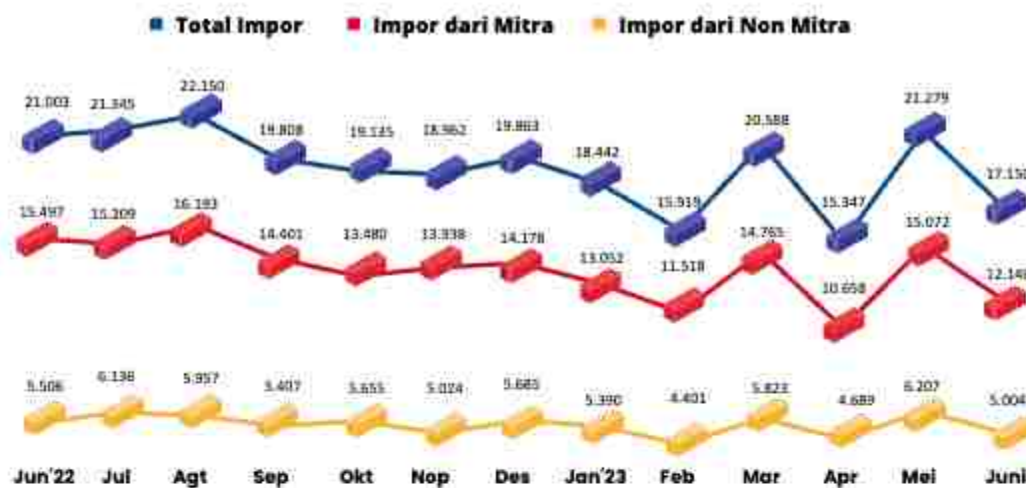
Sumber: PDSI, diolah (2023)

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA FTA/PTA/CEPA DAN NON MITRA PER TRIWULAN II 2023

EKSPOR INDONESIA KE NEGARA MITRA DAN NON NEGARA MITRA PERIODE JUNI 2022 S.D. JUNI 2023



IMPOR INDONESIA DARI NEGARA MITRA DAN NON NEGARA MITRA PERIODE JUNI 2022 S.D. JUNI 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA FTA/CEPA/PTA S.D JUNI 2022 - JUNI 2023



(Juta Dolar AS)
Sumber: BPS

3

Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerja sama Perdagangan Internasional Indonesia

Sampai dengan triwulan II 2023, Indonesia telah menyepakati sejumlah perjanjian perdagangan internasional termasuk PTA/FTA/CEPA meliputi perjanjian perdagangan bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional.



Strategi Multi-Track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia



Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi "multi-track". Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, ataupun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (*binding*), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (*non-binding*).

Setiap forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relatif lebih mudah, forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement (FTA)* bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang atau pun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibandingkan dengan forum kerja sama regional atau pun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G-20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.



Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum kerja sama regional atau pun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (*non-binding*) dan sukarela (*voluntary*), forum multilateral, seperti G-20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan dalam menyikapi kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih luas dan lebih maju, yang mencakup berbagai isu-isu sensitif, seperti isu reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (*green economy*), yang "mandek" atau sulit untuk dibahas di forum yang sifatnya lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan bisa memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang cocok untuk kepentingan negara ini. Dengan mandeknya perundingan WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi "jembatan penghubung" ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC yang merupakan sebuah kerja sama Ekonomi kawasan yang sifatnya tidak mengikat secara hukum, juga membahas mengenai isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP).

Selain itu, hasil dari perundingan APEC juga seringkali dijadikan acuan/pedoman dalam mendorong isu sensitif yang menjadi perdebatan di fora yang bersifat *binding*, seperti upaya ekonomi proponen dalam mempelajari dan mendorong pembahasan Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions (Moratorium on CDET) yang sebenarnya merupakan pembahasan krusial di fora WTO, serta isu sensitif lainnya.

Forum APEC juga membahas kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan antara lain dengan adanya kesepakatan penurunan tarif 0-5% untuk 54 pos tarif barang-barang yang terkait dengan lingkungan yaitu APEC Environmental Goods (EGs) List 2012. Kesepakatan ini tidak hanya berlaku untuk anggota APEC, namun berlaku umum atau Most Favored Nations (MFN).

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN atau pun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai FTA bilateral antara anggota negara ASEAN dengan mitra atau pun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Pada tingkat multilateral, Indonesia merupakan anggota yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS.

Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G-20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM)).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Pada kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Perbatasan Tanpa Kertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G-20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G-20. Indonesia mendukung upaya G-20 untuk reformasi WTO dan berbagai pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G-20, seperti pembiayaan campuran (*blended finance*) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G-20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), International Coffee Organization (ICO), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC dan ITRC.

KERJA SAMA REGIONAL

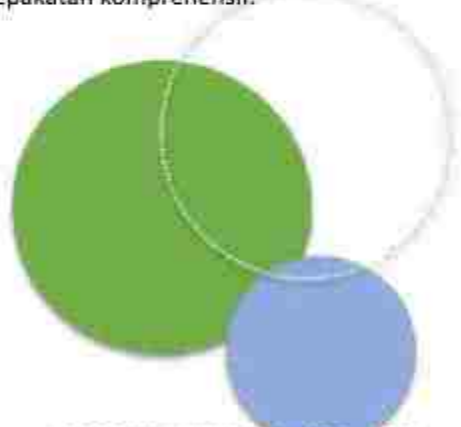
Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja profesional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk memwujudkan terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC Blueprint yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatukan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.



Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepakatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.

Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundingan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Jepang Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (Cina, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menandatangani Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga masih dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat di bawah Kerangka Perjanjian Kerja sama Perdagangan dan Investasi ASEAN-US (ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu Ekonomi pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.

Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, meskipun APEC merupakan forum yang tidak mengikat (*non-binding*). Pada forum ini, Indonesia juga mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai nilai global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (*bilateral FTA*). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi strategis lainnya. Indonesia telah menyepakati 8 (delapan) perjanjian kerja sama bilateral, setelah pada tahun 2007 menandatangani kerja sama bilateral dengan Jepang antara lain Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-UAE dan Indonesia-Iran PTA. Sementara itu, terdapat delapan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang masih berjalan atau dalam proses peninjauan, di antaranya adalah: Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia-Pakistan TIGA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Mauritius PTA, Indonesia-Morocco PTA, dan the Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA. Ringkasan kerja sama perdagangan dan ekonomi Indonesia hingga triwulan II tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 dan kontribusi negara mitra FTA terhadap total ekspor Indonesia dapat dilihat pada tabel 6.



Tabel 5. Ringkasan Kerja Sama Perdagangan dan Ekonomi Indonesia hingga Triwulan II Tahun 2023

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992	30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009	17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		ASEAN Framework Agreement on Services (sampai dengan saat ini sudah diperbaharui sampai dengan AFAS Paket 10)	15 Desember 1995 11 November 2018 (AFAS 10)	30 Desember 1995 (Keppres No.88/1995) 13 Mei 2022 Perpres No.27/2022 (AFAS 10)
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)	ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)	26 Agustus 2014	1 Maret 2019 (Perpres No.26/2011)
	ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea .	24 Agustus 2004	28 Maret 2007 (Perpres No.12/2007)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea .	21 November 2007	30 Agustus 2010 (Perpres No. 56/2010)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea .	2 Juni 2009	18 Maret 2010 (Perpres No. 18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea .	13 Desember 2005	30 Desember 2008 (Perpres No.76/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.34/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China.	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China.	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No. 1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	21 November 2022	Belum diratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	12 Juli 2023 (Perpres No.43/2023)
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei 2023	Belum diratifikasi
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni 2023	Belum diratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies- Ministerial Decision	17 Juni 2022	Belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-CIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret 2023	Belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No.54/2011)

Perjanjian kerja sama perdagangan/ekonomi Internasional terkait lainnya dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 6. Pangsa Perdagangan Indonesia berdasarkan FTA per Triwulan II (Jan-Jun 2023)

Status	Negara Mitra FTA	Trade Share %			
		Export	Import	Export + Import	Total
Concluded	ASEAN	20,90%	20,54%	20,72%	20,72%
	Australia	1,19%	3,96%	2,58%	23,30%
	Chili	0,10%	0,08%	0,09%	23,39%
	Jepang	8,55%	7,62%	8,08%	31,48%
	Pakistan	1,20%	0,08%	0,54%	32,11%
	Cina	24,26%	27,94%	26,10%	58,21%
	Mozambik	0,05%	0,01%	0,03%	58,24%
	EFTA	1,26%	0,41%	0,83%	59,07%
	Korea Selatan	3,93%	4,99%	4,46%	63,53%
	Selandia Baru	0,23%	0,56%	0,39%	63,93%
	Hongkong	0,94%	1,10%	1,02%	64,95%
	UEA	0,93%	0,94%	0,93%	65,88%
	Iran	0,07%	0,01%	0,04%	65,92%
Under Negotiation	Uni Eropa	6,88%	6,39%	6,64%	77,01%
	Kanada	0,45%	1,15%	0,80%	
	Bangladesh	1,23%	0,04%	0,64%	
	EAEU	0,39%	1,37%	0,88%	
	Tunisia	0,05%	0,04%	0,04%	
	MERCOSUR	0,63%	2,61%	1,62%	
	Turkiye	0,62%	0,32%	0,47%	
Under Discussion	GCC	2,31%	4,15%	3,23%	86,55%
	PNG	0,07%	0,02%	0,05%	
	SACU	0,36%	0,67%	0,51%	
	Sri Lanka	0,12%	0,02%	0,07%	
	Peru	0,15%	0,03%	0,09%	
	Kolombia	0,06%	0,00%	0,03%	
	India	7,31%	3,73%	5,52%	
	Ukraina	0,00%	0,07%	0,04%	

Sumber: PDSI, diolah (2023)

Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara yang telah menyelesaikan FTA hingga triwulan II 2023 menyumbang 65,92% dari total ekspor pada triwulan II 2023 (Tabel 6), dan jika negara-negara yang sedang melakukan negosiasi FTA saat ini akan dimasukkan, presentase ini akan meningkat menjadi 77,01%. Jika FTA yang sedang dibahas akan dimasukkan, sekitar 86,55% perdagangan luar negeri Indonesia akan dicapai dalam sistem FTA.

Untuk mengharapkan keuntungan ekonomi yang tinggi dari FTA dengan negara tertentu, FTA harus komprehensif dan jangkauan pembukaan pasar harus luas. Khususnya, rasio penghapusan tarif yang masuk dalam kategori segera harus tinggi, dan ketentuan asal barang dalam bentuk yang netral dan tidak terlalu ketat harus diadopsi dalam perjanjian.





ASEAN TRADE IN GOODS (ATIGA)

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Trade in Goods Agreement adalah persetujuan mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Thailand, dan telah diimplementasikan pada tanggal 17 Mei 2010. ATIGA sebagai perangkat hukum perjanjian perdagangan barang yang komprehensif, terdiri dari 11 Bab, 98 pasal dan 10 Lampiran yang mencakup isu tariff liberalization, Non-tariff Measures (NTMs), Rules of origin (ROO), Trade Facilitation, Customs, Standards, Regulation and Conformity, Assessment Procedures, Sanitary and Phytosanitary dan Trade Remedies.

ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. Hal ini akan memungkinkan terbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.

Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.

ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan menyertakan penerapan kerangka kerja di dalamnya. Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif. ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan menyertakan penerapan Kerangka Kerja di dalamnya.

Manfaat yang diberikan oleh ATIGA diantaranya:

- ATIGA menghilangkan semua tarif (nol persen) untuk hampir semua lini produk;
- Memungkinkan pengiriman barang bolak-balik di dalam negara anggota;
- Mengizinkan faktur barang pihak ketiga;
- Mengizinkan Kumulasi ASEAN: Bahan baku asal yang bersumber dari Negara Anggota ASEAN lainnya dapat diperhitungkan saat menilai kriteria asal produk akhir yang diproduksi di Indonesia, hal ini memudahkan produk eksportir Indonesia untuk memenuhi kriteria perlakuan preferensial.

PERDAGANGAN

PERKEMBANGAN EKSPOR

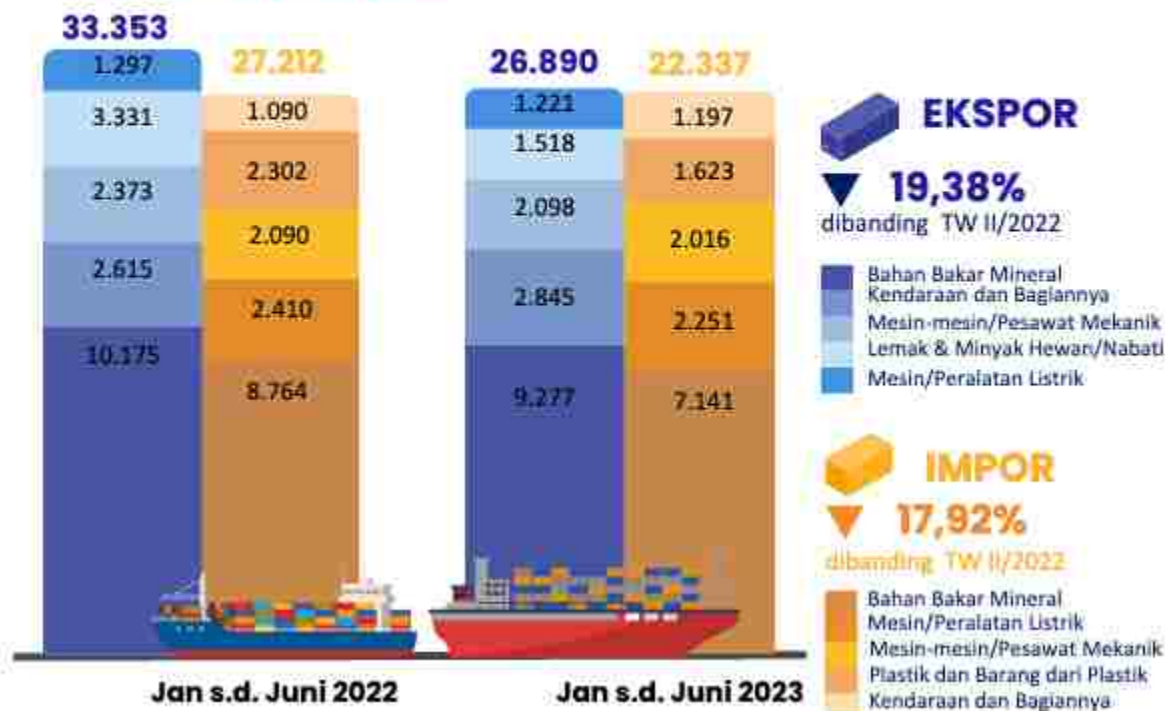
- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN Januari–Juni 2023 mencapai 26,89 miliar dolar AS atau turun 19,38 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas ke ASEAN mencapai 22,84 miliar dolar AS atau turun 17,82 persen.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada bijih, kerak dan abu logam sebesar 93,72 juta dolar AS (97,96 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada besi dan baja sebesar 95,2 juta dolar AS (65,92 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke ASEAN hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 turun 14,84 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 16,77 persen dan ekspor hasil pertambangan turun 11,57 persen.
- Ekspor nonmigas ke ASEAN sampai dengan Juni 2023 terbesar adalah ke Filipina yaitu 5,59 miliar dolar AS, disusul Malaysia 5,33 miliar dolar AS dan Singapura 4,37 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 12,66 persen dari seluruh ekspor nonmigas ke seluruh dunia. Sementara ekspor ke Vietnam dan Thailand masing-masing sebesar 3,74 miliar dolar AS dan 2,84 miliar dolar AS.

PERKEMBANGAN IMPOR

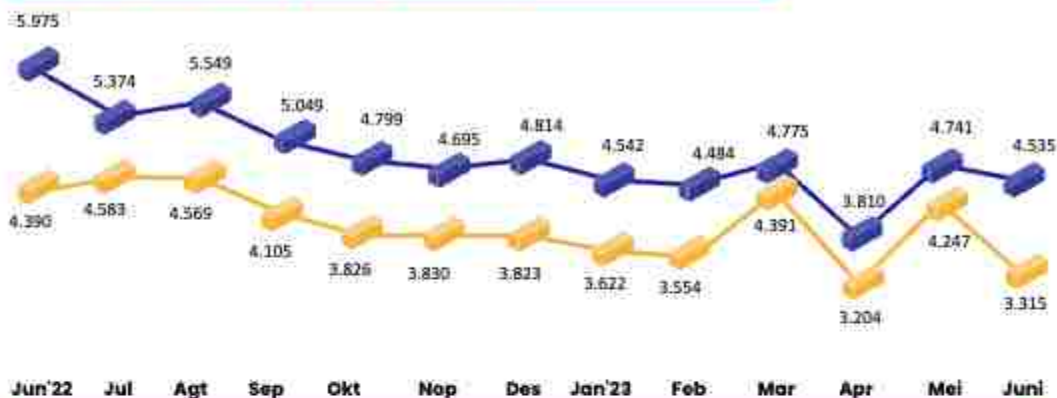
- Nilai impor Indonesia dari ASEAN pada Juni 2023 mencapai 3,32 miliar dolar AS, turun 21,96 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 30,09 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor migas Juni 2023 senilai 1,03 miliar dolar AS, turun 16,05 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 45,67 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor nonmigas Juni 2023 senilai 2,28 miliar dolar AS, naik 24,38 persen dibandingkan Mei 2023 atau naik 19,65 persen dibandingkan Juni 2022.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah mesin/peralatan listrik senilai 115,08 juta dolar AS (24,35 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah kapal laut 22,40 juta dolar AS (442,67 persen).
- Tiga negara ASEAN pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Juni 2023 adalah Thailand 5,31 miliar dolar AS (34,78 persen), Singapura 3,78 miliar dolar AS (24,78 persen), dan Malaysia 2,86 miliar dolar AS (18,73 persen). Sementara itu Vietnam 2,44 miliar dolar AS (16 persen) dan Filipina 737,25 juta dolar AS (16 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang konsumsi senilai 410,68 juta dolar AS (22,03 persen) dan barang modal 113,49 juta (5 persen). Sementara impor bahan baku/penolong turun 1,01 miliar dolar AS (15,74 persen).
- Neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN pada bulan Juni 2023 mengalami surplus 1,22 miliar dolar AS terutama berasal dari sektor nonmigas 1,5 miliar dolar AS, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 281 juta dolar AS.



PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA DI ASEAN TRIWULAN II TAHUN 2023



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUNI 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN ASEAN, JUNI 2023 - JUNI 2023



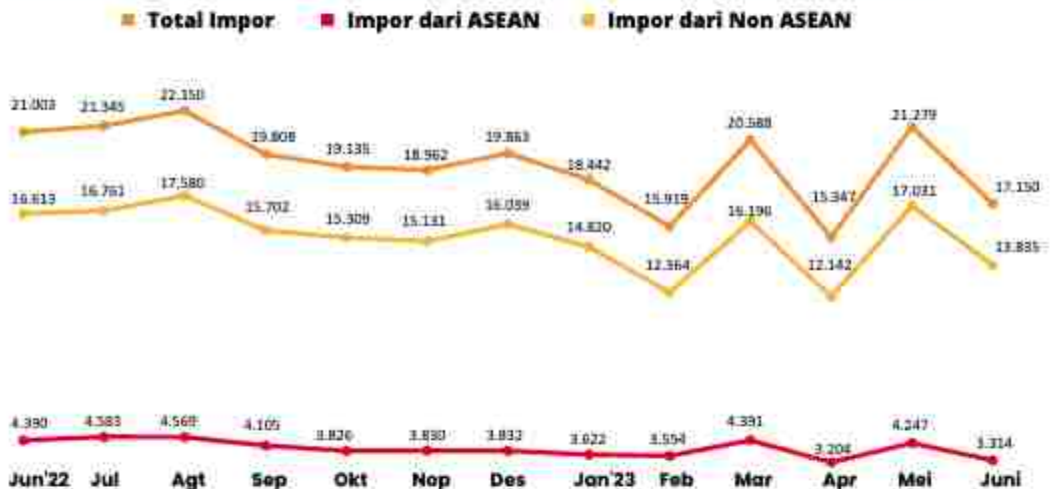
(Juta dolar AS)
Sumber: BPS



EKSPOR INDONESIA KE NEGARA ASEAN DAN NON ASEAN PERIODE JUNI 2022 S.D. JUNI 2023



IMPOR INDONESIA DARI NEGARA ASEAN DAN NON ASEAN PERIODE JUNI 2022 S.D. JUNI 2023



(Juta Dolar AS)

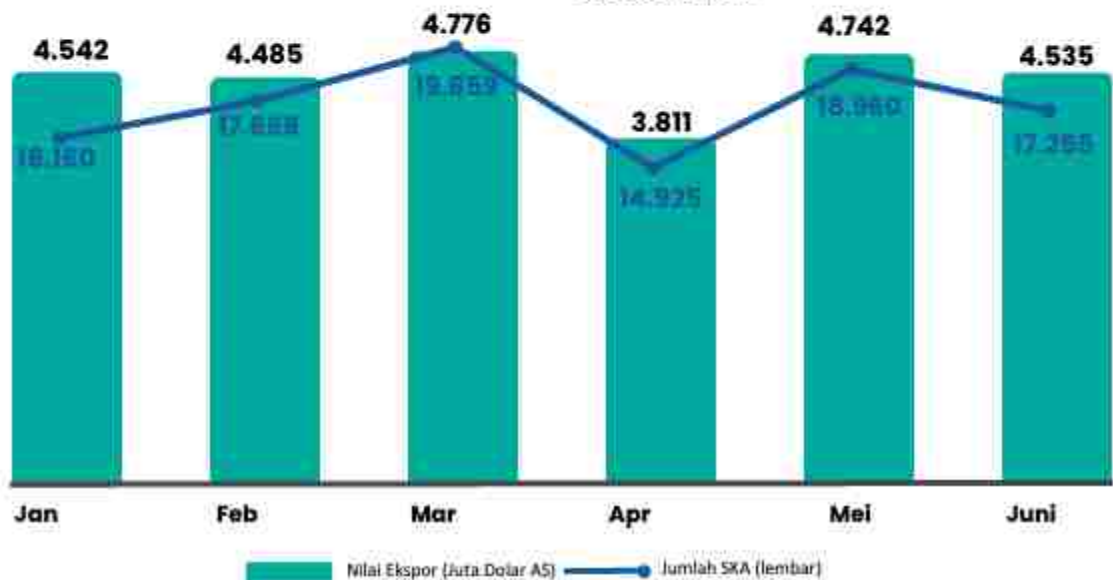
Sumber: BPS.

Selama periode Juni 2022-Juni 2023, total ekspor Indonesia ke dunia secara umum mengalami tren penurunan. Namun, tren penurunan ini tercatat lebih menonjol ketika fokus ditujukan pada ekspor Indonesia ke negara-negara non ASEAN. Gambar di atas menunjukkan penurunan ekspor ke negara ASEAN lebih lambat dibandingkan dengan penurunan ekspor ke negara Non ASEAN. Data yang disajikan dalam gambar menunjukkan bahwa nilai ekspor ke dunia menurun secara fluktuatif sejak bulan Juni 2022 s.d. Juni 2023. Sedangkan penurunan ekspor di periode yang sama ke negara ASEAN juga menurun, namun penurunannya relatif stabil. Selain dari pada itu, gambar di atas menunjukkan bahwa nilai total impor Indonesia dari dunia menurun dari 21 miliar dolar AS pada bulan Juni 2022 menjadi 17 miliar dolar AS pada bulan Juni 2023. Sedangkan impor Indonesia dari ASEAN juga mengalami penurunan di periode yang sama yaitu 4,3 miliar dolar AS menjadi 3,3 miliar dolar AS. Perlu ditegaskan bahwa meskipun demikian, kinerja ekspor Indonesia ke ASEAN selama periode analisis tetap memuaskan. Hal ini tercermin dari neraca perdagangan yang positif antara Indonesia dan ASEAN.

UTILISASI SKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (FORM D)

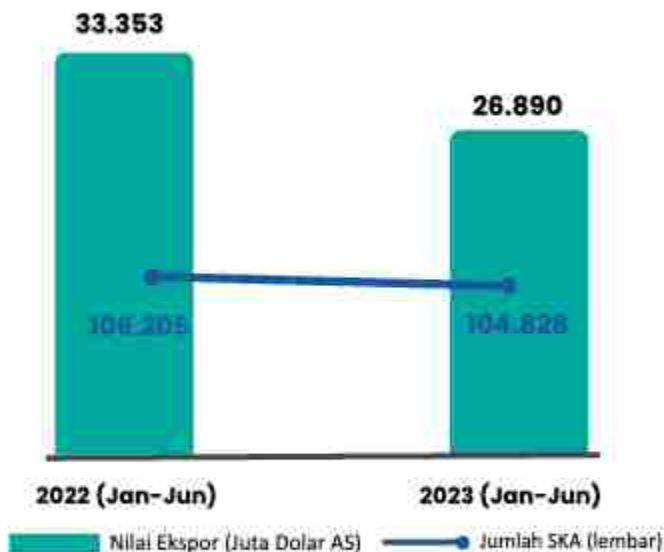
Pada tahun 2023, pemanfaatan SKA form D menunjukkan performa yang baik. Pemanfaatan form D bulan Januari sampai dengan Mei menunjukkan pergerakan yang naik, kecuali pada bulan Maret sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.

Sementara itu pemanfaatan SKA form D sampai dengan triwulan II 2023 lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2023 jumlah SKA form D sebanyak 104.828 lembar dan triwulan II 2022 jumlah SKA sebanyak 106.205 lembar.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 1. Utilisasi SKA Form D ke Negara-Negara ASEAN Januari - Juni 2023



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 2. Utilisasi SKA Form D ke Negara-Negara ASEAN Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT (ACIA)

ACIA telah mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012 untuk mendukung sistem yang bebas, terbuka, transparan dan rezim investasi terintegrasi di Kawasan ASEAN sejalan dengan tujuan pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. ACIA berwawasan ke depan dengan memperhatikan perubahan bisnis dan ekonomi global. ACIA juga dimaksudkan untuk menopang keberlanjutan ASEAN menuju agenda integrasi ekonominya di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 dan seterusnya.

LIBERALISASI

MANFAAT ACIA



ACIA mendorong liberalisasi investasi yang progresif di ASEAN dimulai dengan 5 sektor dan jasa-jasa yang terkait, yaitu: (1) Manufacturing and Related Services, (2) Agriculture and Related Services, (3) Fishery and Related Services, (4) Forestry and Related Services, (5) Mining and Quarrying Related Services. Investor ASEAN memiliki kesempatan berinvestasi di semua sektor tersebut.

TANPA DISKRIMINASI

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Perlakuan Nasional dan Perlakuan Most-Favoured Nation, negara-negara Anggota ASEAN juga sepakat untuk tidak memperlakukan Investor ASEAN secara kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing lokal atau asing (atau perusahaan serupa). ACIA mengizinkan investor ASEAN untuk memilih manajemen senior terlepas dari kewarganegaraan mereka untuk mengelola investasi mereka di ASEAN. ACIA juga melarang negara anggota ASEAN untuk menerapkan kinerja apa pun, seperti kuota produksi atau target ekspor pada investor ASEAN mana pun dan investasi mereka.



TRANSPARANSI

Investor di bawah ACIA dapat mengharapkan peraturan, regulasi, kebijakan dan prosedur investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi, termasuk: (a) harmonisasi kebijakan investasi yang dapat mengarah pada kebijakan investasi konvergensi, (b) prosedur yang disederhanakan untuk permohonan dan persetujuan investasi, (c) penyebaran informasi mengenai peraturan, regulasi, kebijakan dan prosedur yang mempengaruhi investor dan investasi mereka di ASEAN



PERLINDUNGAN INVESTOR ASEAN

ACIA menawarkan perlindungan komprehensif kepada investor ASEAN dan investasi mereka melalui penyediaan: (1) Fair and Equitable Treatment, (2) Full Protection and Security, (3) No Unlawful Expropriation, (4) Free Transfer of Funds.



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INVESTOR

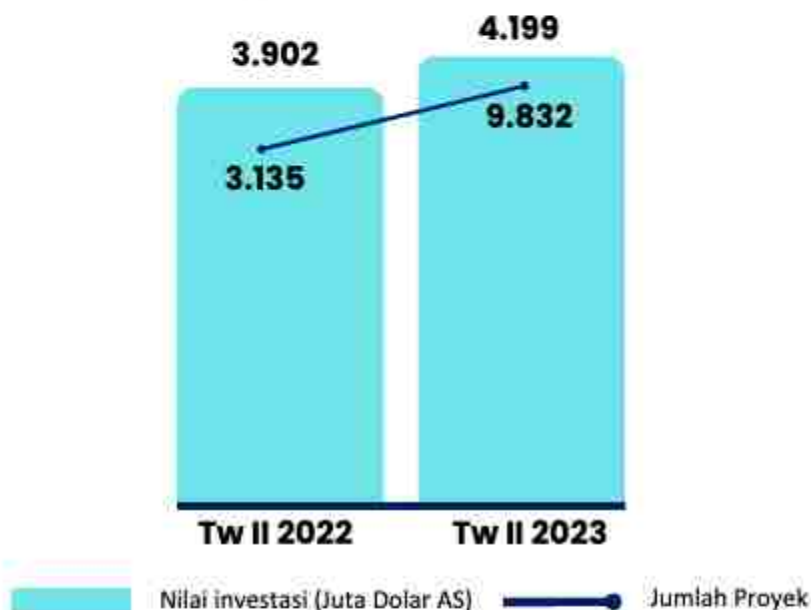
× NEGARA

Jika terjadi konflik dengan Pemerintah tuan rumah, Investor ASEAN diberikan pilihan untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan alternatif atau merujuk perselisihan tersebut ke pengadilan domestik atau arbitrase internasional yang mengikat.



PERKEMBANGAN INVESTASI ASEAN DI INDONESIA

Perkembangan investasi dari negara-negara ASEAN mengalami penurunan pada saat pandemi di tahun 2019-2020. Namun seiring dengan membaiknya kondisi pandemi, terjadi peningkatan nilai investasi di Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 nilai investasi negara ASEAN ke Indonesia senilai 16.848 juta dengan jumlah proyek 9.810. Sementara itu pada triwulan II 2023 nilai proyek 4.199 dengan jumlah proyek 9.832. Nilai ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2022 senilai 3.902 dolar AS dengan jumlah proyek 3.135, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik berikut.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 3. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara ASEAN ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023



REALISASI INVESTASI ASEAN TRIWULAN II 2023

Realisasi investasi ASEAN
pada kuartal II 2023

4,2 Miliar Dolar AS

meningkat 8% (YoY)

Jumlah proyek pada
kuartal II 2023

9.832 Proyek

meningkat >100% (YoY)

TIGA TERBESAR INVESTASI NEGARA ASEAN KE INDONESIA



3,37 Miliar
8.102 Proyek



783,68 Juta
1.404 Proyek



44,97 Juta
257 Proyek



Singapura



Transportasi,
Gudang dan
Telekomunikasi:

655 Jt



Tanaman,
Pangan,
Perkebunan,
dan
Peternakan

463 Jt



Industri Logam
Dasar, Barang
Logam, Bukan
Mesin dan
Peralatannya

391 Jt



Perumahan,
Kawasan
Industri dan
Perkantoran

368 Jt



Jasa Lainnya

279 Jt

(Dalam dolar AS)

Sumber: BKPM (2023)



Malaysia



Industri Kimia
Dan Farmasi

368 Jt



Industri Kertas
dan Percetakan

116 Jt



Transportasi,
Gudang dan
Telekomunikasi:

71 Jt



Industri
Makanan

69 Jt



Tanaman,
Pangan,
Perkebunan,
dan
Peternakan

61 Jt



Thailand



Pertambangan

11 Jt



Industri Lainnya

9 Jt



Industri Mesin,
Elektronik,
Instrumen
Kedokteran,
Peralatan Listrik,
Presisi, Optik
dan Jarn

6 Jt



Industri
Makanan

5 Jt



Jasa Lainnya

5 Jt

LIMA SEKTOR TERBESAR INVESTASI ASEAN KE INDONESIA

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

725,71 Juta
meningkat >100 % (YoY)



591 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan

524,06 Juta
meningkat 84,84 % (YoY)



476 Proyek
meningkat 73,72 % (YoY)

Industri Kimia dan Farmasi

438,36 Juta
meningkat 7,49 % (YoY)



260 Proyek
meningkat 80,56 % (YoY)

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

393,82 Juta
turun 65,49% (YoY)



202 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

381,03 Juta
meningkat 64,19 % (YoY)



428 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Sumber: BKPM (2023)



REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

RCEP merupakan konsep kerja sama ekonomi yang semula melibatkan 16 Negara, yaitu 10 Negara anggota ASEAN dan 6 (enam) Negara Mitra ASEAN+1 FTA (RRT, Korea, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India). Pada KTT RCEP ke-3 tahun 2019, India menyatakan belum dapat bergabung dalam RCEP mengingat sejumlah isu yang menjadi concern India belum dapat diselesaikan. RCEP mewakili 29.6% penduduk dunia, 30,2% GDP dunia, 27.4% perdagangan dunia serta 29.8% FDI dunia.

Berdasarkan kajian manfaat yang telah dilakukan oleh Puska KPI BP3 Kemendag, RCEP menciptakan efek trade creation bagi Indonesia dimana ekspor dan impor meningkat. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menyebabkan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar 5,01 miliar dolar AS pada tahun 2040.

Jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat, namun sangat kecil, hanya 0.23 miliar dolar AS di 2040. Sementara dari segi neraca perdagangan, bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus terhadap neraca perdagangan secara total (barang dan jasa) yang lebih besar dibandingkan jika tidak bergabung.

Sebagai langkah implementasi RCEP, pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29 pada tanggal 22 Maret 2023 disepakati untuk menugaskan Komite Bersama RCEP untuk segera menyelesaikan

mekanisme pendanaan untuk pembentukan Unit Pendukung RCEP/RCEP Support Unit (RSU) di Sekretariat ASEAN yang merupakan salah satu capaian prioritas ekonomi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

PERDAGANGAN

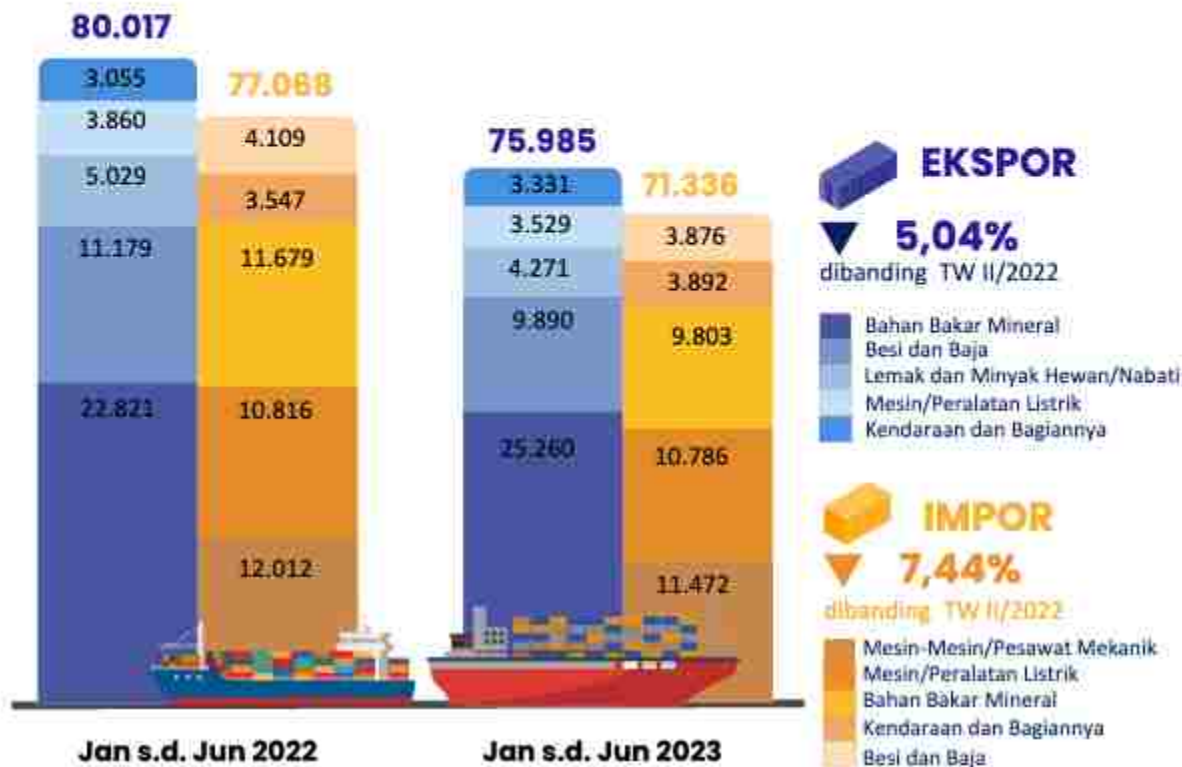
PERKEMBANGAN EKSPOR

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke RCEP Januari–Juni 2023 mencapai 75,99 miliar dolar AS atau turun 5,04 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas ke RCEP mencapai 68,65 miliar dolar AS atau turun 5,78 persen.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 328,75 juta (11,40 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 363,23 juta (72,48 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke RCEP hasil industri pengolahan dan lainnya Januari–Juni 2023 turun masing-masing 8,80 persen dan 10,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara itu ekspor pertambangan naik sebesar 1,71 persen, demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 1,81 persen.
- Ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2023 ke negara-negara RCEP terbesar adalah ke Cina yaitu 29,93 miliar dolar AS, disusul Jepang 10,02 miliar dolar AS dan Filipina 5,59 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 37,70 persen terhadap ekspor nonmigas nasional. Sementara ekspor ke Malaysia dan Singapura masing-masing sebesar 5,33 miliar dolar AS dan 4,37 miliar dolar AS.
- Neraca perdagangan Indonesia dengan RCEP pada bulan Juni 2023 mengalami surplus 587 juta terutama berasal dari sektor nonmigas 502 miliar dolar AS, ditambah surplus dari sektor migas senilai 86 juta dolar AS.

PERKEMBANGAN IMPOR

- Nilai impor Indonesia dari RCEP pada Juni 2023 mencapai 11,30 miliar dolar AS, turun 18,61 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 20,29 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor migas Juni 2023 senilai 1,14 miliar dolar AS, turun 18,41 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 43,75 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor nonmigas Juni 2023 senilai 10,17 miliar dolar AS, turun 18,63 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 16,38 persen dibandingkan Juni 2022.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah mesin-mesin/pesawat mekanik senilai 392,33 juta (16,68 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah pada barang kiriman 82,99 juta (180 persen).
- Tiga negara ASEAN pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Juni 2023 adalah Cina 29,98 miliar dolar AS (32,56 persen), Jepang 8,23 miliar dolar AS (8,94 persen), dan Thailand 5,31 miliar dolar AS (5,77 persen). Sementara itu Korea Selatan 4,93 miliar dolar AS (5,36 persen) dan Australia 4,18 miliar dolar AS (4,54 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang konsumsi senilai 641,69 juta dolar AS (12,19 persen) dan barang modal 1,24 miliar dolar AS (8,93 persen). Sementara impor bahan baku/penolong turun 5,28 miliar dolar AS (11,2 persen).

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA RCEP TRIWULAN II TAHUN 2023



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUN 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN RCEP, JUNI 2022- JUNI 2023



EKSPOR NON MIQAS JAN - JUN 2023

CHINA	29.930	CHINA	29.985
JEPANG	10.022	JEPANG	8.229
PIUPINA	5.595	THAILAND	5.311
MALAYSIA	5.330	KOREA SEL.	4.933

UTILISASI SKA

Penggunaan SKA form RCEP terus mengalami peningkatan sejak diimplementasikan pada awal 2023. Pada grafik di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah lembar SKA yang digunakan mengalami pergerakan dinamis dengan kecenderungan meningkat. Namun demikian secara total, ekspor ke negara-negara RCEP berfluktuasi.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

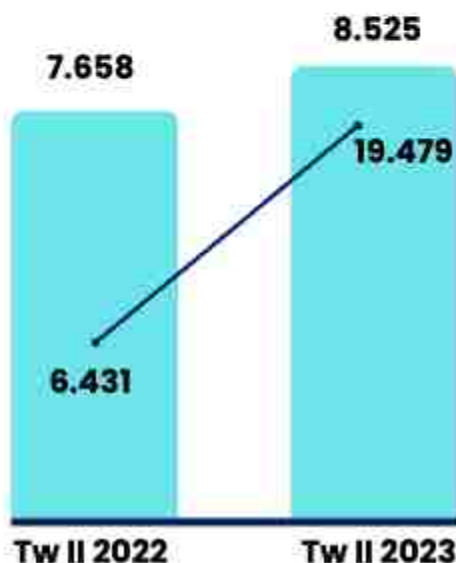
Gambar 4. Utilisasi SKA ke Negara-Negara RCEP bulan Januari-Juni 2023



INVESTASI

Perkembangan investasi dari negara-negara RCEP berfluktuasi sejak pandemi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 20.912 proyek dari negara RCEP dengan nilai 28,38 miliar.

Sementara itu pada triwulan II 2023 jumlah proyek dari negara RCEP adalah 19.479 dengan nilai 8.525 juta. Nilai ini meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2022 jumlah proyek 6.431 dengan nilai 7.658 sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.



■ Nilai investasi (Juta Dolar AS) —●— Jumlah Proyek

Sumber: BKPM (2023)

Gambar 5. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara RCEP ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023

REALISASI INVESTASI RCEP TRIWULAN II 2023

Realisasi investasi RCEP
pada kuartal II 2023

8,53 Miliar Dolar AS

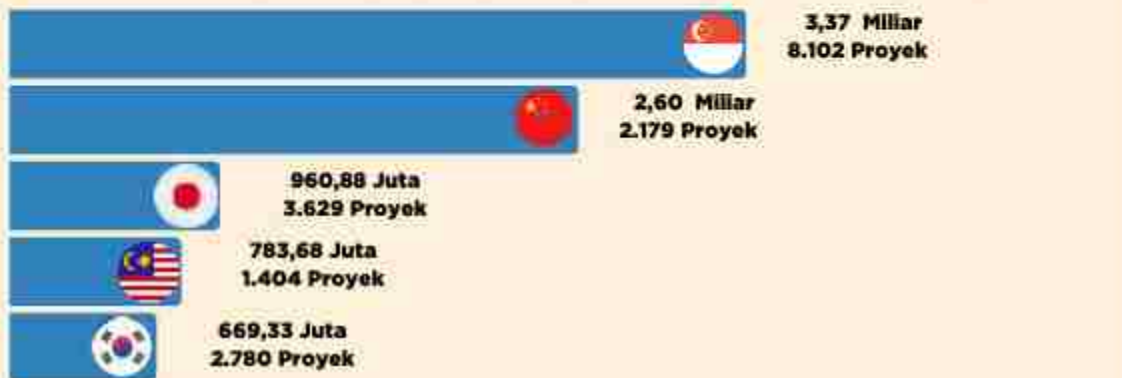
meningkat 11,3% (YoY)

Jumlah proyek pada
kuartal II 2023

19.479 Proyek

meningkat >100 % (YoY)

LIMA TERBESAR INVESTASI NEGARA RCEP KE INDONESIA



Singapura



Cina



Jepang



Malaysia



Korea Selatan



Sumber: BKPM (2023), dalam dolar AS

LIMA SEKTOR TERBESAR INVESTASI RCEP KE INDONESIA

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

1,84 Miliar
meningkat >100 % (YoY)



932 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

1,33 Miliar
turun 34,73% (YoY)



526 Proyek
meningkat 90,58% (YoY)

Industri Kimia dan Farmasi

947 Juta
meningkat 22,90% (YoY)



572 Proyek
meningkat 96,56% (YoY)

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

541,86 Juta
turun 5,62% (YoY)



863 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

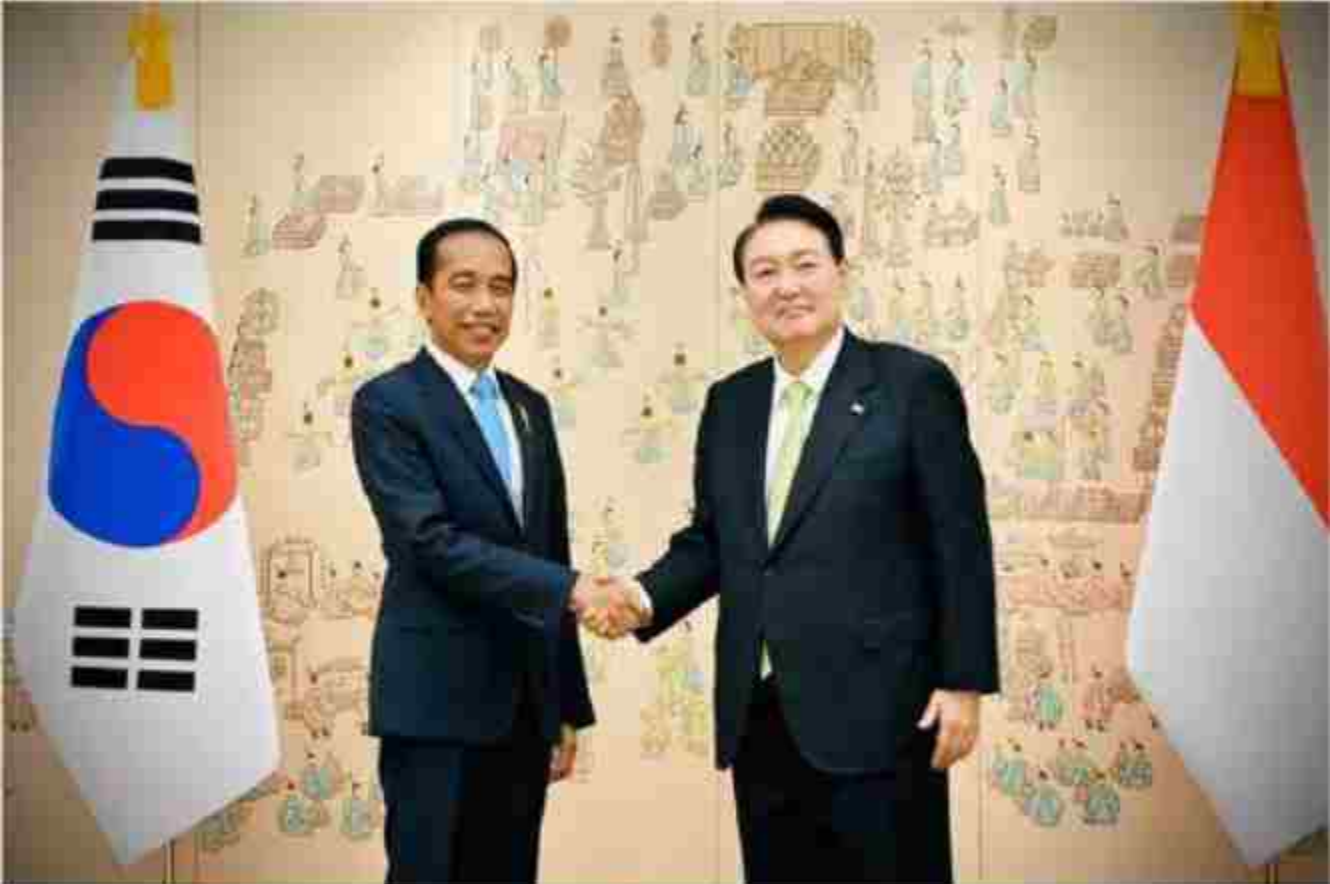
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan

535,82 Juta
meningkat 80,70% (YoY)



560 Proyek
meningkat 83,01% (YoY)

Sumber: BKPM (2023), dalam dolar AS



INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)

Indonesia telah menyepakati Indonesia–Korea CEPA yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE) Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Indonesia telah mengimplementasikan IK-CEPA mulai tanggal 2 Januari 2023.

Sebagai langkah implementasi, Indonesia dan Korea Selatan telah melaksanakan pertemuan Committee on Economic Cooperation dalam Kerangka Implementing Arrangement Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 27–28 Februari 2023 di Seoul, Korea Selatan.

Pertemuan bertujuan untuk membahas rules and procedures Komite Kerja Sama Ekonomi, serta membahas proposal kerja sama ekonomi Indonesia yang mencakup sejumlah sektor yakni pertanian, kesehatan, budaya dan industri kreatif, konstruksi/ infrastruktur, kelautan, perdagangan, dan industri

Kedua negara juga telah menyepakati perjanjian regional dalam skema Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Pada 15 November 2020, perjanjian RCEP telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN dan lima negara mitra, termasuk Korea di dalamnya. RCEP telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 dan Indonesia telah mengimplementasikan mulai tanggal 2 Januari 2023.

Sebelumnya, Indonesia bersama-sama dengan anggota ASEAN telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Korea dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antara negara anggota ASEAN dan Korea Selatan dengan secara progresif meliberalisasi dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan pasar yang fasilitatif, transparan, dan liberal. Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation antara ASEAN – Korea ditandatangani oleh negara anggota ASEAN dan Korea pada tahun 2005. ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement yang ditandatangani pada tahun 2006 ASEAN-Korea Trade in Services Agreement pada tahun 2007 dan ASEAN-Korea Investment Agreement ditandatangani pada tahun 2009. Sedangkan Agreement on Dispute Settlement Mechanism antara ASEAN dan Korea juga ditandatangani pada tahun 2005.

Komitmen Korea di IK-CEPA lebih tinggi (mencakup lebih banyak pos tarif) dibanding komitmen Korea pada ASEAN-Korea FTA. Sebanyak 11.267 pos tarif Korea (92%) akan dieliminasi tarifnya (0%) pada saat IK-CEPA diimplementasi. 420 pos tarif Korea (3,4% dari total pos tarif) akan dieliminasi tarifnya secara bertahap dalam 3-20 tahun setelah implementasi.

Manfaat yang akan diberikan IK CEPA antara lain:

- Peningkatan akses pasar barang Indonesia ke Korea Selatan karena komitmen IK CEPA lebih dalam dari ASEAN - Korea FTA;
- Masing-masing negara membuka lebih dari 100 sub sektor jasa dengan kepemilikan saham asing berkisar antara 51% hingga 100%;
- Kerja sama ekonomi di sektor industri; pertanian, perikanan, kehutanan; aturan dan prosedur perdagangan yang fasilitatif; pergerakan orang perseorangan; dan area kerja sama lainnya; serta d) Potensi peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia yang akan memberikan dampak positif dari segi transfer teknologi dan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

PERDAGANGAN

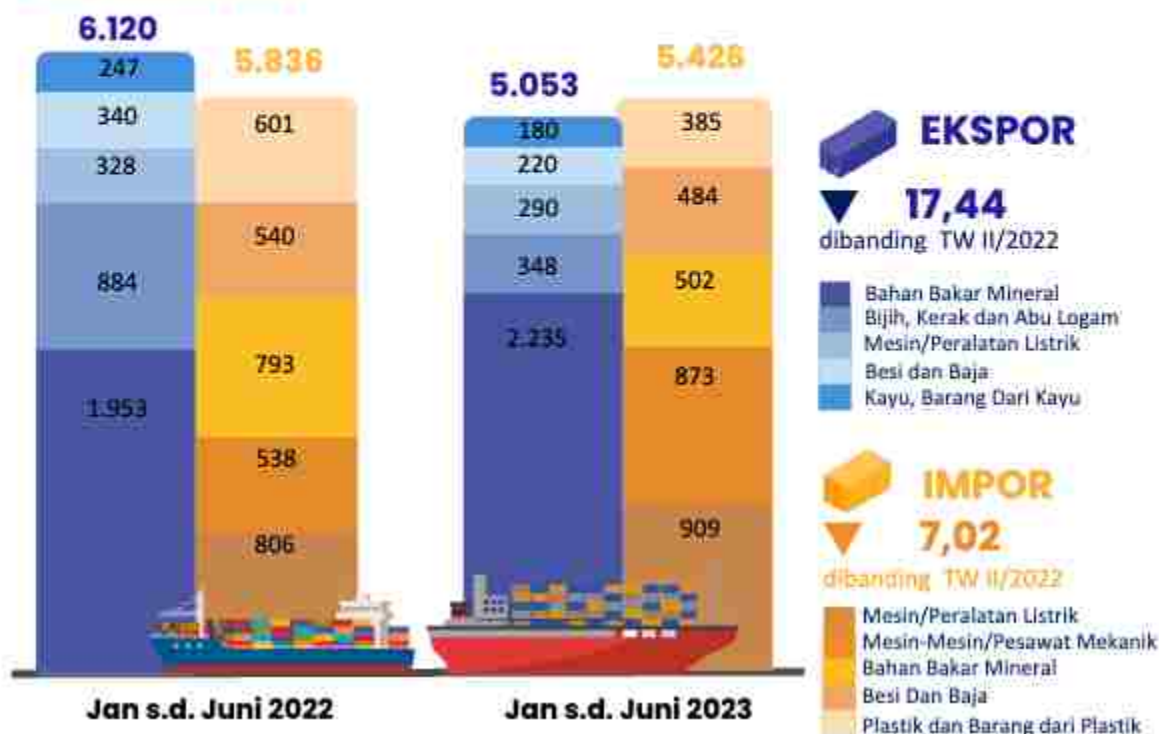
PERKEMBANGAN EKSPOR

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan Januari–Juni 2023 mencapai 5,05 miliar dolar AS atau turun 17,44 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas ke Korea Selatan mencapai 4,17 miliar dolar AS atau turun 24,681 persen.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar 39,16 juta dolar AS (23,87 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada pakaian jadi bukan rajutan sebesar 8,85 juta dolar AS (127,79 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke Korea Selatan untuk hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 turun 24,41 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, demikian juga hasil pertambangan dan lainnya masing-masing turun 25,39 persen dan 35,51 persen. Sementara itu ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 30,51 persen.
- Ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2023 ke Korea Selatan sebesar 4,18 miliar dolar AS dan memiliki kontribusi sebesar 3,46 persen terhadap total ekspor nasional ke seluruh negara di dunia.

PERKEMBANGAN IMPOR

- Nilai impor Indonesia dari Korea Selatan pada Juni 2023 mencapai 847 juta dolar AS, turun 21,50 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 17,17 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor migas Juni 2023 senilai 97 juta dolar AS, turun 1,61 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 48,44 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor nonmigas Juni 2023 senilai 751 juta dolar AS, turun 23,49 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 10,16 persen dibandingkan Juni 2022.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah mesin-mesin/ pesawat mekanik senilai 94,21 juta dolar AS (40,07 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah kendaraan dan bagiannya 12,71 juta dolar AS (16,40 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal senilai 590,05 juta dolar AS (83,32 persen). Sementara impor bahan baku/penolong turun senilai 710,4 juta dolar AS (17,28 persen) dan konsumsi naik 159,63 juta dolar AS (47,96 persen).
- Korea Selatan merupakan pemasok barang impor nonmigas terbesar keempat setelah Cina, Jepang dan Thailand selama Januari–Juni 2023 dengan nilai 4,93 miliar dolar AS (5,36 persen). Sementara itu Cina dengan nilai 29,98 miliar dolar AS (32,56 persen), Jepang sebesar 8,23 miliar dolar AS (8,94 persen) dan Thailand sebesar 5,31 miliar dolar AS (5,77persen).
- Neraca perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan pada bulan Juni 2023 mengalami defisit 164 juta dolar AS terutama berasal dari sektor nonmigas 164 juta dolar AS, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 26 juta dolar AS.

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TRIWULAN II/2023*



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUNI 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN, JUNI 2022- JUNI 2023



EKSPOR NON MIDAS
JAN-JUN 2023

IMPOR NON MIDAS
JAN-JUN 2023

4.179



4.933

Korea Selatan menempati urutan ke-8 negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia

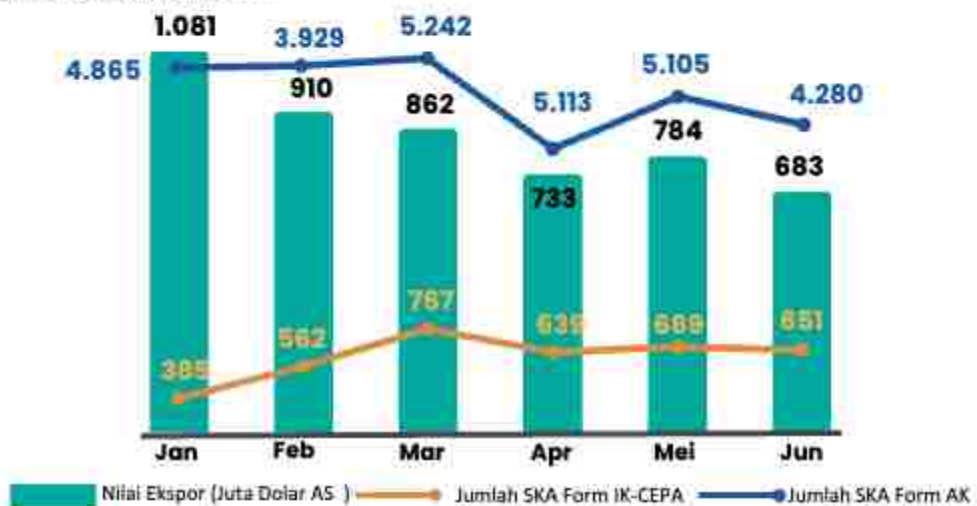
Korea Selatan menempati urutan ke-4 negara pemasok barang nonmigas Indonesia

(Juta Dolar AS)
Sumber: BPS

UTILISASI SKA

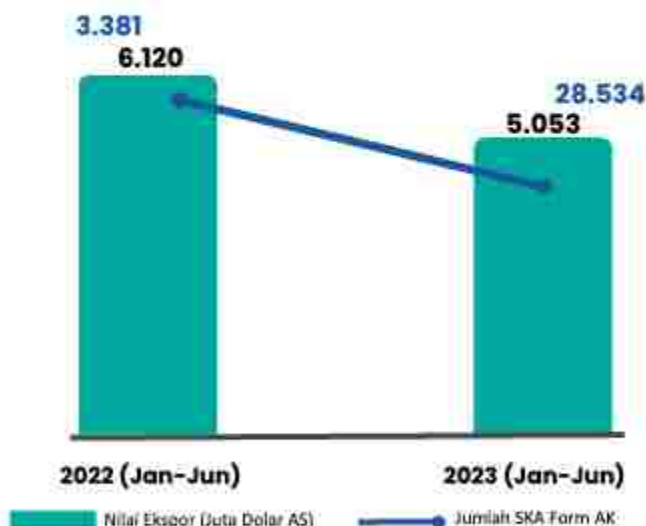
Pemanfaatan SKA form IK sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun dibandingkan dengan penggunaan form AK masih cukup jauh, mengingat perjanjian IK-CEPA baru diimplementasikan pada bulan Januari 2023. Pada bulan Januari-Juni 2023 ekspor ke Korea Selatan berfluktuasi. Sementara itu penggunaan lembar SKA juga menunjukkan pergerakan yang cukup dinamis sebagaimana ditunjukkan gambar berikut ini.

Pemanfaatan form AK sampai dengan triwulan II 2023 lebih rendah dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana pada triwulan II 2023 sebanyak 24.254 lembar dan triwulan II 2022 sebanyak 27.649.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 6. Utilisasi SKA Form IK-CEPA dan Form AK ke Korea Selatan bulan Januari-Juni 2023



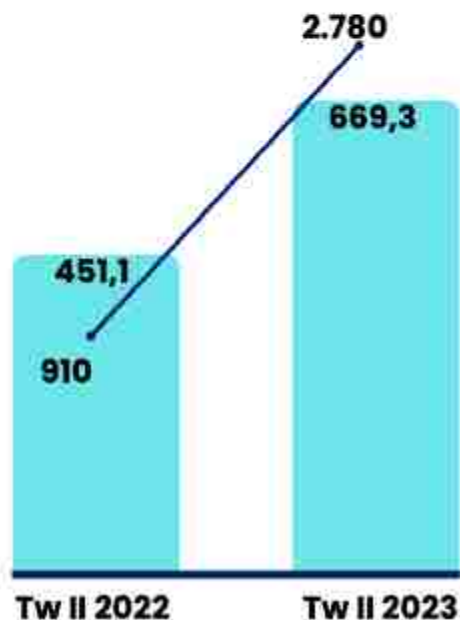
Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 7. Utilisasi SKA Form AK ke Korea Selatan Triwulan II Tahun 2022 dan 2023

INVESTASI

Perkembangan investasi dari Korea Selatan mengalami penurunan sejak pandemi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 2.907 proyek dengan nilai 2,3 miliar dolar AS.

Sementara itu pada triwulan II 2023 jumlah proyek dari Korea Selatan adalah 2.780 dengan nilai 669,3 juta dolar AS. Nilai ini meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2022 jumlah proyek 910 dengan nilai 451,1 juta dolar AS sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.



■ Nilai investasi (Juta dolar AS) —●— Jumlah Proyek

Sumber: BKPM (2023)

Gambar 8. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Korea Selatan ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023

REALISASI INVESTASI KOREA SELATAN TRIWULAN II 2023



Realisasi investasi Australia
pada kuartal II 2023

669,3 Juta

meningkat 48,4 % (YoY)



Jumlah proyek pada
kuartal II 2023

2.780 Proyek

meningkat >100 % (YoY)

LIMA SEKTOR TERBESAR INVESTASI KOREA SELATAN KE INDONESIA

Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran

212,11 Juta

meningkat >100% (YoY)



116 Proyek

meningkat 70 % (YoY)

Listrik, Gas dan Air

138,03 Juta

turun 2,67 % (YoY)



23 Proyek

meningkat >100 % (YoY)

Industri Kimia dan Farmasi

77,48 Juta

meningkat >100 % (YoY)



102 Proyek

meningkat >100 % (YoY)

Industri Lainnya

70,26 Juta

meningkat >100 % (YoY)



135 Proyek

meningkat >100 % (YoY)

Industri Tekstil

26,84 Juta

turun 20% (YoY)



258 Proyek

meningkat >100 % (YoY)

Sumber: BKPM (2023), dalam dolar AS

INDONESIA-EFTA CEPA (SWISS, ISLANDIA, NORWEGIA DAN LIECHTENSTEIN)

Perjanjian Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta oleh Menteri Perdagangan RI dan para Menteri negara-negara EFTA. Persetujuan IE-CEPA merupakan persetujuan dagang pertama Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa. IE-CEPA diimplementasi pada tanggal 1 November 2021. Persetujuan IE-CEPA mencakup 12 Bab, 17 Lampiran dan 17 Keterangan Tambahan dari Lampiran yang mencakup ketentuan umum, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

Pada perdagangan barang, Islandia memberikan penghapusan tarif sebesar 99,94% dari nilai impornya dari Indonesia, Norwegia 99,75% dan Swiss 99,65%. Komitmen kelapa sawit yang diberikan EFTA kepada Indonesia merupakan komitmen terbaik yang diberikan EFTA kepada Indonesia. IE-CEPA juga memiliki skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang UMKM. Dengan adanya IE-CEPA, EFTA diharapkan dapat dijadikan hub atau pintu masuk untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang dan jasa serta mendorong investasi Indonesia. Hal ini dikarenakan EFTA memiliki jaringan kerja sama FTA/CEPA yang paling luas di dunia, termasuk dengan Uni Eropa dan juga merupakan pasar yang mempunyai daya beli (purchasing power) yang tinggi serta penanaman modal asing yang besar, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Barang, jasa dan investasi Indonesia dan EFTA juga saling melengkapi (komplementaritas, bukan bersaing).



PERDAGANGAN

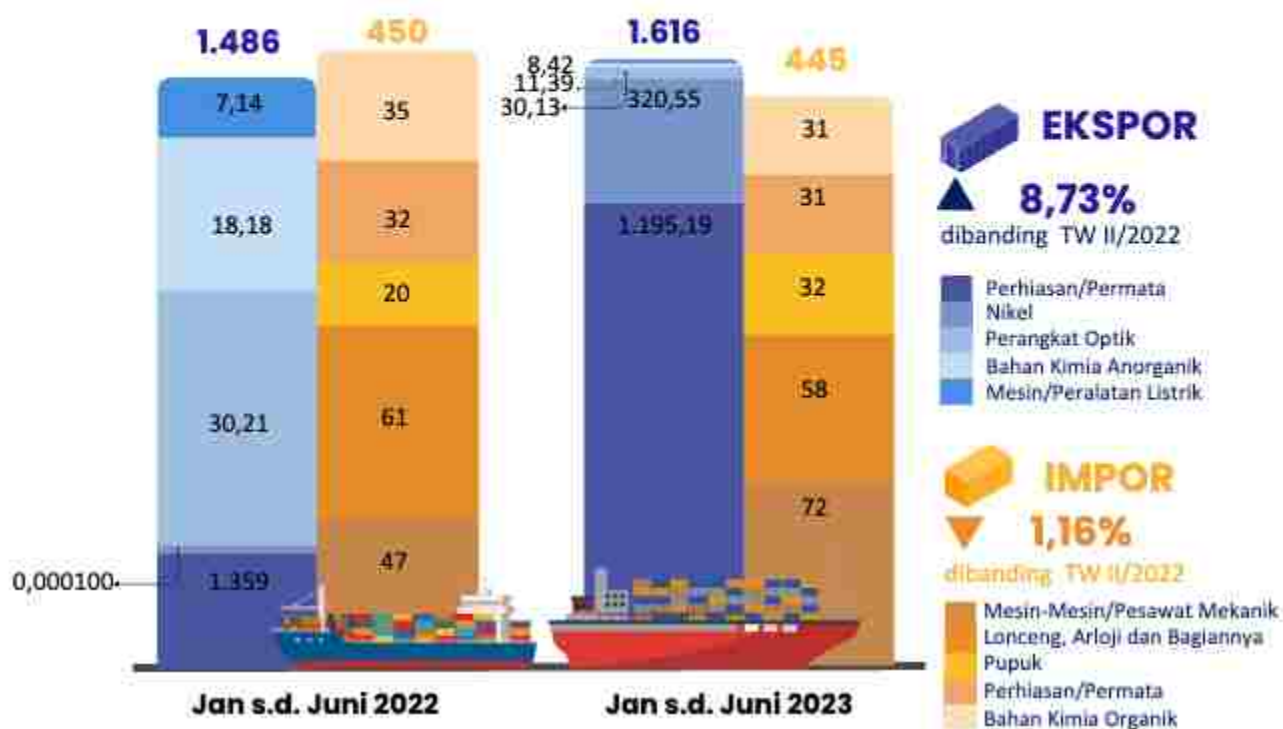
PERKEMBANGAN EKSPOR

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke negara EFTA Januari–Juni 2023 mencapai 1,61 miliar dolar AS atau naik 8,37 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Nilai 1,61 miliar dolar AS tersebut merupakan ekspor nonmigas seluruhnya.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada nikel sebesar 116,95 juta (100 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada benda-benda dari besi dan baja sebesar 0,5 juta (219,35 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke EFTA untuk hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 naik 9,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara itu ekspor hasil pertambangan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami turun masing-masing 71,55 persen dan 49,57 persen.
- Ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2023 ke negara-negara EFTA terbesar adalah ke Swis yaitu 1,25 miliar dolar AS, disusul Norwegia 348,12 juta dolar AS, Islandia 12,5 juta dolar AS dan Liechtenstein 138,19 ribu dolar AS, dengan kontribusi seluruh negara EFTA terhadap ekspor nonmigas nasional mencapai 1,34 persen.

PERKEMBANGAN IMPOR

- Nilai impor Indonesia dari EFTA pada Juni 2023 mencapai 63 juta dolar AS, turun 24,23 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 10,79 persen dibandingkan Juni 2022. Nilai tersebut merupakan impor nonmigas seluruhnya
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah perangkat optik senilai 5,48 juta dolar AS (55,06 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah sari bahan samak dan celup senilai 3 juta dolar AS (79,75 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal senilai 14,98 juta dolar AS (33,2 persen). Sementara impor bahan baku/penolong dan konsumsi meningkat masing-masing 20,66 juta dolar AS (8,19 persen) dan 12,08 juta dolar AS (12,15 persen).
- Negara EFTA pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Juni 2023 adalah Swis senilai 330,7 juta dolar AS (74,41 persen), kemudian Norwegia senilai 107,57 juta dolar AS (24,21 persen) dan disusul oleh Islandia dan Liechtenstein masing-masing senilai 5,1 juta dolar AS (1,15 persen) dan 1,03 juta dolar AS (0,23 persen).
- Neraca perdagangan Indonesia dengan EFTA pada bulan Juni 2023 mengalami defisit 55,11 juta dolar AS terutama berasal dari sektor nonmigas 55,06 juta dolar AS, ditambah defisit sektor migas senilai 0,05 miliar dolar AS.

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA EFTA TRIWULAN II TAHUN 2023



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUNI 2023



(Juta dolar AS)
Sumber: BPS

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN EFTA, JUNI 2022 - JUNI 2023



(Juta dolar AS)
*Angka sementara
Sumber: BPS

EKSPOR NON MIQAS JAN-JUN 2023

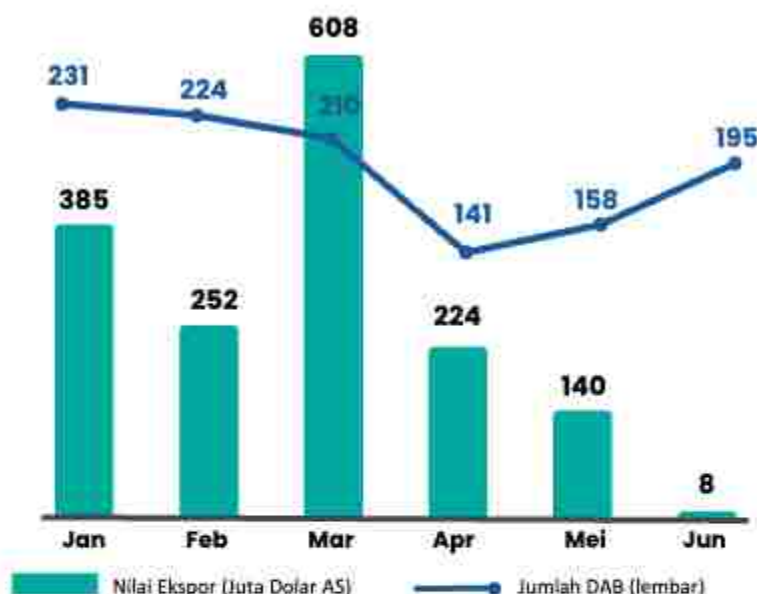
SWISS	1255
NORWEGIA	3481
ISLANDIA	12
LIECHTENSTEIN	0,1

IMPOR NON MIQAS JAN-JUN 2023

SWISS	331
NORWEGIA	108
ISLANDIA	5
LIECHTENSTEIN	1

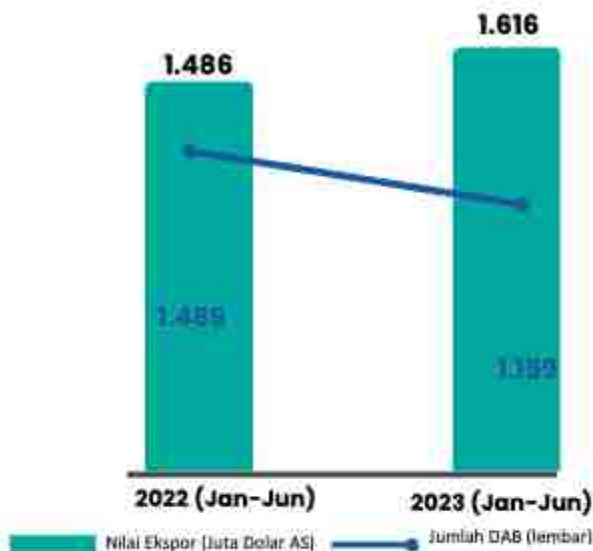
UTILISASI SKA

Pemanfaatan form IE-CEPA menunjukkan progres yang baik sejak diimplementasikan pada bulan November 2021. Jumlah pemanfaatan DAB form IE ke negara-negara EFTA pada tahun 2021 sebanyak 449 lembar dan pada tahun 2022 sebesar 2.983 lembar. Pemanfaatan form IE CEPA pada bulan Januari - Juni 2023 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan mengalami peningkatan pada bulan Maret, namun turun lagi pada bulan April sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 9. Utilisasi Dokumen Asal Barang Form IE-CEPA bulan Januari-Juni 2023



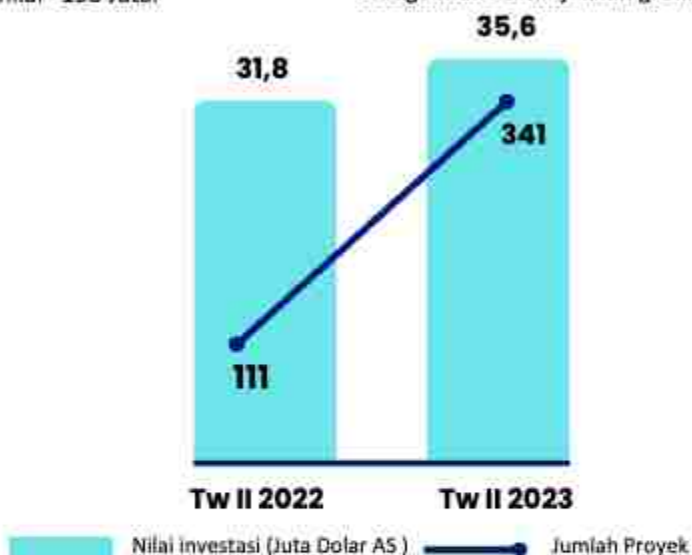
Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 10. Utilisasi DAB IE-CEPA Januari-Juni 2022 dan Januari-Juni 2023

INVESTASI

Perkembangan investasi dari EFTA mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 342 proyek dengan nilai 138 Juta.

Sementara itu pada triwulan II 2023 terdapat 341 proyek dengan nilai 35,6 juta. Nilai ini meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2022 terdapat 111 proyek dengan nilai 31,8 juta sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 11. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Negara-Negara EFTA ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023

REALISASI INVESTASI EFTA TRIWULAN II 2023



Realisasi investasi Australia
pada kuartal II 2023

35,60 Juta

meningkat 11,79% (YoY)



Jumlah proyek pada
kuartal II 2023

341 Proyek

meningkat >100% (YoY)

LIMA SEKTOR TERBESAR INVESTASI EFTA KE INDONESIA

Industri Kimia dan Farmasi

14,85 Juta

meningkat >100% (YoY)



21 Proyek

meningkat >100% (YoY)

Industri Makanan

8,60 Juta

meningkat >100% (YoY)



50 Proyek

meningkat >100% (YoY)

Jasa Lainnya

5,2 Juta

meningkat >100% (YoY)



103 Proyek

meningkat >100% (YoY)

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

3,5 Juta

meningkat >100% (YoY)



11 Proyek

meningkat >100% (YoY)

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

1,6 Juta

meningkat >100% (YoY)



46 Proyek

meningkat >100% (YoY)

Sumber: BKPM (2023)



INDONESIA-MOZAMBIK PTA

Mozambik memberikan preferensi tarif sebanyak 217 pos tarif kepada Indonesia. Produk-produk unggulan Indonesia yang mendapatkan tarif preferensi antara lain adalah minyak sawit, karet, kertas, furniture, produk perikanan, dan makanan dan minuman olahan. Di sisi lain, Indonesia memberikan komitmen sebanyak 242 pos tarif kepada Mozambik, antara lain kapas, kacang-kacangan, biji bunga matahari, bijih aluminium, kopi, produk perikanan, sayur dan buah-buahan. Produk produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah di Indonesia, termasuk untuk ekspor.

IM-PTA diharapkan dapat mendorong minat pengusaha untuk lebih memanfaatkan potensi pasar non-tradisional khususnya di kawasan Afrika. Selain itu, Mozambik yang telah memiliki deep sea port dan Free Trade Zone (FTZ) diharapkan dapat menjadi hub masuknya produk-produk Indonesia ke kawasan Afrika bagian timur dan selatan. Untuk investasi, IM-PTA diharapkan dapat mendorong pelaku usaha Indonesia untuk go global melalui outward investment dan meningkatkan level of competitiveness.

PERDAGANGAN

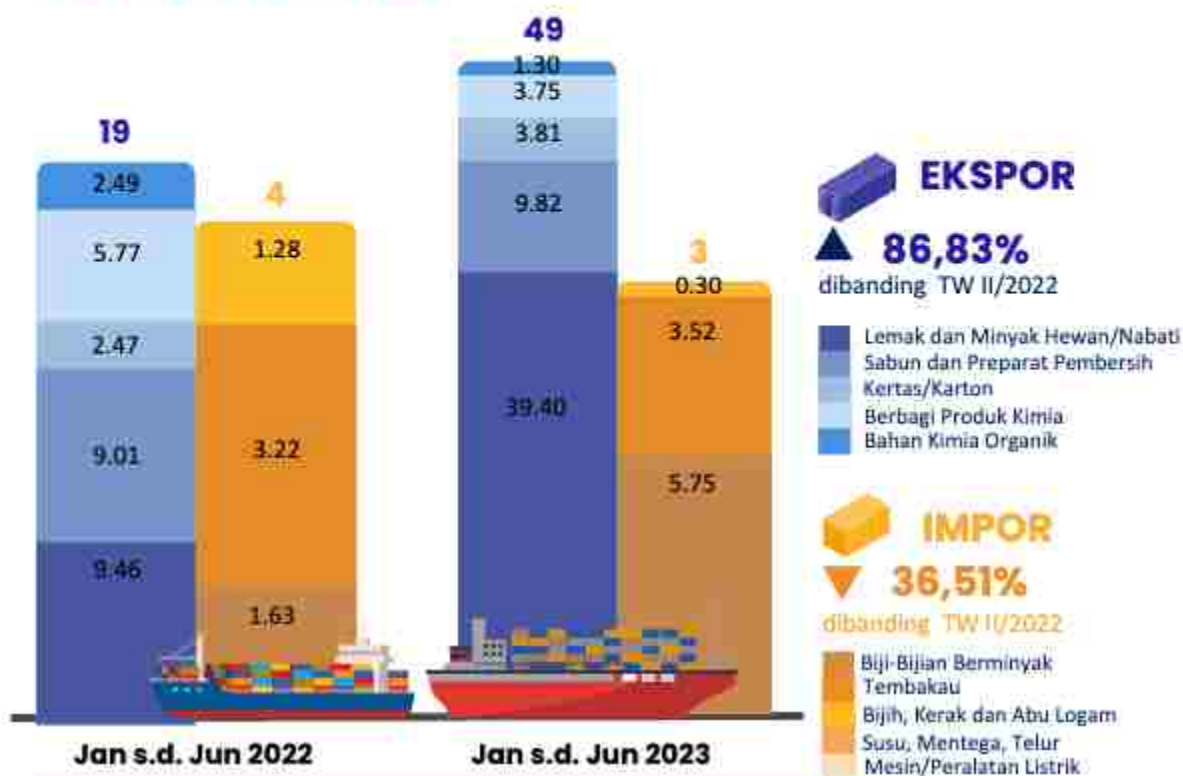
PERKEMBANGAN EKSPOR

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke Mozambik Januari–Juni 2023 mencapai 61,93 juta dolar AS atau naik 86,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas ke Mozambik mencapai 61,86 juta dolar AS atau naik 87,18 persen.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada sabun dan preparat pembersih sebesar 1,37 juta dolar AS (50,12 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 4,89 juta dolar AS (89,21 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke Mozambik untuk hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 naik senilai 28,8 juta dolar AS atau sebesar 87,18 persen dibanding periode yang sama tahun 2022.
- Ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2023 ke Mozambik sebesar 61,86 juta dolar AS dan memiliki kontribusi sebesar 0,05 persen terhadap total ekspor nasional ke seluruh negara di dunia.

PERKEMBANGAN IMPOR

- Nilai impor Indonesia dari Mozambik pada Juni 2023 mencapai 6,51 juta dolar AS, naik 2.386 persen dibandingkan Mei 2023 atau naik 126,38 persen dibandingkan Juni 2022. Nilai impor tersebut merupakan impor nonmigas seluruhnya.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah biji-bijian senilai 450 ribu dolar AS (100 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah susu, mentega, telur senilai 451 ribu dolar AS (172 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang konsumsi senilai 42,6 ribu dolar AS dan bahan baku/penolong senilai 2,61 juta dolar AS (37,47 persen). Sementara barang modal turun senilai 80,38 ribu dolar AS (100 persen).
- Mozambik menempati urutan ke 91 sebagai pemasok barang impor nonmigas senilai 9,61 juta dolar AS (0,01 persen).
- Neraca perdagangan Indonesia dengan Mozambik pada bulan Juni 2023 surplus 6,46 juta dolar AS yang semuanya berasal dari sektor nonmigas.

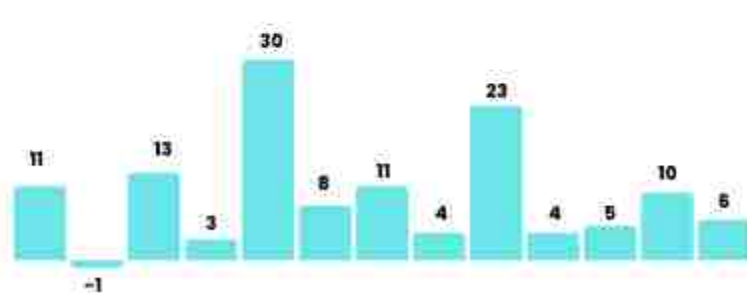
PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN MOZAMBIK TRIWULAN II TAHUN 2023



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUNI 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN MOZAMBIK, JUNI 2022 - JUNI 2023



EKSPOR NON MIGAS
JAN-JUN 2023

IMPOR NON MIGAS
JAN-JUN 2023

62

10

Mozambik menempati urutan ke-84 negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia

Mozambik menempati urutan ke-91 negara pemasok barang nonmigas Indonesia

Jun'22 Jul Agt Sep Okt Nop Des Jan'23 Feb Mar Apr Mei Juni

(Juta Dolar AS)

Sumber: BPS

UTILISASI SKA

IM-PTA telah disahkan melalui Perpres No. 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik. Indonesia secara resmi mengimplementasikan IM-PTA pada bulan Juni 2022.

Pada tahun 2022 nilai FOB menggunakan SKA Form IM ke Mozambik sebesar 6,9 ribu dengan jumlah SKA 1 lembar. Sementara itu nilai ekspor total ke Mozambik sebesar 135,82 juta dolar AS sehingga rasio ekspor pemanfaatan form IM terhadap ekspor ke negara Mozambik sebesar 0,01%.

Nilai ini diharapkan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan pemenuhan ketentuan asal barang dan Surat Keterangan Asal (SKA). Hal ini akan dapat mendorong dan memaksimalkan peluang akses pasar ke Mozambik.





INDONESIA-AUSTRALIA CEPA

Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian bilateral Indonesia-Australia: CEPA tanggal 4 Maret 2019. IA-CEPA mulai diimplementasi pada tanggal 5 Juli 2020. Selain perjanjian bilateral, kedua negara juga telah menyepakati perjanjian regional dalam skema Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tanggal 15 November 2020. Sebelumnya Indonesia telah memiliki perjanjian regional AANZFTA yang telah disepakati pada tahun 2014 bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Dalam IA-CEPA, Australia mengeliminasi 6.474 post tarif (100% dari total pos tarif) sehingga seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0%, sedangkan Indonesia mengeliminasi 10.229 pos tarif (94,5% total pos tarif).

IA-CEPA merupakan sebuah perjanjian yang mengedepankan aspek kerja sama kooperatif antara Indonesia dan Australia. IA-CEPA bukan Free Trade Agreement (FTA) biasa, melainkan sebuah kemitraan komprehensif yang tidak hanya berisi perjanjian perdagangan barang, jasa dan investasi, tetapi juga kerja-sama ekonomi yang lebih luas (Vocational Education Training (VET), Higher Education, Health Sector). Kemitraan Indonesia-Australia diarahkan membentuk "economic powerhouse" di kawasan, dengan menyatukan kekuatan kedua negara. Kemitraan ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang.

PERDAGANGAN

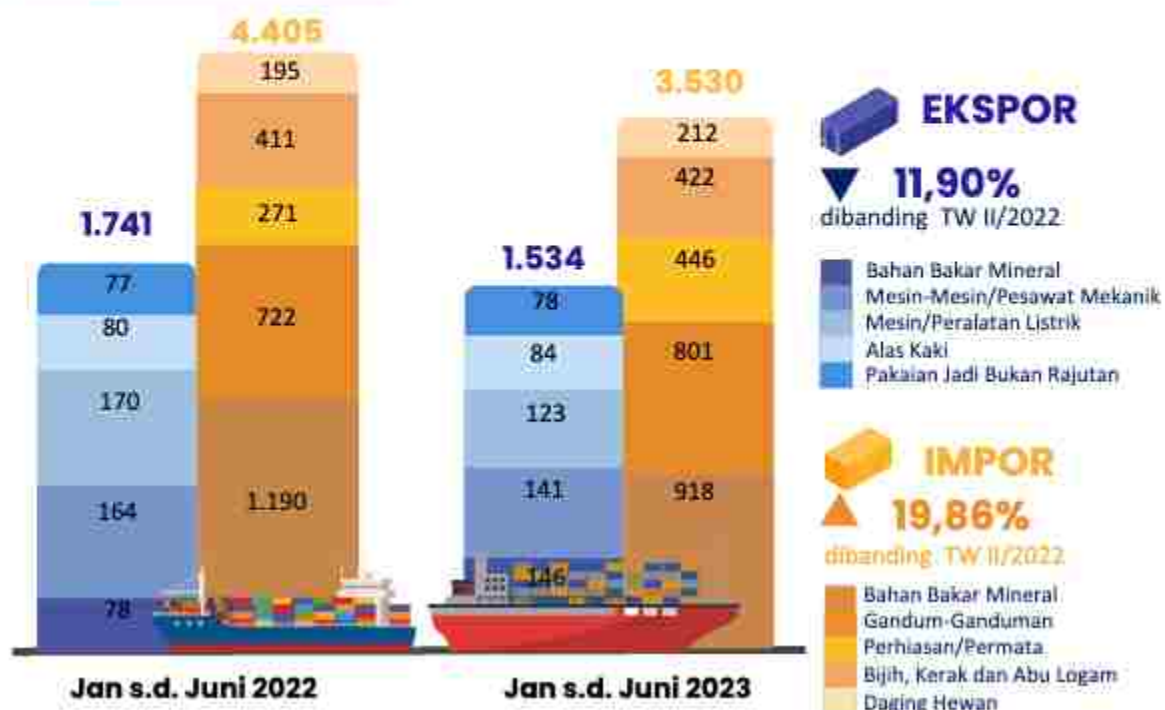
PERKEMBANGAN EKSPOR

- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke Australia Januari–Juni 2023 mencapai 1,53 miliar dolar AS atau turun 11,90 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas ke Australia mencapai 1,16 miliar dolar AS atau turun 30,42 persen.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada pupuk senilai 28,89 juta dolar AS (89,03 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada mesin-mesin/pesawat mekanik sebesar 12,29 juta dolar AS (62,78 persen).
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke Australia untuk hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 turun 15,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Demikian juga untuk pertanian turun masing-masing 2,92 persen. Sementara itu untuk pertambangan naik senilai 2,35 juta dolar AS (667 persen).
- Ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2023 ke Australia menempati urutan ke-16 terbesar yaitu sebesar 1,40 miliar dolar AS dan memiliki kontribusi sebesar 1,16 persen terhadap total ekspor nasional ke seluruh negara di dunia.

PERKEMBANGAN IMPOR

- Nilai impor Indonesia dari Australia pada Juni 2023 mencapai 777 juta dolar AS, turun 11,02 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 20,41 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor migas Juni 2023 senilai 0,12 juta dolar AS, turun 99,51 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 99,93 persen dibandingkan Juni 2022.
- Impor nonmigas Juni 2023 senilai 777 juta dolar AS, turun 8,27 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 3,20 persen dibandingkan Juni 2022.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah perhiasan/permata senilai 58,73 juta dolar AS (53,88 persen). Sedangkan peningkatan terbesar adalah gula dan kembang gula senilai 76,62 juta dolar AS.
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan bahan baku/penolong senilai 73,83 juta dolar AS (2,03 persen). Sementara impor barang modal dan barang konsumsi turun masing-masing 10,91 juta dolar AS (13,47 persen) dan 5,51 juta dolar AS (1,37 persen).
- Australia menempati urutan ke-6 sebagai pemasok barang impor nonmigas selama periode Januari–Mei 2023 senilai 3,40 miliar dolar AS (4,41 persen).
- Neraca perdagangan Indonesia dengan Australia pada bulan Mei 2023 defisit 595,54 juta dolar AS terutama berasal dari sektor nonmigas 575,59 juta dolar AS, ditambah dengan defisit migas sebesar 19,95 ribu.

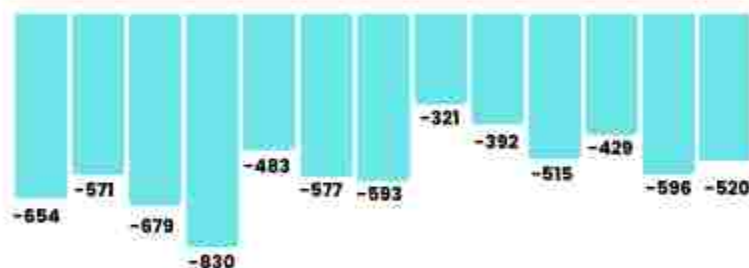
PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN AUSTRALIA TRIWULAN II TAHUN 2023



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUNI 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA, JUNI 2022- JUNI 2023



EKSPOR NON MIGAS
JAN-JUN 2023

IMPOR NON MIGAS
JAN-JUN 2023

1.404



4.180

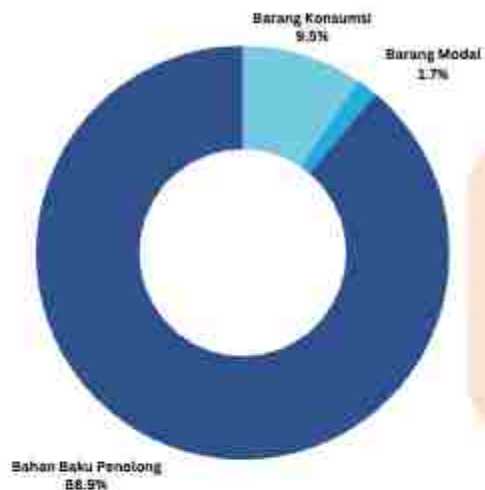
Australia menempati urutan ke-18 negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia

Australia menempati urutan ke-8 negara pemasok barang nonmigas Indonesia

Jun'22 Jul Agt Sep Okt Nop Des Jan'23 Feb Mar Apr Mei Juni

(Juta Dolar AS)

Sumber: BPS



Data impor nonmigas periode Januari-Juni 2023 menunjukkan bahwa komposisi impor dari Australia didominasi oleh bahan baku penolong. Hal tersebut artinya IA-CEPA berhasil memfasilitasi industri Indonesia untuk mencukupi kebutuhan bahan baku penolongnya dan dapat lebih berdaya saing di pasar global.

Sumber: PDSI (2023)

Gambar 12. Komposisi Impor Januari-Juni 2023 Berdasarkan Penggolongan Barang

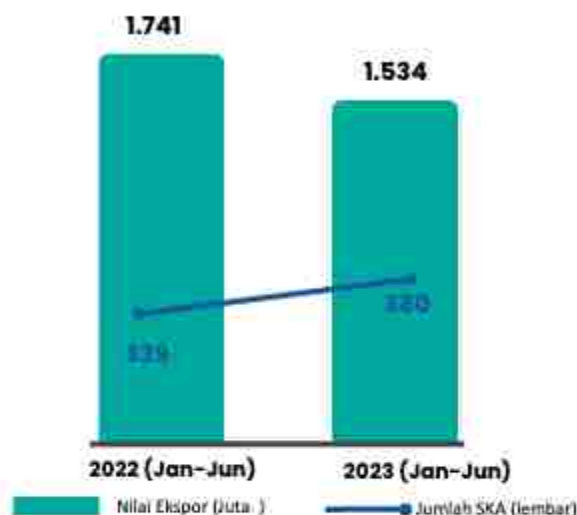
UTILISASI SKA

Pemanfaatan SKA form IA-CEPA menunjukkan pergerakan yang fluktuatif pada tahun 2023 (Januari-Mei). Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya pemanfaatan SKA IA CEPA mengalami peningkatan di mana pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 260 lembar dan pada tahun 2023 sebanyak 334 lembar. Data pemanfaatan SKA IA-CEPA tahun 2023 bula Januari s.d Juni 2023 dan data perbandingan periode yang sama dengan tahun sebelumnya ditunjukkan grafik berikut.



Sumber: PDSI (2023)

Gambar 13. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Januari-Juni 2023



Sumber: PDSI (2023)

Gambar 14. Utilisasi SKA Form IA-CEPA Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

INVESTASI

Perkembangan investasi dari Australia berfluktuasi selama tiga tahun terakhir. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 982 proyek dengan nilai 524,4 juta dolar AS.

Sementara itu pada triwulan II 2023 terdapat 951 proyek dengan nilai 94,4 juta dolar AS. Nilai ini menurun dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2022 terdapat 242 proyek dengan nilai 111,9 juta dolar AS sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 15. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Australia ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023

REALISASI INVESTASI AUSTRALIA TRIWULAN II 2023



LIMA SEKTOR TERBESAR INVESTASI AUSTRALIA KE INDONESIA

Pertambangan

65,42 Juta
turun 26 % (YoY)



39 Proyek
meningkat 95 % (YoY)

Jasa Lainnya

8,11 Juta
turun 10 % (YoY)



296 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Perdagangan dan Reparasi

6,31 Juta
meningkat >100 % (YoY)



141 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Hotel dan Restoran

5,08 Juta
turun 11 % (YoY)



181 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

4,28 Juta
meningkat >100 % (YoY)



157 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Sumber: BKPM (2023), dalam dolar AS



INDONESIA-CHILE CEPA

Indonesia dan Chili telah menandatangani perjanjian bilateral Indonesia-Chile CEPA tanggal 14 Desember 2017. Indonesia mengimplementasi perjanjian IC-CEPA pada tanggal 10 Agustus 2019. Untuk sektor jasa, Indonesia dan Chili telah melakukan penandatanganan perjanjian pada tanggal 21 November 2022.

Chili menghapus tarif terhadap 7.669 produk (89,6% dari total pos tarif). Produk-produk Indonesia yang mendapat tarif 0% di pasar Chili antara lain produk pertanian, produk perikanan, dan produk manufaktur.

PERDAGANGAN

PERKEMBANGAN EKSPOR

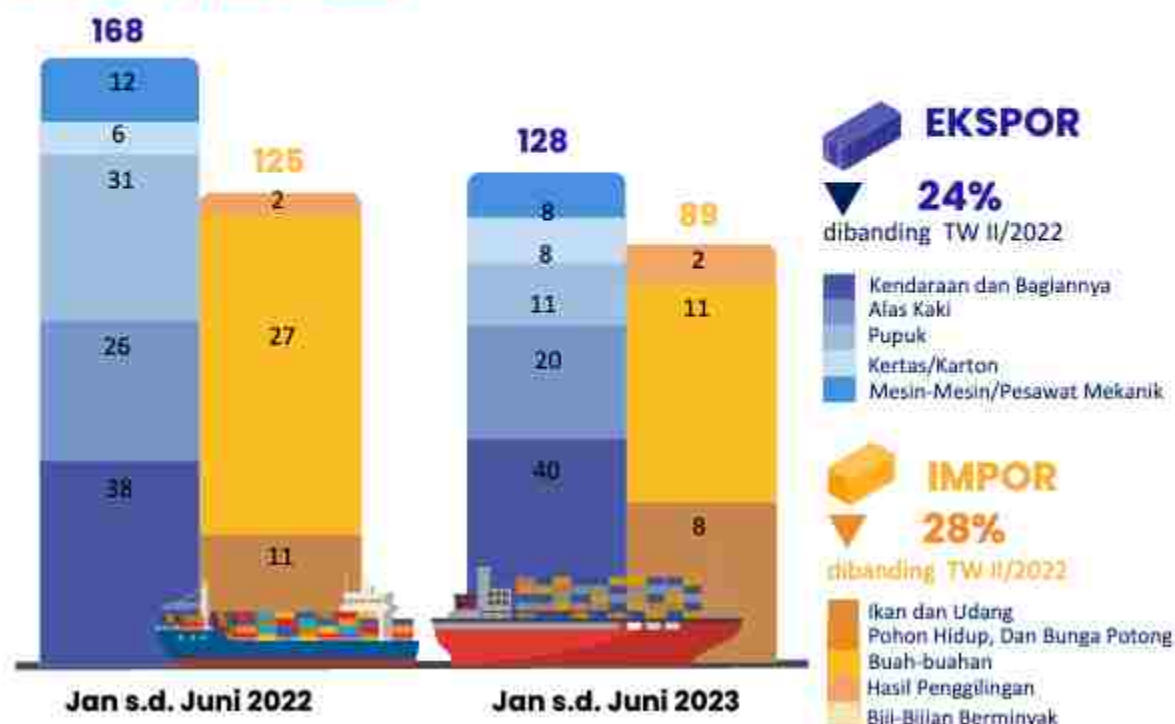
- Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia ke Chili Januari–Juni 2023 mencapai 127,67 juta dolar AS atau turun 24 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Nilai 127,67 tersebut merupakan ekspor nonmigas seluruhnya.
- Penurunan terbesar ekspor nonmigas Juni 2023 terhadap Mei 2023 terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar 2,91 juta dolar AS (29,15 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada karet dan barang dari karet 0,71 juta dolar AS.
- Menurut sektor, ekspor nonmigas ke Chili untuk hasil industri pengolahan Januari–Juni 2023 turun 25,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara itu untuk pertanian naik sebesar 2,02 juta dolar AS (170,97 persen)
- Ekspor nonmigas sampai dengan Juni 2023 ke Chili menempati urutan ke-52 sebesar 127,67 juta dolar AS dan memiliki kontribusi sebesar 0,11 persen terhadap total ekspor nasional ke seluruh negara di dunia.

PERKEMBANGAN IMPOR

- Nilai impor Indonesia dari Chili pada Juni 2023 mencapai 12,54 juta dolar AS, turun 28 persen dibandingkan Mei 2023 atau turun 52 persen dibandingkan Juni 2022. Nilai impor tersebut merupakan impor nonmigas seluruhnya.
- Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar Juni 2023 dibandingkan Mei 2023 adalah buah-buahan senilai 2,55 juta dolar AS (51,43 persen). Sedangkan peningkatan terbesar pada tembaga sebesar 1,68 juta dolar AS (38,8 persen).
- Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari–Juni 2023 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada golongan barang modal senilai 0,27 juta dolar AS (143,29 persen). Sementara impor bahan baku/penolong dan barang konsumsi turun masing-masing 17,46 juta dolar AS (20,22 persen) dan 18,28 juta dolar AS (47,4 persen).
- Chili menempati urutan ke-47 sebagai pemasok barang impor nonmigas senilai 89,60 juta dolar AS (0,10 persen) selama periode Januari–Juni 2023.
- Neraca perdagangan Indonesia dengan Chili pada bulan Juni 2023 surplus 7,22 juta dolar AS yang seluruhnya berasal dari surplus nonmigas.



PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA DENGAN CHILI TRIWULAN II TAHUN 2023



EKSPOR - IMPOR, JUNI 2022 - JUNI 2023



NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN CHILI, JUNI 2022 - JUNI 2023



EKSPOR NON MIGAAS
JAN-JUN 2023

IMPOR NON MIGAAS
JAN-JUN 2023

128



90

Chili menempati urutan ke-52 negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia

Chili menempati urutan ke-47 negara pemasok barang nonmigas Indonesia

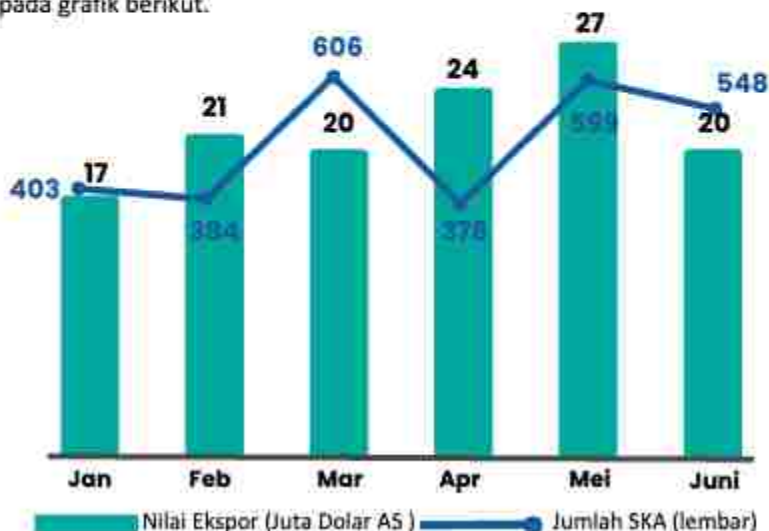
(Juta Dolar AS)

*Angka sementara

Sumber: BPS

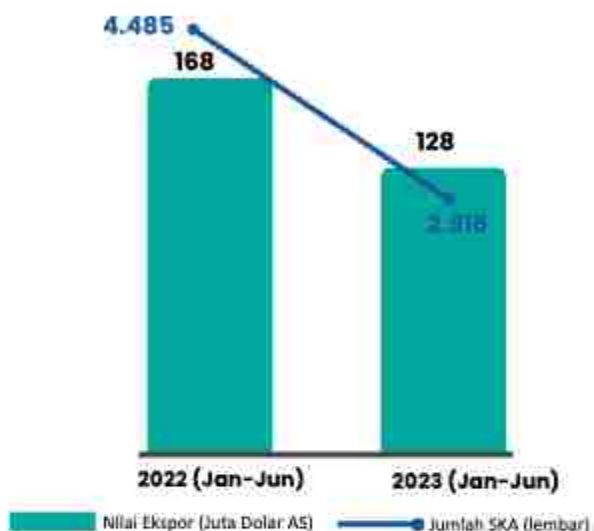
UTILISASI SKA

Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, pemanfaatan SKA form IC-CEPA menunjukkan pergerakan yang dinamis dan terjadi peningkatan tertinggi pada bulan Mei. Sementara itu pada triwulan II tahun 2023 pemanfaatan SKA tercatat 2.916 lembar. Jumlah ini menurun dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sejumlah 4.485 lembar SKA. Data pemanfaatan SKA IC-CEPA ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 16. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Januari-Juni 2023

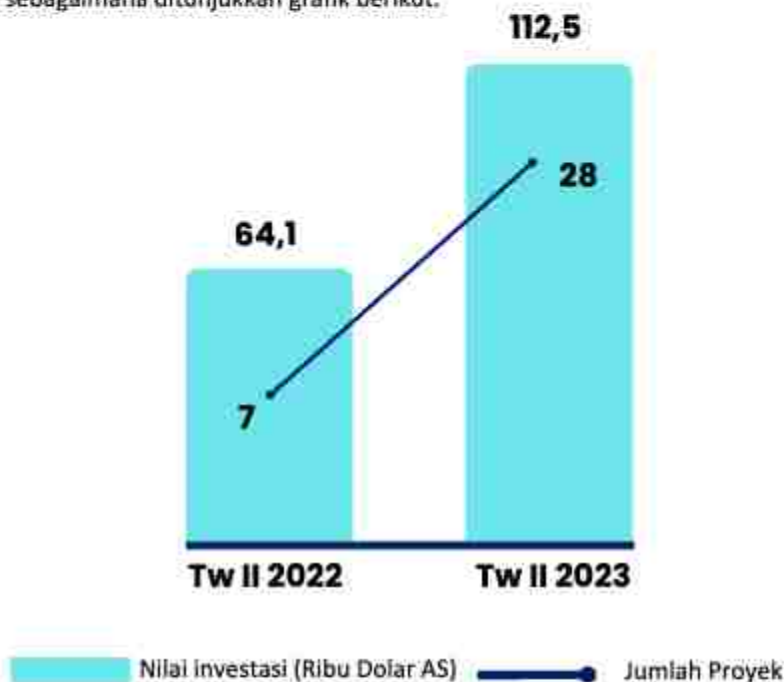


Sumber: PDSI, diolah (2023)

Gambar 17. Utilisasi SKA Form IC-CEPA Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

INVESTASI

Investasi dari Chili tergolong masih cukup rendah. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 masih terdapat 18 proyek dengan nilai 97,7 ribu dolar AS. Sementara itu pada triwulan II 2023 terdapat 28 proyek dengan nilai 112,5 ribu dolar AS. Nilai ini meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya di mana pada triwulan II 2022 terdapat 7 proyek dengan nilai 64,1 ribu dolar AS sebagaimana ditunjukkan grafik berikut.



Sumber: BKPM (2023)

Gambar 18. Nilai Investasi dan Jumlah Proyek Chili ke Indonesia Triwulan II 2022 dan 2023



REALISASI INVESTASI CHILI TRIWULAN II 2023



TIGA SEKTOR TERBESAR INVESTASI CHILI KE INDONESIA

Jasa Lainnya

0,10 Juta
meningkat >100 % (YoY)



15 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

8,8 Ribu
turun 83% (YoY)



1 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

1,6 Ribu
turun 50% (YoY)



4 Proyek
meningkat >100 % (YoY)

Sumber: BKPM (2023), dalam dolar AS

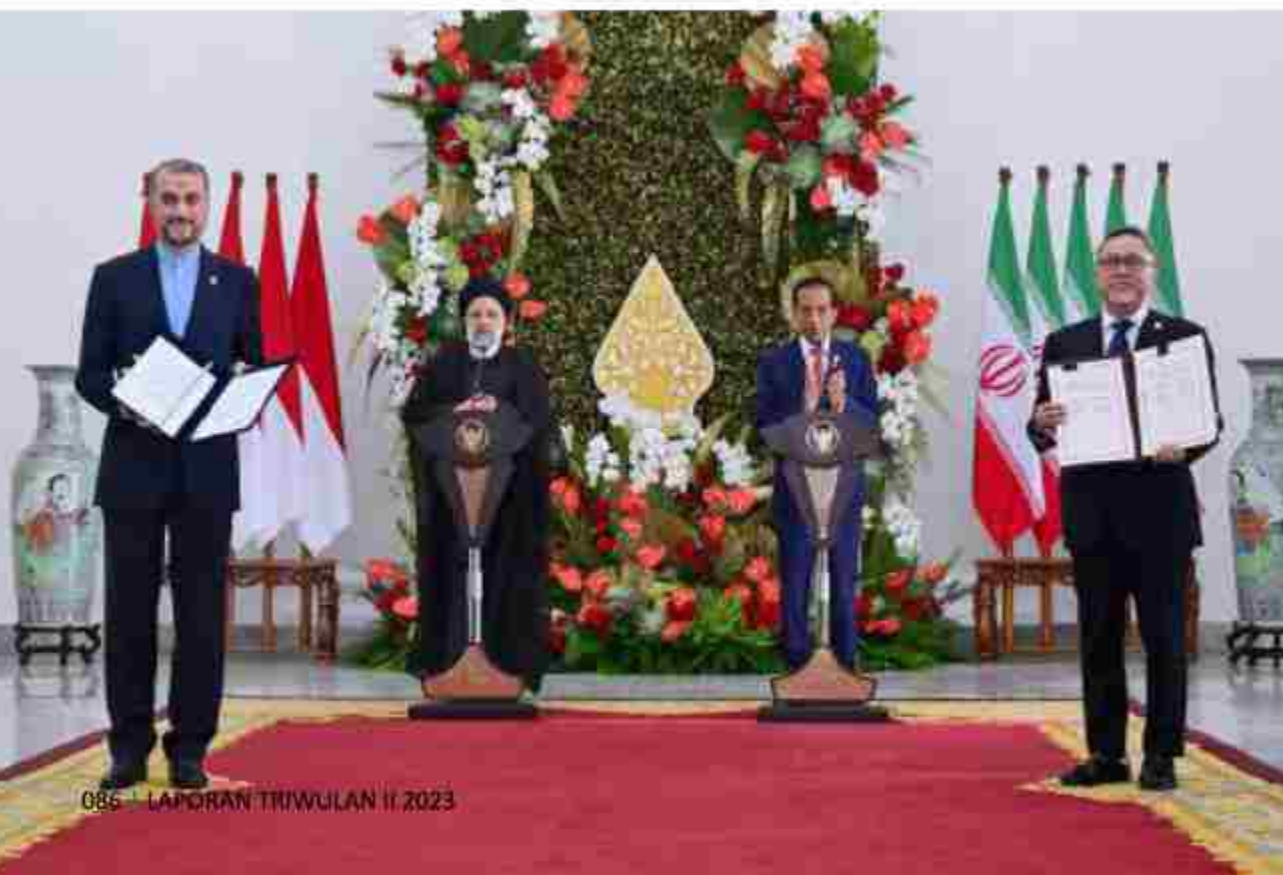
Pada tahun 2023, Indonesia berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-Bangladesh PTA; (2) Indonesia-Iran PTA; (3) Indonesia-EU CEPA; (4) Indonesia-Mauritius PTA; (5) Indonesia-Canada CEPA dan (6) Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA. Perundingan Indonesia-Iran PTA telah conclude dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 23 Mei 2023. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan triwulan II pada tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

PENANDATANGANAN INDONESIA-IRAN PTA

Perundingan Indonesia-Iran PTA telah selesai dirundingkan kedua negara dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan Indonesia-Iran PTA oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hossein Amirabdollahian, pada tanggal 23 Mei 2023 di Istana Presiden, Bogor. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Indonesia – Iran PTA merupakan infrastruktur penting dalam mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara. Indonesia – Iran PTA juga merupakan sarana yang dapat meningkatkan daya saing dan mampu

menembus tidak hanya pasar Iran, namun juga negara-negara di kawasan Asia Barat dan Timur Tengah pada umumnya.

Merujuk pada hasil analisis Kementerian Perdagangan, melalui Indonesia-Iran PTA, peningkatan ekspor Indonesia ke Iran diperkirakan mencapai 3,11% atau sebesar 3,87 juta dolar AS dibandingkan tahun 2022. Sedangkan, ekspor Iran ke Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 255,9 ribu atau tumbuh sebesar 1,54% dibandingkan tahun 2022.



Melalui kesepakatan Indonesia-Iran PTA, Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi atas 239 pos tarif (PT), diantaranya adalah:



Sementara Iran akan mendapatkan tarif preferensi atas 227 PT, diantaranya adalah:





PENANDATANGANAN INDONESIA-MALAYSIA BORDER TRADE AGREEMENT (BTA)

Perjanjian perdagangan perbatasan Indonesia-Malaysia BTA telah ditandatangani Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Perindustrian Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, pada tanggal 8 Juni 2023 di Putrajaya, Malaysia. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. BTA merupakan perjanjian yang mengatur perdagangan masyarakat tradisional di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perundingan Review BTA dilakukan sejak tahun 2009. Tujuan Review BTA adalah untuk memperbaharui BTA yang ditandatangani tahun 1970. Setelah melewati 8 kali putaran perundingan, kedua negara akhirnya menyepakati secara substansi naskah BTA pada 21 Maret 2022. Putaran ke-9 yang dilaksanakan secara virtual tanggal 21 Juli 2022 digunakan untuk melakukan legal scrubbing.

Ruang lingkup BTA diantaranya:

- Daftar barang kebutuhan sehari-hari yang diperdagangkan menjadi lebih spesifik dibandingkan BTA 1970 (60 barang Indonesia; 32 barang Malaysia).
- Batas maksimal nilai perdagangan perbatasan yaitu sebesar 600 Ringgit Malaysia per pemegang kartu identitas lintas batas per bulan.
- Penyesuaian Entry/Exit Points wilayah perdagangan perbatasan merujuk pada Border Crossing Agreement terbaru.
- Ketentuan mekanisme review melalui komite BTA dan penyelesaian sengketa serta penangguhan yang sebelumnya tidak diatur di BTA 1970.

Saat ini, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan dokumen untuk proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Malaysia BTA agar dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan pada awal tahun 2024.

4

Perkembangan Perundingan

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan.



KEKETUAAN ASEAN INDONESIA 2023

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Kamboja pada 13 November 2022, Indonesia mendapatkan mandat untuk memegang Chairmanship ASEAN 2023. Tema dari ASEAN 2023 adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth." Tema tersebut terdiri dari dua elemen besar yaitu ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Dengan kedua elemen yang ada pada ASEAN 2023 menjadi langkah dalam memperkuat Asia Tenggara dalam pertumbuhan ekonomi kawasan dan kemakmuran rakyat ASEAN.

Indonesia telah menetapkan sejumlah agenda prioritas ekonomi untuk memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan yang diterjemahkan melalui priority economic deliverables (PED) dalam 3 pilar yaitu Recovery and Rebuilding; Digital Economy; dan Sustainability. Terdapat 16 PED dalam periode Chairman atau Keketuaan ASEAN 2023, di mana tujuh dari PED tersebut di bawah AEM.

Indonesia's Priority Economic Deliverables (PEDs) in 2023

Strategic Thrust 1: Recovery and Rebuilding

- ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF)
- Fostering Recovery and Ensuring Economic Financial Stability and Resilience
- ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security
- Signing of the 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA
- Establishment of the RCEP Support Unit in ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia
- ASEAN Industrial Project-Based Initiatives

Strategic Thrust 2: Digital Economy

- Full Implementation of e-Form D through the ASEAN Single Window
- Advancing Payment Connectivity and Promoting Digital Financial Literacy and Inclusion to Support Inclusive Economic Growth
- Leader's statement to develop the ASEAN Digital Economy Framework (DEFA)
- Regulatory Pilot Space (RPS) to Facilitate Cross-Border Digital Data Flows to Enabling Self-Driving Car in ASEAN
- ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery)

Strategic Thrust 3: Sustainability

- Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementations
- Development of the Electric Vehicle Ecosystem
- Development of ASEAN Blue Economy Framework
- Framework for Transition Finance to Support Sustainable Finance and Green Economy
- Declaration on Sustainable Energy Security through Interconnectivity and Market Integration

Sampai dengan triwulan II perkembangan PED di bawah kewenangan SEOM dan Menteri Ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

- Penandatanganan Protokol Perubahan ke-2 Persetujuan Pendirian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Disepakati agar prosedur domestik harus segera diselesaikan agar Protokol dapat ditandatangani pada saat Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55 bulan Agustus 2023 atau KTT ASEAN ke-43 bulan September 2023. Direncanakan penandatanganan akan diwakili oleh Indonesia, Brunei Darussalam, Australia dan Selandia Baru, sementara Negara Anggota ASEAN lainnya akan menandatangani secara ad-referendum.
- Pembentukan Unit Pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Disepakati proporsi kontribusi pendanaan 60% untuk Negara Mitra dan 40% untuk Negara ASEAN. Diharapkan isu ini dapat diselesaikan secepatnya sebelum SEOM 3/54. Kerangka Acuan dari RCEP Support Unit (RSU) yang bersifat independen masih difinalisasi oleh Sekretariat ASEAN (ASEC) dan akan disampaikan sebelum Pertemuan RCEP selanjutnya di bulan Juli 2023.
- Pembangunan Industri ASEAN Berbasis Proyek (ASEAN Industrial Project-Based Initiatives/AIPBI). Boston Consulting Group (BCG) sebagai konsultan yang ditunjuk, telah mengidentifikasi beberapa sektor potensial yang dapat dijadikan proyek industri bersama di ASEAN, a.l: renewable energy, logistic warehousing, infrastructure for digital economy, dan industri vaksin. Saat ini, ASEC juga sudah menyusun draf awal dari Kerangka Kerja untuk AIPBI yang akan disahkan saat AEM.
- Kerangka Kerja Fasilitasi Jasa di ASEAN (ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF)). Badan sektoral di bidang Jasa diminta dapat mempercepat pembahasan ASFF untuk mengidentifikasi elemen-elemen lainnya yang bernilai tambah untuk dimasukkan ke dalam ASFF.
- Persetujuan Kerangka Kerja Ekonomi Digital (ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA)). Indonesia menyampaikan urgensi perlu dilaksanakannya putaran pertama negosiasi ASEAN DEFA akhir tahun setelah dilakukan peluncuran negosiasinya di bulan September 2023. ASEAN Coordinating Committee on E-Commerce and Digital Economy (ACCED) dimandatkan untuk menyusun Kerangka Acuan untuk Komite Perunding DEFA.

INDONESIA-BANGLADESH PTA

Perundingan IB-PTA dimulai sejak tahun 2019 dan telah berlangsung sebanyak 4 (empat) putaran. Putaran ke-4 TNC IB-PTA telah berlangsung secara tatap muka pada tanggal 16-19 Mei 2023. Agenda pembahasan utama TNC-4 IB-PTA adalah pembahasan akses pasar serta finalisasi draft text perjanjian dan Operational Certification Procedure (OCP). Perundingan IB-PTA selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 31 Juli - 2 Agustus 2023 untuk finalisasi seluruh teks perjanjian. Kedua pihak menargetkan penandatanganan IB-PTA pada akhir Agustus/awal September di Bangladesh.

Berdasarkan kajian manfaat yang telah dilakukan oleh Puska KPI BP3 Kemendag, prediksi ekspor Indonesia ke Bangladesh akan mengalami peningkatan rata-rata 3,6% per tahun selama 2023-2025. Pada tahun 2025 nilai ekspor Indonesia akan mencapai 3,6 miliar dolar AS, kemudian mengalami kenaikan secara periodik hingga 2030 dengan nilai ekspor mencapai 4,3 miliar dolar AS. Indonesia akan memperoleh manfaat dari sisi ekspor yang mencakup 17 sektor, yaitu tekstil, kertas, kimia, karet dan plastik, makanan olahan, produk kayu, manufaktur, besi, CPO, sayur dan buah, elektronik, kendaraan, kilang minyak, batu bara, mineral, mesin, dan perkebunan. Kenaikan impor akan terjadi pada produk tekstil, makanan olahan, besi, perkebunan, kimia dan farmasi, elektronik, sayuran dan buah, kendaraan, dan mesin.





INDONESIA-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi concern utama Presiden saat ini. Sesuai mandat Presiden, perundingan ini diharapkan dapat dilakukan dengan fleksibilitas dan orientasi solusi untuk mencapai target penyelesaian substansi pada akhir tahun 2023. Untuk itu Indonesia dan EU sepakat untuk melaksanakan 4 (empat) putaran perundingan di tahun 2023 dengan target kemajuan signifikan perundingan atau penyelesaian substansi. Putaran ke-13 telah dilaksanakan pada tanggal 6-11 Februari 2023 dan membahas 14 dari total 21 isu runding. Pada perundingan draft text terdapat kemajuan yaitu disepakatinya chapter Sanitary dan Phytosanitary dan Good Regulatory Practice.

Putaran ke-14 telah dilaksanakan pada tanggal 8-12 Mei 2023 di Brussels. Kedua pihak menyepakati Bab Pengamanan Perdagangan (Trade Remedies), Bab Usaha Kecil Dan Menengah (Small Medium Enterprises), dan Bab Transparansi. Pada Putaran tersebut, Indonesia dan EU sepakat untuk mempertukarkan initial offer Government Procurement pada bulan Juni 2023.

Sebagai tindak lanjut dari putaran ke-14 tersebut Ditjen PPI akan melakukan koordinasi untuk beberapa isu kebijakan yang membutuhkan mandat nasional, antara lain:

- kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia, khususnya terkait pengaturan BUMN, akses pasar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, dan investasi.
- cakupan dan pengaturan terkait BUMN.
- ketentuan larangan persyaratan performa (performance requirement) dalam pengaturan investasi.
- isu kelembagaan pada sistem penyelesaian sengketa investasi/Investment Court System (ICS).

Penandatanganan Indonesia-EU CEPA ditargetkan pada tahun 2024. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya mampu memberikan peningkatan akses pasar untuk barang-barang produksi Indonesia, tapi juga mendorong perdagangan jasa serta investasi yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia.



INDONESIA-CANADA CEPA

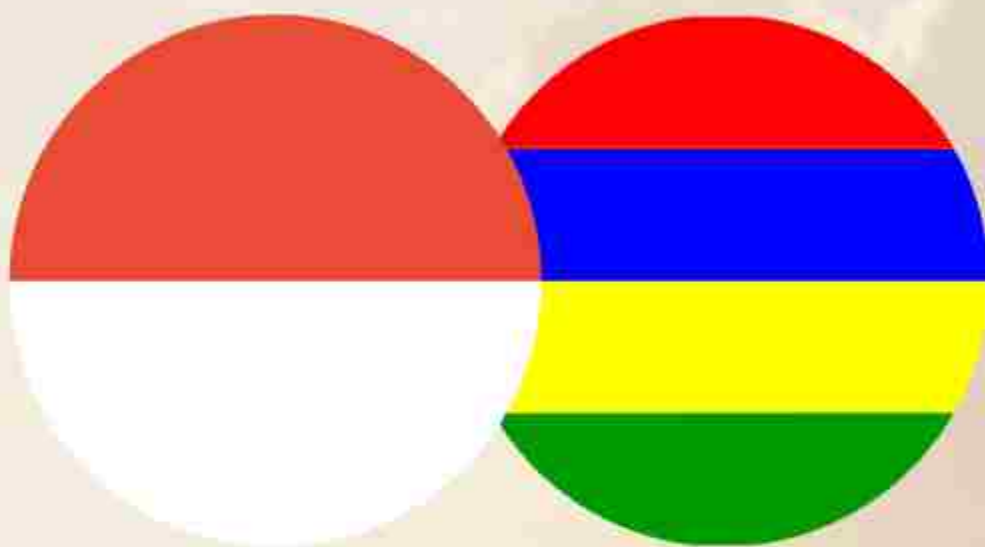
Perundingan Indonesia-Canada CEPA (ICA-CEPA) telah dilaksanakan sebanyak lima kali putaran. Putaran ke-5 telah dilakukan secara tatap muka pada tanggal 29 Mei-2 Juni 2023 di Ottawa, Kanada dan perundingan untuk Isu Runding Pengadaan Pemerintah, Perdagangan Inklusif, Lingkungan, dan Ketenagakerjaan dilaksanakan pada tanggal 6 – 12 Juni 2023 secara daring.

Perundingan Putaran Ke-5 berhasil menyepakati secara substansi teks Bab Transparansi dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab serta Bab Praktik Regulasi yang Baik. Kemajuan signifikan juga dicapai dalam pembahasan teks Ketentuan Asal Barang, Investasi dan Isu Hukum dan Kelembagaan. Terkait akses pasar perdagangan barang, kedua pihak setuju melakukan peningkatan penawaran komitmen tarif (*improved offer*) dan pertukaran permintaan tarif (*initial offer*) secara intersesi sebelum Putaran Keenam. Sementara untuk perdagangan jasa dan investasi, kedua pihak akan melakukan pertemuan intersesi bersama (*joint session*) untuk membahas mengenai struktur modalitas.

Sejumlah isu kebijakan yang membutuhkan perhatian dan mandat nasional, antara lain:

- pengaturan prinsip non-diskriminasi BUMN;
- mekanisme transparansi dan kerjasama untuk isu pertanian dan bioteknologi;
- eksplorasi disiplin nasional untuk pemenuhan standar perdagangan inklusif (gender, masyarakat adat, dan UKM), lingkungan dan ketenagakerjaan.

Penyelesaian perundingan secara substantif diharapkan rampung pada akhir tahun 2023. Perjanjian ICA-CEPA nantinya akan menjadi perundingan pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara.



INDONESIA-MAURITIUS PTA

Perundingan Indonesia-Mauritius PTA telah berjalan tiga putaran perundingan, putaran ke-3 dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember 2022. Kedua belah pihak telah menyelesaikan 90% pembahasan teks PTA dan 80% pembahasan teks ROO. Untuk akses pasar kedua pihak telah mempertukarkan *request/offer* sebanyak kurang lebih 300-400 pos tarif dengan menggunakan HS 8 digit dalam kode HS 2022.

Pada putaran ke-3 tersebut Mauritius mengusulkan untuk menggunakan mekanisme staging dan TRQ pada modalitas IMU-PTA. Indonesia dan Mauritius secara prinsip sepakat namun melihat terlebih dahulu usulan Mauritius. Mauritius telah menyampaikan proposal/non-paper atas modalitas staging dan TRQ serta penerapan Automatic Trigger Safeguard Mechanism (ATSM) pada tanggal 9 Februari 2023.

Pada tanggal 12 April 2023, Indonesia dan Mauritius melakukan pertemuan intersesi ke-3 untuk membahas artikel yang belum disepakati dalam main text, teks ROO dan usulan ATSM Mauritius. Indonesia menyampaikan penolakan untuk penerapan ATSM karena hal tersebut telah terdapat artikel terkait Bilateral dan Global Safeguard Mechanism. Terkait modalitas, telah dilakukan pertemuan tingkat teknis pada 29 Mei 2023 untuk membahas lebih detil usulan Mauritius terkait modalitas staging dan TRQ. Indonesia telah menyampaikan *counter-proposal* terkait modalitas staging pada 15 Juni 2023 dan saat ini menunggu tanggapan Mauritius sebelum kembali mempertukarkan *request/offer*. Perjanjian IMU-PTA ditargetkan dapat ditandatangani pada kuartal IV.



INDONESIA-MERCOSUR CEPA

Indonesia dan MERCOSUR telah menyelenggarakan Preliminary Meeting secara virtual di tahun 2022. Pada pertemuan *preliminary* tersebut, kedua pihak membahas usulan Indonesia terkait draft Terms of Reference (ToR) of Negotiations the Indonesia-MERCOSUR Comprehensive Economic Partnership Agreement yang disepakati akan menjadi living document untuk dibahas pada Perundingan putaran pertama. Indonesia mengusulkan agar perundingan pertama dapat dilakukan pada awal Maret 2023, namun MERCOSUR berhalangan karena sedang memprioritaskan Perundingan dengan Uni Eropa. Mengingat terdapat perbedaan pandangan dalam internal MERCOSUR yang menghambat perundingan Indonesia-MERCOSUR CEPA, Indonesia mempertimbangkan untuk melanjutkan pembicaraan perundingan pada saat Brasil menjabat presidensi MERCOSUR karena Brasil lebih terbuka dalam hal perjanjian perdagangan.

PROTOKOL PERUBAHAN INDONESIA-JAPAN EPA

Dalam rangka penyelesaian perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya antara lain:

- Menteri Perdagangan telah menyampaikan kepentingan Indonesia kepada Pemerintah Jepang (Menteri Luar Negeri/MOFA; Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri/METI; dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (MAFF) melalui surat tertanggal 13 Februari 2023.
- Technical Experts Meeting Fisheries Management pada 17 Maret 2023 di Tokyo (Indonesia: Kemendag dan KKP, Jepang: MoFA dan MAFF) untuk meyakinkan Jepang dalam pemberian akses pasar produk perikanan.
- Kunjungan ke Prefektur Kochi pada 26 Mei 2023. Pada kunjungan tersebut dilaksanakan pertemuan dengan Director General of Fisheries Promotion, Kochi Prefectural Government dan President and CEO Tosa Marine Base Co.Ltd untuk mengklarifikasi pernyataan Jepang terkait pengelolaan perikanan Indonesia yang dikaitkan dengan akses pasar.
- Pertemuan virtual dengan Director of Economic Partnership Division Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Jepang dilakukan pada 15 Juni 2023 untuk membahas percepatan penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA.
- Kedua negara telah menyepakati pelaksanaan JCM-18 IJEPA pada 6 Juli 2023 didahului dengan pertemuan Sub Komite. Protokol Perubahan IJEPA diharapkan dapat ditandatangani pada saat ASEAN Japan Commemorative Summit di Tokyo (Desember 2023).





INDONESIA-EAEU FTA

Setelah launching perundingan dilakukan di tahun 2022, kedua pihak melangsungkan putaran pertama perundingan Indonesia-EAEU FTA pada tanggal 3-5 April 2023 di Jakarta dengan pembahasan 10 dari total 11 isu runding.

Pada pembahasan teks, berhasil mencapai beberapa kemajuan diantara menyepakati 8 Pasal dari total 23 Pasal Intellectual Property Rights (IPR); 1 Pasal dan beberapa Paragraf dalam teks Trade in Goods, serta penambahan beberapa usulan Pasal baru oleh Indonesia, termasuk *placeholder* untuk isu imbal dagang; dan beberapa paragraf pada Pasal X.2 Objectives dan X.3 Scope Technical Barriers to Trade.

Sementara itu pada pembahasan akses pasar untuk perdagangan barang, kedua pihak menyepakati pertukaran initial offer dengan tingkat eliminasi (EIF dan *gradual*) hingga 80% dengan *staging* tidak lebih dari 15 tahun.

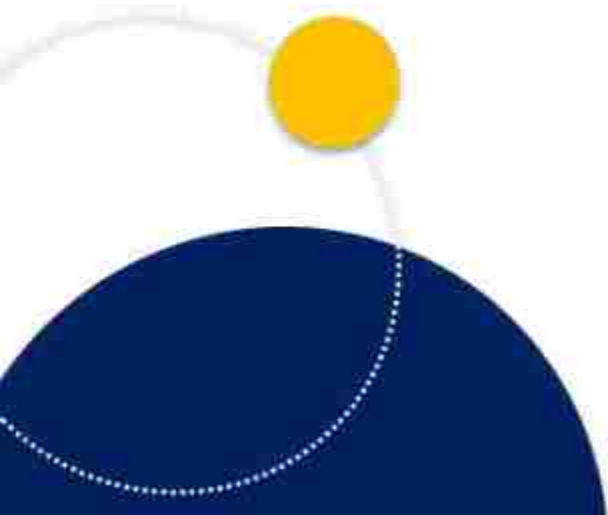
Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan Putaran ke-2 pada tanggal 24-26 Juli 2023 di Moscow Rusia.





INDONESIA-GCC EPA (LAUNCHING PERUNDINGAN)

Untuk segera memulai perundingan Indonesia-GCC EPA, Mendag RI dan Sekretaris Jenderal GCC telah melakukan pertemuan bilateral pada tanggal 23 Januari 2023 di Riyadh. Tindak lanjut dari hal tersebut Ditjen PPI telah menyampaikan konsep Term of References (ToR), Joint Statement dan usulan waktu pelaksanaan peluncuran perundingan IGCC-EPA kepada Sekretariat GCC. Saat ini Indonesia masih menunggu hasil meeting internal GCC member atas usulan tanggal pelaksanaan launching perundingan IGCC-EPA.



INDONESIA-PERU CEPA (LAUNCHING PERUNDINGAN)

Kedua pihak telah menyelesaikan pembahasan ToR dan telah menyepakati penggunaan pendekatan bertahap/*incremental*. Selanjutnya kedua pihak akan segera menyusun Joint Statement peluncuran perundingan perdagangan Indonesia-Peru CEPA pada level Menteri Perdagangan.



MOU PERDAGANGAN BERAS INDONESIA-INDIA



Pemerintah Indonesia dan India telah sepakat untuk melakukan kerja sama perdagangan beras. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan India untuk berpartisipasi dalam pengadaan beras konsumsi di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perdagangan kedua pihak. Pada tanggal 28 Maret 2023, Mendag bersama Kepala BAPANAS dan perwakilan Perum Bulog telah bertemu dengan Kuasa Usaha ad Interim (KUI) Kedubes India di Jakarta untuk

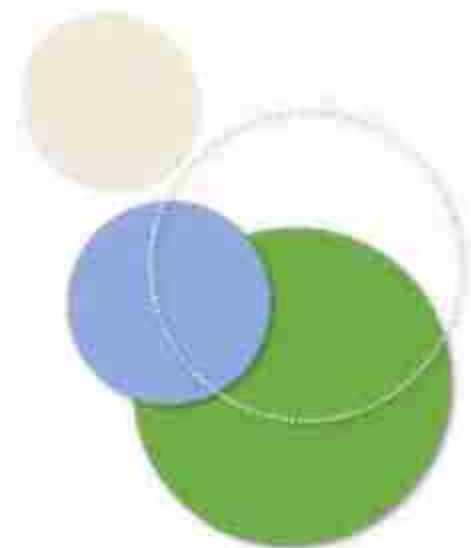
membahas hal tersebut. Untuk mendukung kelancaran proses importasi beras dari India tersebut, dipandang perlu adanya mekanisme kerja sama G-to-G melalui MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India.

Indonesia dan India telah menyepakati substansi draft Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce and Industry of the Government of the Republic of India on Rice Trade dan saat ini sedang dalam proses domestik di India. Indonesia telah menyampaikan draft final MoU tersebut ke India pada tanggal 23 Juni 2023 melalui surat Direktur Perundingan Bilateral Nomor PB.00.00/290/PPI.5/SD/06/2023 dan pada tanggal 27 Juni 2023 melalui surat Direktur Perundingan Bilateral Nomor PB.00.00/311/PPI.5/SD/06/2023. MoU Perdagangan Beras Indonesia-India ditargetkan dapat segera ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara atau pejabat lain yang mewakili.

PENJAJAKAN INDONESIA-INDIA PTA

Dalam rangka menjajaki dimulainya perundingan Indonesia-India PTA, Menteri Perdagangan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Industri India pada tanggal 14 Maret 2023. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Indonesia dan India sepakat menugaskan pejabat koordinator (nodal officers) untuk penyelesaian isu-isu hambatan perdagangan dan investasi.

Sebagai persiapan pertemuan antar nodal officers, Kementerian Perdagangan bersama K/L terkait telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar India di Jakarta untuk membahas perkembangan isu-isu utama hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-India pada 14 Juni 2023.





ASEAN-CANADA FTA

Putaran perundingan ACAFTA telah berjalan sebanyak empat kali. Pertemuan ACAFTA-Trade Negotiating Committee (TNC) ke-4 telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 secara daring. Beberapa hal yang disepakati oleh ACAFTA-TNC yaitu:

- Para ahli ASEAN dan Kanada untuk melanjutkan pembahasan isu Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perdagangan Inklusif dan menyampaikan rekomendasi elemen yang dapat masuk ke dalam ACAFTA kepada ACAFTA-TNC pada putaran ke-5 mendatang (tentatif bulan September/Oktober 2023);
- ACAFTA-TNC sepakat untuk membentuk Working Group on Good Regulatory Practices (GRP) yang tidak menjadi subjek sengketa (*dispute*);
- ACAFTA-TNC sepakat agar pembahasan isu State Owned Enterprises (SOEs) tetap dilaksanakan di tingkat TNC yang terbatas pada diskusi dan bukan negosiasi; dan

- ACAFTA-TNC sepakat melaporkan perkembangan perundingan ACAFTA kepada para Menteri Ekonomi ASEAN dan Kanada bulan Agustus 2023 untuk mendapat arahan lebih lanjut. Laporan kepada para Menteri mencakup perkembangan perundingan ACAFTA, upaya maksimal yang telah dilakukan dalam mempercepat perundingan, dan kendala dalam proses perundingan ACAFTA antara lain: *divergence views on outstanding issues, lack of human resources, virtual meetings* dan perbedaan zona waktu.

Merujuk pada progres perundingan saat ini, ACAFTA-TNC memandang bahwa target *reasonable* untuk mencapai *substantial conclusion* adalah pada tahun 2025.



UPGRADING ATIGA

Negosiasi Upgrading ATIGA telah resmi diluncurkan pada tahun 2022, sampai saat ini, pertemuan Trade Negotiating Committee telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali. Pertemuan TNC yang keempat telah dilaksanakan pada tanggal 16-19 Mei 2023. Terdapat beberapa usulan elemen baru untuk dimasukkan ke dalam perjanjian ATIGA Upgrade yaitu:

- Economic and Technical Cooperation (ECOTECH);
- National Treatment and Market Access (NT and MA) Chapter;
- Circular Economy and Remanufactured Goods;
- Digital-related elements;
- Trade in Crisis Situation;
- Export Restrictions on Food and Agricultural Products;
- Trade and Environment.

Penyelesaian perundingan secara substantial conclusion ditargetkan pada November tahun 2024 dan penyelesaian perundingan secara keseluruhan pada Februari 2025 serta penandatanganan pada Pertemuan Summit ke-46 di November 2025.



UPGRADING ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FTA (AANZFTA)

Seluruh pihak telah menyetujui seluruh teks the 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA/Upgrading AANZFTA dan menargetkan penyelesaian legal scrubbing pada tanggal 24 Juni 2023. Diharapkan semua Pihak mulai mempersiapkan proses domestik untuk dapat ditandatangani oleh Para Menteri di Pertemuan AEM- CER Consultation tanggal 22 Agustus 2023 di Semarang.

Mengingat penandatanganan perjanjian ini merupakan salah satu PED Indonesia, maka SEOM 2/54 tanggal 22 –26 Mei 2023 menyetujui perjanjian ini akan ditandatangani terlebih dahulu oleh Indonesia (ketua ASEAN 2023), Brunei Darussalam (Country Coordinator), Australia dan Selandia Baru. Sedangkan AMS lainnya akan menandatangani secara ad-referendum.

Pada Upgrading AANZFTA ini, terdapat penambahan 3 (tiga) Bab baru, yaitu: (i) Government Procurement; (ii) Micro, Small and Medium Enterprises (MSME); dan (iii) Trade and Sustainable Development (TSD) dan peningkatan komitmen untuk 9 (sembilan) Bab, yaitu: (i) Trade in Goods (TIG); (ii) Rules of Origin (ROO);

(iii) Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF); (iv) Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures (STRACAP); (v) Trade in Services (TIS); (vi) Movement of Natural Persons (MNP); (vii) Electronic Commerce; (viii) Investment; dan (ix) Competition.

Selain itu, terdapat 6 (enam) Annexes yang telah mengalami perubahan, antara lain: (i) Professional Services; (ii) Education Cooperation; (iii) Telecommunication Services; (iv) Customary International Law (CIL); (v) Expropriation and Compensation; dan (vi) Financial Services.

Manfaat dari dilakukannya Upgrading AANZFTA ini adalah sebagai berikut:

- Menjamin perjanjian lebih responsif, adaptif dan tangguh terhadap situasi di masa depan;
- Perluasan cakupan fasilitasi perdagangan melalui sistem digital;
- Fasilitasi kerja sama dan peningkatan partisipasi UMKM; dan
- Perluasan akses pasar.

AANZFTA

ASEAN-Australia-New Zealand FTA



UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Negosiasi Upgrade ASEAN – China FTA secara resmi diluncurkan pada KTT ASEAN-China ke-25 tanggal 11 November 2022. Hingga saat ini telah dilakukan 3 kali putaran perundingan. Pertemuan putaran ke-3 telah dilakukan pada tanggal 24-27 Juni 2023 di Kunming, Yunnan Province, RRT. Pertemuan membahas isu implementasi ACFTA dan upgrading perjanjian perdagangan antara Negara Anggota ASEAN dan RRT yang mencakup area kerja sama baru seperti Digital Economy, Green Economy, dan Supply Chain Connectivity.

Diharapkan dengan adanya area kerja sama baru, perjanjian ACFTA dapat lebih relevan dan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Perundingan Upgrade ASEAN-China FTA menjadi salah satu prioritas ASEAN dengan target penyelesaian 50% pada akhir tahun 2023 dan finalisasi pada tahun 2024.



ASEAN- JEPANG COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

Negara anggota ASEAN dan Jepang telah berkomitmen bersama-sama untuk mensukseskan kerjasama ASEAN- Jepang ke-50 di Tahun 2023 sekaligus Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.

Untuk menyukkseskan momentum penting ini, Jepang telah berkomitmen di Pertemuan SEOM-METI Consultation tanggal 25 Mei 2023 untuk menyelenggarakan workshop buat perwakilan Pemerintah ASEAN dan Jepang membahas konsep Draft ASEAN Future Design and Action Plan of an Innovative and Sustainable ASEAN Japan Economic Partnership tahun 2023— 2033 versi ke-2, untuk pemahaman bersama karena dokumen ini akan disahkan oleh Menteri pada AEM-METI Consultation bulan Agustus 2023 di Semarang.

ASEAN dan Jepang juga telah mempublikasikan visi inisiatif kerjasama perwakilan Swasta dan Jepang untuk 50 tahun ke depan melalui komitmen ASEAN-Japan Economic Co-Creation Vision disela-sela Pertemuan ASEAN Japan Business Week tanggal 5-9 Juni 2023 di Tokyo. Selain itu, Jepang juga akan menyelenggarakan ASEAN-Japan Special Business Summit termasuk Young Business Leaders and Z-gen Business Leaders dari ASEAN dan Japan bulan Desember 2023 di Tokyo.





ASEAN-HONG KONG, CHINA FTA

ASEAN dan Hong Kong telah menyelesaikan Perundingan Product Specific Rules (PSR) dari HS 2012 ke HS 2017 dan HS 2017 ke HS 2022, sekaligus menginkorporasi Annex 3-3 (PSR to be Review) ke Annex 3-2 yang baru.

ASEAN dan Hong Kong masih membahas draft First Protocol to Amend AHKFTA sebagai legal instrument untuk pengesahan Annex 3-2 dengan PSR AHKFTA yang baru HS 2022 yang direncanakan akan ditandatangani di sela-sela Pertemuan AEM ke-55 pada bulan Agustus 2023

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan dan perjanjian perdagangan dalam forum internasional adalah sebagai berikut:

- komitmen di level teknis hingga level tertinggi kedua negara untuk penyelesaian kesepakatan atau perjanjian perdagangan;
- komunikasi secara intensif melalui Kedutaan Besar RI di Negara Mitra atau Kedutaan Besar Negara Mitra di Jakarta untuk membahas kelanjutan perundingan dan jadwal pertemuan perundingan;
- sinergi dan koordinasi yang baik dengan K/L terkait dalam pelaksanaan negosiasi dan pertemuan dengan negara mitra untuk mempercepat proses finalisasi kesepakatan;
- dialog dan komunikasi terbuka untuk dapat mencapai kesepakatan.

Indikator Kinerja Program 2: Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

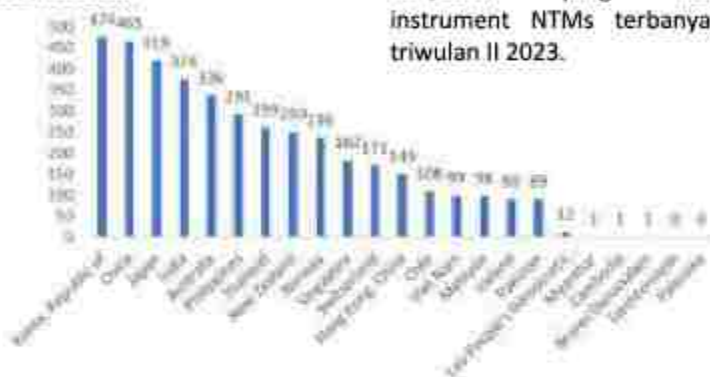
Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: <https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx>. Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang diekspor oleh negara mitra dagang.

Terdapat beberapa ruang lingkup yang diterapkan dalam perhitungan nilai indeks penurunan Non Tariff Measures. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam fora kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan. Adapun secara spesifik ruang lingkup kerja sama yang menjadi acuan adalah:

Indonesia-Japan EPA, ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Indonesia-Pakistan PTA, ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products, Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), Indonesia-Australia CEPA, ASEAN-Hong Kong, China FTA & Investment Agreement serta Indonesia-EFTA CEPA.

Perhitungan kinerja indeks Non Tariff Measures dengan mitra FTA/CEPA mempunyai fokus observasi pada NTMs yang bersifat in force sehingga pengukuran indeks ini tidak melingkupi potensial NTMs. Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 30 Juni 2023.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrumen NTMs terbanyak sampai dengan triwulan II 2023.



Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search> diakses pada tanggal 2 Juli 2023

Gambar 19 . Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA

Tahap kedua, komputasi indeks Non Tariff Measures terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. Baseline pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks Non-Tariff Measures dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa

pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. Output yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$\text{Weighted NTM}_i = \sum_j (\sum_l \text{NTM}_{ij} \times \text{MS}_j)$$

Keterangan:

j = negara mitra yang ditentukan

i = jenis NTMs/NTB (Non Tariff Measure/Barrier)

MS = market share pada tahun baseline

Tabel 7. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Tahun 2023

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force pada TW II 2023	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	337	0.01535
2	Selandia Baru	248	250	0.00294
3	Rep. Rakyat Cina	442	465	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	374	0.06370
6	Korea Selatan	446	474	0.03988
7	Malaysia	81	98	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	291	0.03616
10	Thailand	246	259	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	108	0.00089
17	Swiss	157	171	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtensin	0	0	0.00000
21	Jepang	403	419	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	89	0.01462

Sumber: <http://i-tip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search> diakses pada tanggal 2 Juli 2023

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi *weighted NTMs* yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai *NTMs* baseline di tahun 2020. Semakin rendah indeks *NTMs* mengindikasikan penurunan indeks *NTM* apabila dibandingkan dengan indeks *NTM* di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi *barriers* dalam perdagangan.

$$IK-2_t = \frac{\text{Weighted NTM}}{\text{NTM}_{\text{baseline}}} \times 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus "perbandingan terbalik" yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaiannya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index *NTM* pada triwulan II adalah 4,82. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk *IK-2* mencapai 103,81% dari target yang ditetapkan.

Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

INDIKATOR : Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
55	5,8	95	5,0	4,82	103,81

Sumber: Ditjen PPI (2023)

Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,98 poin atau sama dengan 17%. Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan capaian sebesar 8,18%, di mana target triwulan II tahun 2022 adalah 5,8 dan target triwulan II tahun 2023 adalah 5,0. Sehingga capaian di triwulan II tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II tahun 2022, yaitu menjadi 103,81 persen.

Penerapan kebijakan *NTMs* yang semakin meningkat dipengaruhi oleh situasi global di mana negara-negara di dunia memiliki kecenderungan untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya, sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan non tarif *measures*.

Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan II 2023 mencakup beberapa deskripsi berikut.

Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut dimana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam Matrix of Actual Cases (MAC). Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (CCA) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan revidu atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN.

Di tahun 2023, terdapat 13 (tiga belas) kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC) yang membutuhkan penyelesaian. Sebanyak 6 (enam) NTMs merupakan kasus yang ditujukan kepada Indonesia sebagai Responding Country dan 3 (tiga) kasus diajukan Indonesia kepada beberapa AMS. Perkembangan kesembilan kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 9. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia meminta klasifikasi terkait perusahaan Viet Nam yang terkena dampak, kasus dan hambatan yang dialami secara langsung, serta data kerugian riil yang berdampak bagi Viet Nam. Viet Nam tidak dapat memberikan informasi terkait kerahasiaan. ASEC mengusulkan agar Viet Nam dapat mempertimbangkan untuk menyampaikan informasi tersebut hanya kepada Indonesia saja. Lebih lanjut Viet Nam meminta perpanjangan waktu untuk melakukan konsultasi internal terkait pembentukan NTM Panel.
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia menyampaikan 3 (tiga) pertanyaan kepada Viet Nam yaitu: (i) Penerapan value parts test dan value-added test secara kumulatif atau alternatif, (ii) Penerapan value parts test terhadap total produksi atau total penjualan ke Viet Nam, (iii) mekanisme pelaksanaan interim review. Viet Nam akan melakukan konsultasi domestik untuk menjawab pertanyaan tersebut.
3	ID – MM, Ekspor Cat	<ul style="list-style-type: none"> Myanmar telah menyampaikan terjemahan bahasa Inggris terkait aturan impor terbaru di Myanmar, Indonesia menyampaikan masih mengalami hambatan ekspor ke Myanmar dan menanyakan terkait implementasi dari Peraturan No. 68 Tahun 2019 dan No. 50 Tahun 2020 serta izin impor yang saat ini hanya diberikan untuk produk pertanian, obat-obatan, dan alat kesehatan. Pertemuan meminta Indonesia dan Myanmar untuk melakukan pertemuan bilateral pada bulan April 2023 sebelum pertemuan ATF-JCC ke-27.
4	ID-TH, Registrasi Obat	<ul style="list-style-type: none"> Thailand berpandangan bahwa Permenkes 1010/2008 melarang impor obat yang dapat diproduksi di dalam negeri. Thailand menganggap Indonesia telah melanggar ketentuan National Treatment dalam Pasal 3 (tiga) GATT dan Pasal 6 (enam) ATIGA. Indonesia menyampaikan tidak melarang impor obat dan produk obat Thailand yang telah masuk ke pasar Indonesia. Indonesia dan Thailand diminta melaksanakan pertemuan bilateral pada bulan Mei 2023 sebelum pertemuan ATF-JCC ke-27.
5	ID-TH, Pest Free Area (PFA)	<ul style="list-style-type: none"> Thailand menanyakan terkait peluang ekspor bawang merah dari Provinsi Srisaket untuk dapat masuk ke Indonesia dan meminta Indonesia agar memberi prioritas untuk memproses aplikasi perluasan PFA yang akan diresubmit oleh Thailand. Indonesia telah menyampaikan bahwa bawang merah dari Provinsi Srisaket dapat masuk ke pasar Indonesia karena PFA nya masih berlaku dan meminta Thailand untuk meresubmit kembali aplikasi perluasan PFA yang akan diproses sesuai dengan antrian.
6	ID –TH, RIPH	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia telah memberikan penjelasan bahwa dapat menerima Thai GAP dan Global GAP sebagai persyaratan impor hortikultura. Thailand akan melakukan konsultasi domestik untuk menutup kasus ini pada pertemuan ATF-JCC selanjutnya.
7	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	<ul style="list-style-type: none"> Thailand menginformasikan eksportirnya masih mengalami hambatan ekspor ban berupa penundaan karena tidak ada tanggapan dari instansi terkait di Indonesia dan menganggap hal ini sebagai upaya untuk membatasi kuantitas impor ke pasar Indonesia. Pertemuan meminta Indonesia dan Thailand untuk melaksanakan pertemuan bilateral pada bulan Mei 2023 sebelum pertemuan ATF-JCC ke-27.
8	ID – TH, Ketentuan Impor AC	<ul style="list-style-type: none"> Thailand masih melakukan konsultasi domestik untuk menutup kasus ini dan akan melaporkan hasil konsultasi domestiknya pada pertemuan ATF JCC berikutnya.
9	ID – MYS, Kandungan Nitrogen Kecap	<ul style="list-style-type: none"> Indonesia telah menyampaikan jawaban Ministry of Health Malaysia terkait daftar laboratorium kepada eksportir kecap Indonesia. Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk menutup kasus ini.

Sumber: DJPP (2023)

Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan Non-Tariff Measures (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. Concerns yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:



Komite TBT (Technical Barriers to Trade)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 21-23 Juni 2023, Indonesia telah mengangkat 6 Specific Trade Concerns (STC) isu Offensif kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022
- India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)
- European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam
- India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles
- India-Geo Textiles (Quality Control 2022 & Protective Textile (Quality Control)

Selain itu, terdapat 2 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, dan Kanada).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Australia, dan Selandia Baru).



Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-Commerce)

Pertemuan JSI E-Commerce merupakan forum plurilateral yang digagas oleh Australia, Jepang dan Singapura untuk melakukan perundingan mengenai isu ekonomi digital (e-commerce) yang dilaksanakan di kantor WTO di Jenewa, Swiss. Pertemuan JSI E-Commerce sudah dilaksanakan pada tanggal 26-28 April 2023, 22-25 Mei 2023, serta 19-22 Juni 2023. Adapun beberapa isu yang dibahas mencakup diantaranya:

- Telecommunications
- Single Windows
- Privacy
- Source Code
- ICT Products That Use Cryptography
- Data Flows and Localization
- Digital Inclusion
- E-Payments



Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary)

Komite ini menangani non-tariff measures (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Dalam rangka sidang komite SPS WTO ke-86, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah aktif menyelenggarakan rapat koordinasi tim perunding isu SPS WTO pada bulan Juni 2023. Rapat koordinasi membahas beberapa isu yaitu 1) working group SPS Declaration; 2) respon Indonesia terhadap specific trade concern (STC) dari Uni Eropa dan Rusia terkait approval procedures atas perizinan impor untuk produk hewan dan tumbuhan dan beberapa hambatan ekspor produk Indonesia terkait isu SPS.



Komite CTG (Council for Trade in Goods)

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 April 2023, Indonesia telah mengangkat 4 (empat) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Keempat STC ofensif tersebut, yakni :

- India - Import Policies on Tyres
- Inggris - UK Environmental Act: Forest Risk Commodities
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC)

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensif Indonesia, yakni:

- Indonesia - Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia - Commodity Balance Mechanism

Dispute Settlement Body (DSB) WTO

Ditjen PPI c.q Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berkontribusi aktif dalam menanyakan klarifikasi kepada Uni Eropa (UE) terkait pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk stainless steel cold-rolled flat products

asal Indonesia melalui konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dalam sengketa DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel and Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 13 Maret 2023 di Kantor WTO, Jenewa, Swiss. Karena konsultasi tidak menyelesaikan permasalahan, Indonesia melanjutkan sengketa ini ke proses litigasi dengan mengajukan pembentukan panel dan panel terbentuk pada Pertemuan Reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO tanggal 30 Mei 2023.

Pemerintah Indonesia juga berperan aktif dalam menghadiri Pertemuan Reguler DSB WTO untuk menyampaikan mata agenda laporan status (status report) implementasi kasus DS477/DS478: Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products sesuai dengan keputusan dan rekomendasi DSB dan dukungan terhadap proposal penunjukan anggota Appellate Body (AB). Dalam konteks reformasi WTO, Pemri juga terlibat aktif dalam mengikuti diskusi informal dengan Anggota WTO guna membahas reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO sebagai tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati bersama dalam Outcome Document KTM ke-12.



Indikator Kinerja Program 3: Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang telah disepakati di berbagai fora perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.

Berdasarkan Perkin tahun 2023 Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa memiliki target kinerja 2 (dua) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan. Sampai dengan triwulan II, DJPPi masih mengupayakan penyelesaian perundingan perjanjian di sektor jasa agar dapat mencapai target tahunan tersebut.



Saat ini DPPJ berfokus pada 4 (empat) perundingan yang masih berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2023, antara lain Indonesia-Jepang EPA (Protokol Perubahan JEPA), Upgrading ASEAN-Australia-New-Zealand FTA (AANZFTA), Indonesia-EU CEPA (IEU-CEPA), dan ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF).

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional beserta penjelasan keempat perundingan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3

INDIKATOR : Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	1	33,33	2	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2023)



INDONESIA-JEPANG EPA (PROTOKOL PERUBAHAN IJEP)

Perundingan Sub Committee Trade in Services dalam kerangka Protokol Perubahan IJEP telah melakukan pertemuan intersesi pada tanggal 16 Juni 2023. Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan bahwa mempertimbangkan dengan serius permintaan Jepang yang menginginkan adanya *stand-alone* Chapter on E-commerce. Pertemuan membahas counterproposal Indonesia yang telah dikirimkan kepada Jepang pada tanggal 19 Mei 2023 sebagai upaya dalam penyelesaian perundingan e-commerce.

Terkait dengan akses pasar, offer yang Indonesia tawarkan ke Jepang saat ini sudah maksimal. Dengan demikian, Indonesia mengharapkan agar akses pasar yang ditawarkan tersebut dapat diimbangi dengan *capacity building*. Pertemuan Joint Committee Meeting ke-18 telah dilaksanakan pada 6 Juli 2023 secara daring. Sementara itu target Penandatanganan Protokol Perubahan IJEP dapat dilakukan bersamaan dengan ASEAN-Japan Commemorative Summit (sekitar bulan Desember 2023).



UPGRADING ASEAN- AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FTA (AANZFTA)

Penyelesaian substansial Perundingan Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) telah dideklarasikan di ASEAN Summit pada akhir tahun 2022, dimana pada kuartal 1 tahun 2023, Indonesia telah menyelesaikan proses perundingan akses pasar jasa. Adapun putaran ke-20 Pertemuan Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area – Joint Committee (AANZFTA-JC) tanggal 14-17 Februari 2023, telah berhasil menyelesaikan seluruh perundingan teks perjanjian untuk mendukung pencapaian salah satu Prioritas Ekonomi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 yaitu penandatanganan "The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA". Penandatanganan ditargetkan dapat dilakukan pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers – Closer Economic Relations (AEM-CER) Consultations ke-28 bulan Agustus 2023.



INDONESIA-EU CEPA (IEU-CEPA)

Working Group Trade in Services (WGTIS) IEU CEPA telah melaksanakan putaran perundingan ke-14 pada tanggal 8-12 Mei 2023, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- Article Mutual Recognition of Professional Qualifications dan Guideline on Mutual Recognition Arrangement (MRA). Kedua pihak menyepakati isu-isu: (1) usulan *footnote* oleh Indonesia yang menjelaskan hak Trade Committee untuk mendelegasikan tugas terkait review dan penyusunan MRA kepada Specialised Committee dan (2) para yang menjelaskan *guideline* sebagai pertimbangan bagi Professional Bodies dalam menyusun rekomendasi dan Trade Committee dalam mengesahkan MRA. Satu isu pada artikel ini yang belum disepakati yaitu *footnote* usulan EU yang tidak menginginkan penerapan *automatic recognition* dalam MRA.
- Section International Maritime Transport Services. Kedua pihak menyepakati isu *cargo sharing arrangement* (CSA) dengan rumusan norma pemberlakuan disiplin yang lebih fleksibel. Kedua pihak masih belum dapat menyepakati isu terkait larangan biaya reposisi *empty container* antar pelabuhan internasional pada masing-masing wilayah dan isu liberalisasi *feeder services*
- Title Digital Trade/E-Commerce. Kedua pihak melanjutkan pembahasan isu-isu terkait tujuan dan cakupan Title, pengecualian jasa keuangan dari disiplin *cross-border data flows* (CBDF), rujukan peraturan domestik Indonesia terkait privasi, usulan baru Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa berhasil menyepakati Pasal Conclusion of Contracts by Electronic Means dan beberapa paragraf pada Pasal Cooperation.
- Chapter Temporary Presence of Natural Persons for Business Purposes. Kedua pihak menyepakati beberapa isu (1) cakupan Chapter; (2) definisi kategori *trainee employee* dengan persyaratan terkait kualifikasi pendidikan yang merujuk ketentuan masing-masing pihak; (3) disiplin terkait akses pasar dan *national treatment* pada kategori *intra-corporate transferee* dan *business visitors for establishment purposes*.
- Section Delivery Services. Kedua pihak melanjutkan pembahasan isu-isu (1) rumusan baru Indonesia pada pasal Universal Service Funding yang mengakomodir peraturan domestik Indonesia dan posisi usulan Uni Eropa dan (2) rumusan baru Indonesia pada *footnote* yang menjelaskan kebijakan pemisahan akun untuk mencegah subsidi silang dalam penyediaan jasa universal dan opsi yang ditawarkan Uni Eropa pada kebijakan terkait perlakuan kepada konsumen yang tidak diskriminatif.
- Section Domestic Regulation. Kedua pihak membahas beberapa isu termasuk usulan baru Uni Eropa mengenai ketentuan biaya lisensi jasa keuangan.
- Akses Pasar. Kedua pihak melakukan pembahasan akses pasar sektor jasa bisnis (Professional, Real Estate, Computer and Related Services), jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa energi, jasa telekomunikasi, jasa pos, jasa konstruksi, dan jasa lingkungan.

Penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi perhatian utama Presiden saat ini. Sesuai mandat Presiden, perundingan ini diharapkan dapat dilakukan secara fleksibel dan berorientasi solusi untuk mencapai target penyelesaian substansi pada akhir tahun 2023.

ASEAN SERVICES FACILITATION FRAMEWORK (ASFF)

ASFF merupakan salah satu Priority Economic Deliverables (PED) pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. ASFF merupakan framework kerja sama ASEAN dalam memfasilitasi sektor jasa dalam bidang-bidang seperti peraturan domestik dan transparansi sehingga akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha jasa dari ASEAN melalui penyediaan jasa yang terpadu dan terkoordinasi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik seperti prosedur yang lebih jelas dan pengurangan birokrasi dalam penyediaan jasa lintas batas (*cross-border services*) ke pasar ASEAN. ASFF mengadopsi berbagai elemen/disiplin dari teks perjanjian atau *framework* seperti GATS, ASEAN Investment Facilitation Framework (AIFF), ATISA, WTO Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JISDR) dan beberapa perjanjian lainnya.

Dalam Pertemuan Coordinating Committee on Services (CCS) ke-104 yang diselenggarakan tanggal 15-19 Mei 2023 di Yogyakarta, mencatat bahwa 7 dari 9 (78%) paragraf preamble telah diselesaikan. Sedangkan untuk teks utama, 13 dari 71 (18%) paragraf telah diselesaikan dan terdapat 5 tambahan paragraf yang akan diselesaikan menunggu konfirmasi dari beberapa AMS. AMS diminta untuk dapat memberikan posisinya terhadap *outstanding issues* dan mempertimbangkan *revisited paragraphs* lebih pada manfaatnya pada pertemuan 2nd Special CCS di bulan Juli 2023. CCS juga mencatat perlu adanya diskusi tentang mekanisme bagi AMS terkait implementasi ASFF sesuai paragraf terakhir dalam draft teks ASFF.



TANTANGAN PEMBUKAAN AKSES PASAR SEKTOR JASA

Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi.

1

Pertama, masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

2

Kedua, dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

3

Ketiga, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN SEKTOR JASA

INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN PERDAGANGAN JASA

1

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, untuk menjamin *property rights*, *standardized services*, keselamatan konsumen, *public welfare*, inklusif consumers, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.

MARKET COMPETITION

2

Pengembangan perdagangan jasa perlu memperhatikan kompetisi atau persaingan usaha yang adil dan transparan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang *intangible*.

NATIONAL SOVEREIGNTY

3

Pengembangan perdagangan jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktek-praktek bisnis dalam perdagangan jasa untuk menjaga kepentingan nasional.

INNOVATION AND CREATIVITY

4

Pengembangan perdagangan jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.

SMALL AND MEDIUM SHAREHOLDER EXISTENCES

5

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan *Small Medium Enterprises* yang merupakan *backbones* perekonomian negara. *Local SME* harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai *MNEs*.

PRIVACY

6

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan *privacy* dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.



Sasaran Program 2

Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 4:

Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik defensif maupun ofensif.

Klarifikasi yang bersifat defensif mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat ofensif mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh DJPPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:



$$IK - 4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum Pj_{jt}} \times 100$$

- $IK - 4_t$ = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra
- PC_{jt} = *Concern* negara mitra yang telah direpson dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan
- Pj_{jt} = *Concern* negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan.

Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	40	50	80	70	87,5

Sumber: DJPPI (2023)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Sampai dengan triwulan II 2023, klarifikasi yang telah dilakukan oleh DJPPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra adalah sebagai berikut.



Klarifikasi Kebijakan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia dan Selandia Baru kembali mengangkat kebijakan Indonesia mengenai implementasi UU No. 33 Tahun 2012 mengenai Jaminan Produk Halal pada pertemuan Komite TBT WTO tanggal 21-23 Juni 2023. Indonesia diminta untuk menotifikasi peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 dalam bentuk rancangan peraturan sehingga memberikan waktu kepada anggota untuk menyampaikan komentar dan tanggapan. Indonesia menyampaikan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memastikan aspek kepastian dan keamanan produk halal yang tersedia di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi industri untuk memproduksi dan mendistribusikan produk halal. Ketentuan persyaratan dan pedoman sertifikasi produk masih dalam pembahasan dan akan dinotifikasikan kepada komite TBT WTO.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memastikan aspek kepastian dan keamanan produk halal yang tersedia di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi industri untuk memproduksi dan mendistribusikan produk halal



Klarifikasi Kebijakan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Isu ini diangkat kembali oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada pada sidang Reguler Komite TBT WTO tanggal 21-23 Juni 2023. Indonesia menyampaikan bahwa PP No. 28 Tahun 2021 bertujuan untuk memperjelas dan melengkapi persyaratan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri. Semua ketentuan mengenai standar dan skema penilaian kesesuaian berlaku sama untuk produsen dalam negeri dan luar negeri. Terkait peraturan pelaksana PP No. 28 Tahun 2021, Indonesia telah melakukan notifikasi Permenperin 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis.

PP No. 28 Tahun 2021 bertujuan untuk memperjelas dan melengkapi persyaratan sebelumnya yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Persyaratan Kepabeanaan atas Impor Barang Tidak Berwujud atau Digital

Amerika Serikat (AS) didukung oleh Kanada, Taiwan, Swiss, Singapura, Uni Eropa (UE), dan Jepang mempertanyakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190 tahun 2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, yakni terkait dengan kewajiban pabeaan atas impor barang tidak berwujud seperti produk peranti lunak (software) dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik. Beberapa poin yang dipertanyakan melalui Committee on Trade Facilitation (CTF), antara lain:

- Implementasi: kewajiban pabeaan atas barang impor intangible goods, customs audit, kategorisasi barang/goods;
- Kegiatan Impor: penentuan importir, waktu kegiatan impor, dan wilayah impor;
- Konsultasi Publik yang dilakukan sebelum diberlakukannya PMK dimaksud;
- Pajak yang diberlakukan dalam pos tarif 9901.10.00 dan 9901.20.00.

Adapun Pemri telah menyampaikan bahwa PMK dimaksud bertujuan untuk mengakomodir pemberitahuan impor untuk barang digital/tidak berwujud, serta memberikan kemudahan bagi importir barang digital yang mengimpor bersama media pembawanya (hardware).

PMK 190/2022 hanya berlaku bagi legal entities dan tidak diperuntukkan bagi individu/perseorangan.

PMK tersebut juga tidak mengubah tariff schedule dalam Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) atau masih 0%.



Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor

Sejak tahun 2008, AS telah menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada Pemri mengenai penerapan kebijakan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor (VPTI) pada forum Committee on Customs Valuation (CCV). Secara garis besar, pertanyaan AS dalam dokumen WTO No. G/VAL/W/314 meminta Pemri untuk:

- Menotifikasikan ketentuan mengenai pelaksanaan VPTI dan UU Kepabeanaan (UU No. 17/2006) ke Committee on Customs Valuation;
- Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, proses, dan prosedur VPTI;
- Memberikan klarifikasi beberapa hal dalam jawaban tertulis yang telah disampaikan Pemerintah Indonesia sebelumnya;
- Memberikan klarifikasi terkait alasan penggunaan prosedur verifikasi teknis untuk mempercepat proses importasi barang ke Indonesia.

Pemri menyampaikan bahwa VPTI bukan merupakan aktivitas Pre-Shipment Inspection yang dilarang karena adanya kepentingan Nasional untuk menjaga aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L). Selain itu, VPTI juga ditujukan untuk mengawal kesesuaian dokumen ekspor dan impor barang.

Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Mekanisme Neraca Komoditas

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC defensif Indonesia mengenai Commodity Balance Mechanism yang diangkat secara lisan oleh Uni Eropa, dan secara tertulis oleh Amerika Serikat. Indonesia menjabarkan bahwa Neraca Komoditas tidak dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor. Sebaliknya, mekanisme Neraca Komoditas ditujukan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih baik dan teratur.

Klarifikasi Tindakan Safeguard Indonesia terhadap Produk Karpét dan Pakaian

Pada pertemuan Committee on Safeguards (CSG) pada tanggal 1 Mei 2023, Jepang kembali mengangkat keberatan terhadap Tindakan safeguard Indonesia untuk produk karpét dan pakaian jadi. Kali ini Jepang mengaitkannya dengan pemberlakuan Permendag No.25/2022 di mana Menteri Perdagangan akan memberlakukan Neraca Komoditas untuk impor berbagai komoditas, termasuk karpét dan tekstil.

Menanggapi pernyataan Jepang, Indonesia kembali menegaskan bahwa dalam mengenakan Tindakan safeguard, Indonesia selalu mengikuti prosedur dan aturan yang ada termasuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapannya. Indonesia kembali meyakinkan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara objektif, terukur dan transparan serta selaras dengan aturan WTO.



Klarifikasi terkait Notifikasi Export Competition Questionnaire (ECQ) Indonesia Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022

Pada Sidang CoA-RS ke-105 Bulan Juni 2023, Indonesia mendapat pertanyaan dari Amerika Serikat dan Kanada yang berpandangan bahwa Indonesia tidak belum melakukan notifikasi ECQ untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Indonesia mengklarifikasi bahwa notifikasi ECQ Indonesia untuk tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah disampaikan kepada sekretariat WTO pada awal Juni 2023.



Klarifikasi terkait kebijakan Approval Procedures for Animal and Plant Products.

SCTs ini kembali diangkat pada Sidang SPS WTO ke-86 di mana Uni Eropa berpandangan bahwa Indonesia dinilai lambat dan tidak transparan dalam proses approval procedure untuk importasi produk hewan dan tumbuhan.

Indonesia telah menyusun respon guna menanggapi STC dimaksud, Indonesia akan menginformasikan seluruh kemajuan dan perkembangan setiap aplikasi approval procedure perizinan impor untuk produk hewan dan tumbuhan dari setiap negara Uni Eropa secara transparan sesuai dengan pasal 7, pasal 8 dan Annex C SPS Agreement, oleh karena itu pandangan terkait danya undue delay tidak lagi relevan. Indonesia akan menginformasikan status dan kemajuan aplikasi ini melalui saluran National Enquiry Point (NEP) SPS setiap negara anggota EU yang terkait.



Klarifikasi terkait Kebijakan Restriksi Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia

Pada Sidang CoA-RS ke-104 Bulan Maret 2023, Indonesia mendapat pertanyaan dari beberapa Anggota seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Swiss, Korea dan Taiwan mengenai restriksi ekspor CPO dan kebijakan DMO Indonesia yang dianggap menghambat ekspor dan belum dinotifikasi. Indonesia mengklarifikasi bahwa Indonesia dapat mengkonfirmasi bahwa saat ini Indonesia tidak menerapkan restriksi atau pembatasan ekspor kelapa sawit, sehingga tidak ada izin ekspor CPO dan produk turunannya yang ditangguhkan.

Klarifikasi Tindakan Anti Dumping Indonesia untuk Produk Hot-Rolled Coil (HRC) kepada Kazakhstan

Pada bulan Februari 2023, telah dilakukan pertemuan informal antara Kazakhstan dan Indonesia untuk membahas concern Kazakhstan terhadap BMAD Indonesia untuk produk HRC. Dalam pertemuan tersebut, beberapa concern yang disampaikan oleh Kazakhstan diantaranya (i) perpanjangan BMAD dipandang tidak memenuhi persyaratan administratif dalam ADA dan ketiadaan penyelidikan BMAD untuk Kazakhstan; (ii) Justifikasi customs union tidak sejalan dengan ketentuan WTO dan justifikasi BMAD yang ditujukan untuk memastikan efektivitas pengenaan dan mencegah praktek circumvention juga tidak pernah dilakukan penyelidikan untuk membuktikannya; (iii) Aturan dalam negeri Indonesia terkait anti-circumvention; (iv) Informasi tentang penyelidikan sunset review ke-3 dan apakah Kazakhstan akan kembali dikenakan. Guna menanggapi concern tersebut, Pusat telah menyampaikan kepada PTRI Jenewa pada tanggal 13 Februari 2023 perihal Masukan Awal atas Concern Kazakhstan dimaksud. PTRI Jenewa kemudian telah menyampaikan informasi kepada Perutap Kazakhstan, yaitu: (i) Informasi mengenai dimulainya inisiasi penyelidikan; (ii) Penyampaian surat pre-notifikasi dan dokumen inisiasi kepada seluruh pihak yang tertuduh; (iii) Penyampaian informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin berpartisipasi dalam penyelidikan dan batas waktu pengembalian kuesioner.

Pada tanggal 3 Mei 2023, di sela-sela Pertemuan Rules Committees, Indonesia kembali melakukan pertemuan bilateral dengan Kazakhstan untuk membahas pengenaan BMAD produk HRC oleh Indonesia terhadap Kazakhstan. Pihak Kazakhstan meminta agar pengenaan BMAD tersebut dapat dihentikan. Indonesia menyampaikan bahwa pada saat

sunset review sebelumnya, pelaku usaha Kazakhstan dinilai tidak kooperatif dengan otoritas. Data yang diminta oleh otoritas tidak diberikan sehingga otoritas mengenakan BMAD others terhadap pelaku usaha Kazakhstan. Untuk itu, Indonesia meminta agar kali ini Kazakhstan lebih kooperatif serta dapat menggambarkan dengan jelas praktik perdagangan internal di dalam customs union mereka yaitu Eurasian Customs Union.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Eropa-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Indonesia menyampaikan akan adanya indikasi diskriminasi dalam usulan peraturan ini, di mana Uni Eropa akan membatasi ekspor limbah tidak berbahaya, dengan menetapkan pengaturan administratif yang berlebihan untuk ekspor ke negara tujuan di luar negara anggota Uni Eropa dan negara-negara OECD. Industri pulp dan kertas Indonesia adalah salah satu sektor yang akan terkena dampak signifikan dari proposal regulasi ini. Untuk itu, Indonesia mendesak EU untuk menanggapi enquiry dan meminta konfirmasi bilamana dapat ditetapkan sebagai salah satu "Listed Countries" dan dibebaskan dari persyaratan administratif serta sertifikasi yang memakan waktu dan biaya.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022

Kebijakan tersebut mewajibkan produk Viscose Staple Fibre (VSF) untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar India IS 17266:2019 Textiles-Viscose Staple Fibres-Specification, yang pemenuhan dibuktikan melalui sertifikasi oleh BIS. Selain itu, VSF juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda ISI sebagai bentuk kepatuhan hukum sebelum didistribusikan di pasar India.

India menangguhkan pemberlakuan peraturan tersebut hingga 29 Maret 2023, namun demikian Indonesia mengharapkan mempertimbangkan penangguhan penerapan QCO VSF sampai dengan 29 Februari 2024, mengingat masa transisi yang diberikan masih belum cukup bagi industri untuk memenuhi persyaratan peraturan tersebut karena proses sertifikasi yang dilakukan oleh BIS akan memakan waktu yang tidak sedikit.

Pada Sidang TBT WTO bulan Juni 2023, Indonesia juga meminta India untuk mempertimbangkan opsi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian melalui kerangka akreditasi dan framework MRA/MLA. Hal ini untuk memastikan prosedur penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan kredibel, mempercepat proses sertifikasi, dan mengurangi biaya penilaian kesesuaian pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke India.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances

Indonesia kembali menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan sebagaimana tersebut di atas yang dinotifikasikan oleh India melalui G/TBT/N/IND/220, G/TBT/N/IND/221, G/TBT/N/IND/223, dan G/TBT/N/IND/224 mengenai implementasi (Quality Control) Order untuk Acid Oil, Coconut Fatty Acid, Lauric Acid, dan Palm Fatty Acid. Indonesia merujuk pada pernyataan terakhir yang disampaikan pada pertemuan TBT bulan Juni 2023 dan menekankan agar India dapat memberikan periode transisi yang cukup untuk memungkinkan industri mematuhi peraturan India, yaitu setidaknya 12 bulan sejak publikasi atau hingga 23 Oktober 2023. Selain itu, Indonesia mendorong India untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian asing (lembaga inspeksi) di bawah MRA/MLA dan kerangka kerja akreditasi, karena hal ini akan mempercepat proses audit dan sertifikasi sekaligus mengurangi biaya sertifikasi.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh anggota WTO yang mengangkat QCO ini sebagai STC, India menyampaikan bahwa Biro Standar India (BIS) melakukan inspeksi fisik untuk aplikasi yang diterima dari produsen asing, di mana negara yang akan dikunjungi memfasilitasi kunjungan petugas BIS yang telah divaksinasi penuh yang membawa laporan tes RT-PCR negatif dan tanpa persyaratan karantina apa pun. Sehubungan dengan aplikasi yang diterima dari Chinese Taipei, penjadwalan inspektur akan direncanakan setelah pemenuhan administrasi selesai, seperti pembayaran biaya aplikasi, pemeriksaan aplikasi, dan lain-lain.

Indonesia menekankan agar India dapat memberikan periode transisi yang cukup untuk memungkinkan industri mematuhi peraturan India.





Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India - Geo Textiles (Quality Control) Order 2022

India berencana akan memberlakukan ketentuan Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 dan Protective Textiles (Quality Control), 2022 yang mulai berlaku 180 hari setelah diumumkan Berita Negara. Pada tanggal 8 Februari 2023, India juga telah mengirimkan notifikasi atas peraturan ini kepada Komite TBT WTO, yaitu notifikasi G/TBT/N/IND/242 untuk Peraturan Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 dan notifikasi G/TBT/N/IND/243 untuk Peraturan Protective Textiles (Quality Control) Order, 2022.

Peraturan ini memberikan beberapa hambatan bagi ekspor tekstil Indonesia ke India, yaitu kewajiban penggunaan bahan fire retardant untuk kain jok (yang memiliki harga tinggi). Pemri sudah mengirimkan enquiry ke pihak India yang berisi: i) permintaan legitimate objective terkait peraturan ini; ii) mempertimbangkan masa transisi pemberlakuan selama 12 hari dan iii) membuka opsi pengakuan internasional untuk hasil penilaian kesesuaian (conformity assessment) dari lembaga penilaian kesesuaian di negara asal produk.

Dalam Sidang Reguler Komite TBT WTO bulan Juni 2023, India menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan lebih lanjut concerns yang disampaikan oleh Indonesia, serta akan memberikan respon lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa- Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam

Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan terkait batas maksimum Clothianidin dan Thiamethoxam yang ditetapkan oleh EU lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan dalam Codex Alimentarius dari FAO dan WHO. Setiap perubahan MRL yang diterapkan akan menempatkan perdagangan dalam resiko, bahkan ketika terjadi perbedaan kecil yang sangat aman bagi manusia, dapat menyebabkan kiriman ditolak masuk ke EU, dikembalikan atau dimusnahkan. Ketidakpastian ini akan membuat ekspor dari Indonesia menjadi kurang menarik karena resiko penolakan menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Indonesia berharap EU dapat mempertimbangkan untuk merujuk pada penggunaan standar internasional seperti CODEX sebagai referensi untuk penetapan batas maksimum clothianidin dan thiamethoxam pada produk tertentu.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India- Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles

Kebijakan pembatasan impor ban dan kebijakan pemberlakuan royalti atas penggunaan merek Standar India pada produk ban yang dijual ke negara ketiga, keduanya masih dalam proses permintaan penjelasan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah India.

Indonesia telah beberapa kali mengangkat isu ini pada pertemuan komite di WTO, yaitu pertemuan Komite TBT, CIL maupun pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) di tahun 2022 dan India telah menanggapi enquiry pada pertemuan Komite TBT di bulan November 2022. Meskipun demikian belum ada solusi tepat untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan ini berpotensi memberatkan pelaku usaha dan menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu pada perdagangan internasional. Indonesia mendesak agar India diberikan kesempatan untuk melakukan notifikasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di WTO.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Inggris - UK Environmental Act: Forest Risk Commodities

Indonesia telah mengangkat kekhawatiran pemerintah Indonesia terkait UK Environmental Act, khususnya mengenai kebijakan Due Diligence on Forest Risk Commodities. Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran komoditas impor yang terkait dengan deforestasi, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan prinsip dan regulasi WTO. Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut terkait bukti ilmiah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, cakupan komoditas kehutanan dalam UK Environmental Act dimaksud, serta perkembangan terbaru terkait pembahasan dan mekanisme kebijakan tersebut.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Indonesia terus menyampaikan keberatan kepada Uni Eropa terkait disetujuinya proposal Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Indonesia berpandangan bahwa kebijakan CBAM dimaksud berpotensi bertentangan dengan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation (MFN) di WTO, sehingga bersifat diskriminatif. Indonesia lalu meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Uni Eropa mengenai rencana perluasan sektor produk yang akan tercakup oleh CBAM.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia terkait Kebijakan Uni Eropa mengenai Regulation on Deforestation Free Products

Pada Sidang CoA-RS ke-105 Bulan Juni 2023, Indonesia menjadi salah satu co-sponsor yang mengajukan keberatan terkait kebijakan Uni Eropa karena dianggap menciptakan hambatan perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan WTO, menghambat akses pasar produk pertanian dan berpotensi memberikan dampak kepada petani kecil dan miskin khususnya di negara berkembang.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC)

Indonesia terus menolak disetujuinya proposal DFC, yang antara lain bertujuan untuk mengenakan mandatory due diligence terhadap 7 (tujuh) produk yang dianggap berpotensi memiliki dampak terhadap deforestasi. Produk tersebut adalah kedelai, daging sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, karet, dan kopi. Indonesia juga meminta penjelasan lebih lanjut kepada Uni Eropa mengenai dasar penentuan komoditas yang tercakup oleh DFC, rencana ekspansi daftar cakupan komoditas DFC tersebut, dan juga detail mekanisme mandatory due diligence.



Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan - WTO

Pada KTM WTO Ke-12 tanggal 12-17 Juni 2022 di kantor WTO-Jenewa, Swiss, melalui Ministerial Decision (Mindec) (WT/MIN(22)/33) para anggota WTO menyepakati Perjanjian Subsidi Perikanan. Beberapa isu yang disepakati dalam lampiran Mindec dan menjadi kesepakatan Perjanjian Subsidi Perikanan tahap satu antara lain: IUU-Fishing, Overfished Stock, dan Cross-Cutting Issues. Mindec tersebut juga memandatkan untuk melanjutkan perundingan pada isu yang belum memperoleh kesepakatan, yakni pilar Overfishing and Overcapacity (OFOC) dan aturan Special and Differential Treatment (SDT). Perundingan kembali dilanjutkan sejak Bulan Maret 2023.

Indonesia terlibat aktif pada perundingan di pertemuan Fish Week Triwulan II yang dilaksanakan pada tanggal, 25 – 28 April 2022 dan 5 – 9 Juni 2023. Indonesia menyampaikan kepentingan Indonesia diantaranya: i) pentingnya keseimbangan antara tujuan pembentukan disiplin dengan penerapan prinsip Common but Differentiated Responsibility (CBDR) dalam pilar OFOC dan SDT; ii) menyoroti fleksibilitas yang cukup tinggi pada teks yang ada saat ini bagi negara yang melakukan penangkapan di laut lepas (distant water fishing nation) untuk mempertahankan praktik pemberian subsidi saat ini; iii) Implementasi Fisheries Management yang baik dapat mendorong terciptanya keberlanjutan (sustainability) stok perikanan yang lebih baik di wilayah yurisdiksi masing-masing anggota; dan iv) menekankan pentingnya SDT sebagai bagian integral perundingan sebagaimana dimandatkan.



Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Pertanian WTO

Indonesia berupaya untuk terus mendorong pencapaian solusi permanen Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) yang merupakan salah satu instrument penting untuk menjamin keamanan pangan. Pada Pertemuan CoA-SS Bulan Juni 2023, Indonesia telah memberikan klarifikasi atas beberapa pertanyaan teknis dari anggota WTO terhadap joint proposal JOB/AG/229. Isu lain yang menjadi perhatian yaitu mengenai pemotongan subsidi domestic dan subsidi terhadap produk specific yang masih banyak digunakan oleh beberapa negara anggota WTO.



Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia - Modifikasi Konsesi Kesepakatan Tariff Rate Quota (TRQ) Manioc Indonesia-Inggris

Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), Indonesia dan Uni Eropa telah menyelesaikan modifikasi skedul konsesi Uni Eropa untuk TRQ country specific Indonesia untuk produk manioc (singkong). Negosiasi dengan Inggris mengenai kompensasi terhadap Indonesia atas modifikasi konsesi skedul XIX Inggris telah berlangsung sejak 2021. Pertemuan Menteri Perdagangan RI dan UK Trade Envoy Richard Graham pada bulan Juni 2023, menyepakati secara substansi isu TRQ Manioc. Indonesia akan mendapatkan TRQ country specific untuk produk manioc sebesar 660.000 ton pertahun.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Tindakan Safeguard Filipina terhadap produk High Density Polyethylene (HDPE)

Concern ini diangkat pada pertemuan Rules Committees WTO pada tanggal 1-4 Mei 2023. Indonesia mempertanyakan tindakan *safeguard* tersebut pada saat rekomendasi Tarif Commission (TC) Filipina memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang dikecualikan, namun dalam implementasinya Indonesia tetap dikenakan. Selain itu, Indonesia juga mempertanyakan notifikasi pasal 12.1(b) dan 12.1(c) Agreement on Safeguards (AoS) Filipina yang tidak menyediakan informasi memadai tentang aspek penting penyelidikan, khususnya kesempatan konsultasi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 12.3 AoS. Pada kesempatan ini, delegasi Filipina mencatat keberatan yang disampaikan oleh Indonesia untuk disampaikan dan dibahas oleh Pemerintah Filipina (diangkat pada pertemuan CSG 1 Mei 2023).

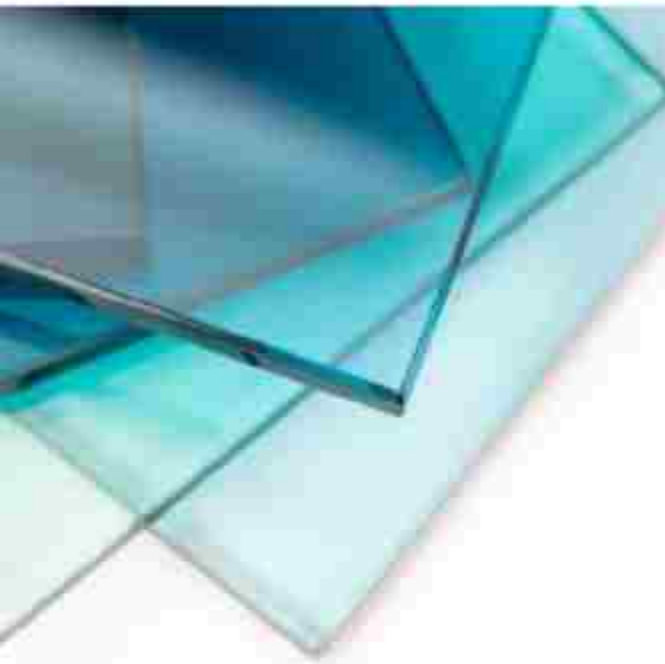


Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Tindakan Anti-Dumping Australia terhadap produk A4 Copy Paper

Pada pertemuan bilateral dengan Australia di sela-sela Pertemuan Rules Committees tanggal 1 Mei 2023, pihak Australia menginformasikan bahwa penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) tersebut telah dicabut.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Tindakan Anti-Dumping Taiwan terhadap produk Float Glass in Sheet

Concern ini diangkat pada pertemuan Rules Committees WTO pada agenda pertemuan Committee on Anti-Dumping Practices tanggal 3 Mei 2023. Indonesia menyampaikan keberatan yaitu: (1) tidak ditetapkannya margin dumping individual terhadap salah satu eksportir Indonesia yang telah kooperatif dalam penyelidikan; (2) Otoritas Taiwan tidak membuka kesempatan *hearing* sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.2 Anti Dumping Agreement (ADA); dan (3) meminta Taiwan untuk membatalkan keputusannya atas penerapan BMAD terhadap produk Float Glass in Sheet asal Indonesia.





Pengamanan Kebijakan Indonesia terkait Proposal Transparansi Non-Preferensi Rules of Origin

Proposal peningkatan transparansi ROO Non Preferensi diusulkan oleh Pemerintah Swiss dan didukung beberapa negara anggota. Proposal dimaksud mencakup ketentuan dan prosedur serta format notifikasi yang perlu disampaikan ke Committee on Rules of Origin (CRO).

Pemri telah berhasil mengamankan kepentingan nasional melalui melakukan sejumlah konsultasi bilateral/trilateral bersama Proponen dan Ketua CRO. Notifikasi dimaksud tidak lagi mewajibkan penyediaan seluruh legal text, website, dokumen pendukung dalam salah satu bahasa resmi WTO.

Pengamanan Kebijakan Indonesia melalui Komite Nasional Fasilitas Perdagangan

Pengamanan Kebijakan Indonesia melalui Komite Nasional Fasilitas Perdagangan Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP) sebagaimana dimandatkan dalam Article 23.2 WTO Trade Facilitation Agreement. Beberapa optimalisasi KNFP yang dilakukan, antara lain:

- Penguatan kelembagaan termasuk peran, tugas, dan fungsi KNFP;
- Monitoring dan evaluasi implementasi komitmen TFA Indonesia dengan GAP analysis;
- Penguatan mekanisme transparansi melalui website dan enquiry points KNFP;
- Diseminasi kebijakan terkait fasilitasi perdagangan kepada stakeholders.

Gugatan terhadap Uni Eropa dalam Kerangka Sistem Penyelesaian Sengketa WTO terkait Pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk *Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia*

Kasus ini dilatarbelakangi Pengenaan CVD sebesar 13,5%-21,4% kepada perusahaan asal Indonesia (di antaranya IRNC/Ruipu dan Jindal) melalui European Commission (EC) Implementing Regulation No. 2022/433 imposing definitive CVD on imports of SSCR products originating in India and Indonesia sejak tanggal 16 Maret 2022. Pengenaan ini disinyalir menutup ekspor SSCR Indonesia ke UE dan menyebabkan kerugian signifikan karena total ekspor SSCR Indonesia ke UE pada tahun 2020 mencapai 20.000 ton dengan nilai sebesar 42 juta Euro (643 miliar rupiah).

Atas pengenaan tersebut, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dengan nomor kasus D5616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 24 Januari 2023. Pokok-pokok klaim dalam konsultasi di antaranya terkait isu subsidi transnasional (*transnational subsidy*), penyediaan bijih nikel di bawah harga layak (*less than adequate remuneration for nickel*), penyediaan lahan di bawah harga layak (*less than adequate remuneration for land*), pendapatan negara yang hilang (*government revenue foregone*), informasi yang tersedia pada penyelidikan (*best information available*), dan perbandingan yang adil antara harga ekspor dan harga normal (*fair comparison on anti-dumping*).

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Produk Potensial Ekspor Indonesia ke Negara Mitra melalui Permintaan Initial Negotiating Rights (INR) untuk Barang dan Jasa dalam rangka Akses Calon Anggota WTO

Pada tanggal 10 Februari 2023, telah diselenggarakan Pertemuan Bilateral Keempat Indonesia-Uzbekistan dalam rangka Akses Uzbekistan ke WTO. Pada pertemuan dimaksud, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Uzbekistan yang telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan Initial Negotiating Rights (INR) secara resmi terhadap 3 (tiga) produk (Kode HS 10-digit) Indonesia.

Lebih lanjut, Indonesia juga menyampaikan apresiasinya kepada Uzbekistan yang telah menyetujui permintaan Indonesia sebelumnya untuk penurunan *bound tariff* atas 123 produk (Kode HS 10-digit). Indonesia meminta klarifikasi kepada Uzbekistan terkait kesediaannya untuk memberikan INR kepada Indonesia atas 123 produk tersebut. Tidak hanya itu, Indonesia juga meminta klarifikasi kepada Uzbekistan terkait adanya ruang negosiasi bagi sisa permintaan Indonesia untuk penurunan *bound tariff* atas 155 produk (Kode HS 10-digit) lainnya.



Secara lebih mendalam, Indonesia juga kembali menyampaikan permintaan Indonesia untuk sektor jasa di Uzbekistan, yakni Financial Services serta Tourism and Travel-related Services. Sebagai tindak lanjut, Uzbekistan akan melanjutkan koordinasi internal untuk mempertimbangkan permintaan INR Indonesia untuk sektor barang dan jasa tersebut.

Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia melalui Trade Policy Review Mechanism

Trade Policy Review Mechanism (TPRM) merupakan salah satu mekanisme di WTO guna menjamin transparansi peraturan dan kebijakan perdagangan Anggotanya. TPRM menjadi satu-satunya forum WTO di mana segala aspek kebijakan terkait perdagangan suatu anggota termasuk kebijakan ekonomi makro didiskusikan oleh seluruh anggota WTO lainnya. Indonesia telah aktif berpartisipasi pada TPR anggota WTO, antara lain:



Trade Policy Review Malaysia

Melalui TPR Malaysia yang diselenggarakan pada 8 dan 10 Februari 2023, beberapa isu kebijakan perdagangan Malaysia yang dipertanyakan Indonesia, yakni: i) pertanian, Pemerintah Malaysia memberlakukan larangan sementara untuk ekspor ayam termasuk unggas hidup, karkas, daging beku; ii) manufaktur, adanya pemberlakuan biaya impor bagi kendaraan impor Malaysia melalui kebijakan New Open Approved Permit. Kebijakan dimaksud efektif membatasi impor kendaraan bermotor sebesar 10% karena adanya perbedaan antara produk dalam negeri dan impor sehingga berpotensi melanggar Article III GATT tentang National Treatment. Isu lainnya yang juga diangkat antara lain terkait kebijakan investasi, pariwisata, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Trade Policy Review Jepang

Beberapa *concern* yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada Pertemuan TPR Jepang (1 dan 3 Maret 2023), antara lain terkait: i) proteksi Pemerintah Jepang pada sektor pertanian melalui tingginya tarif dan ketatnya proses inspeksi, khususnya bagi produk buah tropis Indonesia; ii) fisheries management Jepang dan dampaknya terhadap lingkungan; iii) serta terkait sektor jasa, hak kekayaan intelektual, dan investasi.





Trade Policy Review Uni Eropa

Beberapa *concern* atas kebijakan dan praktik perdagangan UE yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dan sebagian besar anggota WTO pada Pertemuan TPR tanggal 5 dan 7 Juni 2023, antara lain:

- Kebijakan RED II yang melarang penggunaan produk sawit pada tahun 2023.
- Kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Deforestation Free Product (DFP) yang berpotensi menghambat perdagangan bagi produk kompetitif UE, seperti kopi, karet, kayu olahan, dan minyak sawit. Kebijakan dimaksud juga mencakup persyaratan penggunaan *geolocation* data yang berpotensi melanggar hukum privat.
- Kebijakan Maximum Residue Levels (MRLs) yang melebihi dari ketentuan Codex telah menciptakan hambatan signifikan bagi ekspor produk biji kopi, teh, buah dan kayu manis Indonesia.
- Kebijakan Hungaria melalui Public Health Product Tax (PHPT), yakni pengenaan pajak tambahan terhadap produk keripik termasuk dari ubi kayu yang dikategorikan sebagai produk tidak sehat. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi produk singkong asal Indonesia, terlebih terkait hasil negosiasi konsesi *tariff rate quota* (TRQ) pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

Pemenuhan Kewajiban Transparansi Indonesia di WTO

Telah diratifikasinya perjanjian WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengikuti ketentuan di WTO termasuk melaporkan/menotifikasikan kebijakan dan praktik terkait perdagangannya melalui Committee/Badan WTO. Beberapa kebijakan dan kerja sama perdagangan yang telah Pemri notifikasi/laporkan, diantaranya:

- Pelaporan kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan periode pertengahan Oktober 2022 s.d. pertengahan Mei 2023 melalui Trade Monitoring Report (TMR). Kebijakan dimaksud dapat diakses melalui: <https://tmdb.wto.org/en>.
- Consideration Process Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE–CEPA), sebagai tindak lanjut notifikasi IE–CEPA pada Committee on Regional Trade Agreement (CRTA) WTO pada 2022.
- Consideration Process ASEAN–Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) yang sudah selesai dilakukan melalui Pertemuan CRTA tanggal 5-6 Juli 2023.
- Notifikasi Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK–CEPA) pada 15 Juni 2023 (Dokumen WTO: WT/REG469/N/1; S/C/N/1135).

Indikator Kinerja Program 5:

Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi di beberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia sampai dengan triwulan I tahun 2023, dengan rumus sebagai berikut:

$$DCI = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \times 100$$

- DCI = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan
- AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan
- IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Pada triwulan II 2023, Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional telah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan di forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional lainnya dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

INDIKATOR : Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	40	50	80	40	50

Sumber: DJPPI (2023)

Sampai dengan triwulan II realisasi capaian yang dapat dicapai sebesar 40 persen. Nilai realisasi ini sama dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Saat ini DJPPI terus mengupayakan untuk dapat memberikan kontribusi diterimanya proposal ataupun deklarasi/statement kepentingan Indonesia yang diajukan untuk menjadi bagian dari kesepakatan

di forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional masih terus dilakukan. Secara lebih detail kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut antara lain tercakup dalam pertemuan:



APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) 2023 “Creating a Resilient and Sustainable Future for All”

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC berperan sebagai inkubator ide isu-isu perdagangan dan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi 21 Ekonomi APEC. Pada tahun 2023, Menteri Perdagangan memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Menteri Perdagangan APEC ke-29 tanggal 25-26 Mei 2023 di Detroit, Amerika Serikat.

Amerika Serikat selaku Tuan Rumah APEC 2023 mengangkat tema “Creating a Resilient and Sustainable Future for All” dengan 3 (tiga) prioritas utama yaitu: (1) Interconnected (menciptakan masa depan yang berketahanan dan berkelanjutan); (2) Innovative (mempromosikan lingkungan yang inovatif demi masa depan yang berkelanjutan); dan (3) Inclusive (mewujudkan masa depan yang adil dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan pentingnya peran APEC dalam mendorong reformasi WTO khususnya penyelesaian krisis di Badan Banding WTO. APEC dapat mendukung negosiasi substantif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian, subsidi perikanan, jasa, serta isu-isu baru seperti ekonomi digital, fasilitasi investasi dan UMKM. Ekonomi Anggota APEC perlu bekerja sama mendorong kebijakan perdagangan berkelanjutan dan inklusif di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks, serta membangun pemulihan ekonomi yang lebih baik melalui transisi ekonomi hijau dan transformasi digital.

Pada pembahasan kesepakatan bersama APEC MRT, pertemuan tidak mencapai konsensus pada paragraf 4 terkait isu geopolitik Rusia dan Ukraina yang dirujuk dari APEC 2022, sehingga hanya menghasilkan “The 2023 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair”.

Usulan Indonesia yang diterima dalam statement tingkat Menteri tersebut sebanyak 8 (delapan) dari total 10 (sepuluh) usulan. Usulan Indonesia tersebut antara lain:

Masukan Indonesia yang Diterima

<p>Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral</p>	<p>Indonesia mengajukan perubahan frasa "APEC Members" menjadi "Respective APEC Member participants" dalam kalimat terkait JSI WTO yang sudah diakomodir dalam Chair's statement.</p>
<p>Environmental Goods (EGs)</p>	<p>Indonesia mengusulkan penambahan frasa "food systems" dan mengubah frasa "food security" menjadi "food insecurity" diterima. Usulan perubahan frasa dimaksud merujuk ke salah satu outcome document pertemuan WTO MC12 "The Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity".</p>
<p>Inklusivitas</p>	<p>Indonesia menekankan pentingnya penambahan kalimat instruksi untuk memulai pekerjaan kerangka diskusi APEC Reference List EGs usulan Australia sesuai dengan rekomendasi yang disepakati di tingkat kelompok kerja. Untuk itu, usulan penambahan frasa "in accordance with the agreed recommendations" berhasil masuk dalam Chair's statement.</p>
<p>Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)</p>	<p>Indonesia mengusulkan untuk menambahkan elemen <i>capacity building</i> pada isu inklusivitas</p>
<p>Ekonomi Digital</p>	<p>Indonesia mengusulkan untuk mengganti frasa "high standard" menjadi "high quality" pada kalimat pekerjaan FTAAP. Hal ini sesuai dengan mandat Pemimpin Ekonomi APEC di tahun 2022 dan untuk menghindari pembahasan menetapkan standar dalam perjanjian regional dalam perundingan lain seperti IPEF.</p>
<p>Perjanjian fasilitasi perdagangan (Trade Facilitation Agreement) WTO</p>	<p>Indonesia mengusulkan untuk menambahkan elemen "digital infrastructure" untuk menjembatani kesenjangan digital.</p>
	<p>Indonesia mengusulkan untuk menghapus elemen "free" dan "with trust" pada kalimat terkait fasilitasi arus data dan informasi.</p>
	<p>Indonesia mengajukan penghapusan daftar sub artikel WTO TFA terkait upaya tanggap bencana dan pemulihan.</p>

Masukan Indonesia yang Tidak Diakomodir

Environmental Goods

Indonesia mengusulkan untuk tidak memasukkan isu *fossil fuel subsidies reform* (FFSR) karena baru diajukan pasca draft kedua disirkulasi yang juga sejalan dengan posisi VietNam. Namun, Ekonomi Anggota akhirnya dapat menyepakati masuknya komitmen isu FFSR tersebut karena sebelumnya telah disepakati pada APEC Leaders Declaration 2010.

Perjanjian fasilitasi perdagangan (Trade Facilitation Agreement) WTO

Indonesia mengusulkan penambahan elemen rujukan ke regulasi domestik terkait provisi WTO TFA untuk tanggap bencana dan pemulihan yang disampaikan pada saat inter sesi sebelum *drafting session* dimulai.

Dokumen APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair tahun 2023, sebagai berikut:

http://mddb.apec.org/Documents/2023/MM/MRT/23_mrt_jms.pdf



APEC Market Access Group 2023 (APEC MAG1)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) juga merupakan instansi penjujur nasional untuk perundingan kelompok kerja akses pasar (Market Access Group/MAG). Pertemuan pertama MAG di Tahun 2023 atau pertemuan ke-64 dilaksanakan pada rangkaian APEC First Senior Officials Meeting (SOM1) pada tanggal 22 Februari 2023 di Palm Springs, California, Amerika Serikat. Pertemuan mendiskusikan prioritas CTI untuk MAG termasuk implementasi Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy, dukungan sistem perdagangan multilateral (MTS) melalui monitoring implementasi WTO TFA dan WTO ITA, implementasi Environmental Goods (EGs) Workplan mencakup isu transposisi ke HS 2022 dan daftar referensi produk, monitoring dan upaya peningkatan utilisasi *database* APEC Trade Repository (APECTR), serta isu akses pasar kawasan lainnya seperti rantai pasok, transparansi dan produk remanufaktur.



Indonesia terus mengawal perkembangan isu dukungan MTS, EGs, dan remanufaktur untuk memastikan perkembangan sejalan dengan posisi nasional dan menyampaikan perkembangan implementasi inisiatif peningkatan utilisasi APECTR yang telah mendapatkan pendanaan pada tahun 2021.



Asia-Pacific
Economic Cooperation

APEC Committee on Trade and Investment 2023 (APEC CTI)

Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) sebagai instansi penjujur nasional pada perundingan CTI secara khusus mengambil peranan dalam perundingan dan kerja sama akses dan fasilitasi perdagangan dan investasi di fora CTI maupun sub-fora di bawah CTI. Sepuluh Sub-fora di bawah CTI yaitu Business Mobility Group (BMG), Group on Services (GOS), Intellectual Property Rights Experts Group (IPEG), Investment Experts' Group (IEG), Market Access Group (MAG), Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC), Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP), Automotive Dialogue (AD), dan Chemical Dialogue (CD). Pada triwulan I 2023, DJPPI c.q. DPAKOI berpartisipasi aktif dalam pertemuan APEC First Committee on Trade and Investment diselenggarakan pada 23-24 Februari 2023 di Palm Springs, California, Amerika Serikat.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut perkembangan program kerja CTI terkait prioritas APEC 2023 termasuk implementasi Bangkok Goals on BCG Economy baik di forum APEC CTI maupun di tingkat domestik, pekerjaan terkait percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19, serta mendiskusikan isu perdagangan inklusif dan berkelanjutan, termasuk perkembangan Mandat Menteri APEC untuk isu environmental goods and services dan fossil fuel subsidy reform (FFSR). Indonesia berkepentingan untuk memastikan setiap inisiatif dan arah kerja APEC CTI sejalan kepentingan dan posisi nasional. Hasil pertemuan APEC CTI1 2023 telah tercatat dalam Summary Report - First Committee on Trade and Investment Meeting 2023.

http://mddb.apec.org/Documents/2023/CTI/CTI1/23_cti1_summary.pdf

Sementara itu pada triwulan II, DJPPI c.q. DPAKOI juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan APEC Second Committee on Trade and Investment yang diselenggarakan pada 21-22 Mei 2023 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Pada pembahasan isu WTO, Indonesia mendorong APEC untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam mendukung pembahasan implementasi reformasi WTO, termasuk prioritas pemilihan segera anggota Badan Banding untuk pengembalian efektivitas fungsi WTO.

Pertemuan juga membahas pentingnya program pengembangan kapasitas dalam upaya mewujudkan Free-Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) guna mencapai integrasi ekonomi Kawasan Asia-Pasifik. Indonesia menekankan pentingnya aspek kerja sama, program pengembangan kapasitas yang diiringi dengan komitmen ekonomi APEC. Program pengembangan kapasitas merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan guna memastikan kebermanfaatan forum APEC dapat dirasakan secara merata.

Para ekonomi APEC juga menekankan pentingnya meningkatkan fasilitasi perdagangan barang dan jasa, mendorong konektivitas kawasan, serta mendorong digitalisasi dan inovasi dalam bidang perdagangan. Salah satu contohnya terkait dengan jasa adalah melalui dukungan Indonesia terhadap inisiatif APEC Non-Binding Guidelines on Services that Support the Clean-up of Marine Debris yang akan menjadi salah satu upaya memfasilitasi perdagangan dan investasi serta mendukung pengembangan pasar untuk layanan pembersihan sampah laut.



भारत 2023 INDIA

Presidensi G20 India 2023

Vasudhaiva Kutumbakam - One Earth. One Family. One Future

Terdapat 5 (lima) isu prioritas yang diangkat pada pertemuan G20 Trade and Investment Working Group (TIWG) India yaitu: (1) Trade for Growth & Prosperity; (2) Trade & Resilient GVCs; (3) Integrating MSMEs in Global Trade; (4) Logistics for Trade; dan (5) WTO Reform.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional c.q. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional (DPAKOI) telah menghadiri pertemuan TIWG 1 pada tanggal 28 – 30 Maret 2023 dan pertemuan TIWG 2 pada tanggal 23 – 25 Mei 2023 di Mumbai, India. Pertemuan TIWG 2 membahas isu prioritas kelima yaitu WTO Reform dan 5 (lima) usulan outcome documents, yaitu (1) High-Level Principles on Digitalization of Trade Documents; (2) Action Plan to Create Meta Information Portal for MSMEs; (3) Generic Framework for Mapping GVCs; (4) Compendium of Best Practices on Mutual Recognition Agreements (MRAs); (5) G20 Regulatory Dialogue.

Indonesia sebagai Troika menyampaikan keselarasan agenda prioritas yang diangkat oleh Presidensi G20 India dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Indonesia mengharapkan Keketuaan Indonesia di ASEAN serta Presidensi G20 India menjadi momentum penting kedua forum untuk saling bersinergi dan berkolaborasi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menghasilkan capaian-capaian konkret untuk kepentingan negara berkembang.



5 (lima) Usulan Outcome Documents TIWG India

Subject 1: High-Level Principles on Digitalization of Trade Documents

Indonesia mendorong kegiatan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam adopsi teknologi dan digitalisasi dokumen perdagangan untuk mengurangi kesenjangan, dengan tetap mengakui implementasi kebijakan domestik.

Subject 2: Action Plan to Create Meta Information Portal for MSMEs

Indonesia menekankan perhatian khusus pada verifikasi kebenaran data, sumber daya yang diperlukan, koordinasi antar lembaga terkait, termasuk keselarasan dengan regulasi domestik

Subject 3: Generic Framework for Mapping GVCs

Indonesia menyambut baik usulan penyusunan kerangka kerja pemetaan GVC dan prinsip-prinsip ketahanan GVC untuk memitigasi risiko bottlenecks dan rentannya rantai pasok global dengan mempertimbangkan sinkronisasi jenis data yang dibutuhkan di setiap negara, memastikan data tersedia secara berkala, akurat dan tidak bias

Subject 4: Compendium of Best Practices on Mutual Recognition Agreements (MRAs)

Indonesia menekankan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi MRA, antara lain kesesuaian peraturan domestik dengan MRA, isu-isu negara berkembang dan kurang berkembang, mekanisme kepesertaan, serta petunjuk teknis MRA

Subject 5: G20 Regulatory Dialogue

Indonesia menekankan dialog harus berimbang, fokus, without prejudice, serta menghormati peraturan domestik negara anggota

4 ASPEK KEPENTINGAN PERDAGANGAN INDONESIA YANG DIPERJUANGKAN PADA PRESIDENSI G20 INDIA 2023

Isu prioritas 1 - Trade for Growth & Prosperity

Indonesia mendorong adanya dimensi development dalam trade untuk pencapaian SDGs

Isu prioritas 2 - Trade & Resilient GVCs

Indonesia mendorong alih teknologi dan peningkatan partisipasi negara berkembang dalam GVC

Isu prioritas 3 - Integrating MSMEs in Global Trade

Indonesia mendorong peningkatan kapasitas UMKM dalam akses finansial, akses informasi, dan akses teknologi

Isu prioritas 5 - WTO Reform

Indonesia mendorong reformasi WTO, pemulihan appellate body, penguatan MTS untuk strengthening trust, dan tindak lanjut hasil-hasil MC12

Trade and Investment Ministers' Meeting (TIMM) +
TIMM Statement
Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Menteri

Leaders' Declaration
Refleksi kepentingan perdagangan Indonesia pada deklarasi tingkat Presiden

Sasaran Program 3

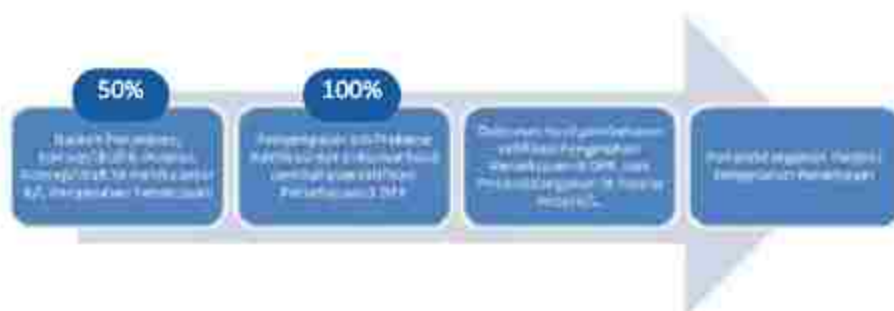
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Indikator Kinerja Program 6:

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 20. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR, yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan.

Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \times 100$$

- R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan
- D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan
- A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan



Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	0	0	100	50	50

Sumber: DJPPI (2023)

Pada tahun 2023, selain memiliki target penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani, Ditjen PPI juga memiliki target penyelesaian ratifikasi sampai terbitnya Undang-Undang atau Peraturan Presiden terkait dengan kerja sama perdagangan tersebut.

Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2022 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Pada triwulan II tahun 2023, Indonesia telah menandatangani perjanjian dan kesepakatan perdagangan yaitu Indonesia-Iran PTA dan Indonesia-Malaysia BTA. Perjanjian yang telah ditandatangani masih pada tahap penyusunan dokumen ratifikasi dan belum dilimpahkan kepada instansi yang menangani. Sementara itu untuk ICA 2022 masih dalam proses penerjemahan naskah perjanjian.

Merujuk pada hasil rapat kerja Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan pada tanggal 6 Juni 2023 bahwa Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan terkait Rencana Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk Penggabungan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa.

Dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 50 persen dengan memperhitungkan dokumen ratifikasi Indonesia-Chile CEPA TIS yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani. Adapun untuk progres ratifikasi perjanjian perdagangan secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

INDONESIA-UAE CEPA

Berdasarkan rapat koordinasi terbatas ratifikasi IUAE-CEPA di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 16 Februari 2023, diputuskan bahwa pengesahan IUAE-CEPA dilakukan dengan instrumen Peraturan Presiden.

Sehubungan dengan telah selesainya proses transposisi komitmen perdagangan barang dari Kode HS 2017 ke Kode HS 2022, Indonesia telah menyampaikan hasil transposisi tersebut kepada Persatuan Emirat Arab (PEA) melalui surat Direktur Perundingan Bilateral pada tanggal 8 Maret 2023.

Sesuai ijin prakarasa yang telah diterbitkan oleh Presiden, Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden untuk mengesahkan perjanjian perdagangan IUAE CEPA. Rancangan Perpres telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kementerian Luar Negeri melalui Kemensetneg telah mengirimkan Surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden RI Nomor pada tanggal 24 Mei 2023 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.

Secara paralel Kemensetneg telah meminta paraf para Menteri untuk menetapkan RPerpres tersebut melalui Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 31 Mei 2023 dan Menteri Perdagangan telah menyampaikan paraf pada rancangan RPerpres tersebut tanggal 6 Juni 2023.

Pada tanggal 12 Juli 2023, Presiden telah mengesahkan Perpres Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Indonesia-UAE CEPA. Dengan ditandatanganinya Perpres tersebut menandai bahwa proses ratifikasi telah selesai.





TRADE PREFERENTIAL SYSTEM AMONG THE MEMBER STATES OF THE OIC (TPS-OIC)

TPS-OIC merupakan perjanjian preferensi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara anggota OKI yang terdiri atas 57 negara anggota. 18 negara telah meratifikasi seluruh dokumen TPS-OIC dan 14 negara yang telah meratifikasi dokumen dan menyerahkan concession list (as of November 2020). Dalam TPS-OIC terdapat tiga dokumen perjanjian yaitu:

- Framework Agreement, berlaku 2002, Indonesia meratifikasi pada 20 Mei 2011
- The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) berlaku 2010, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi)
- The Rules of Origin (RoO) berlaku 2011, Indonesia menandatangani pada 6 September 2011 (belum meratifikasi).



Dalam rangka Ratifikasi dokumen PRETAS dan ROO, Indonesia perlu berkonsultasi dengan Sekretariat OIC untuk mendapatkan konfirmasi jumlah pos tarif yang akan diberikan penurunan tarif (offer list). Saat ini Ditjen PPI menyiapkan update analisis/kajian tentang indikasi offer list Indonesia menggunakan kode HS 2022.

PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PTA D-8)

Preferential Trade Agreement among Developing Eight Member States (PTA D-8) merupakan kerja sama penurunan tarif dalam rangka peningkatan hubungan perdagangan yang melibatkan 8 (delapan) negara, yaitu: Indonesia, Pakistan, Malaysia, Turki, Nigeria, Iran dan Mesir. Negara-negara anggota D-8 menandatangani kesepakatan PTA D-8 pada tahun 2006 selain untuk meningkatkan hubungan perdagangan, juga untuk meningkatkan integrasi ekonomi.

Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi PTA D-8 dengan menerbitkan sejumlah peraturan yaitu:

- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan tariff Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8, ditetapkan dan diundangkan tanggal 29 Desember 2021 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 57/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8 (Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States), diundangkan dan ditetapkan tanggal 30 Maret 2022 dan berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan;



D-8 Organization for Economic Cooperation

- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8), ditetapkan tanggal 21 April 2022.

Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi PTA D-8 dan telah mengirimkan notifikasi kepada Sekretariat D-8 melalui nota diplomatik tanggal 21 November 2022. Penyampaian notifikasi juga dilengkapi dengan sejumlah dokumen pendukung, yaitu Gazette Notification, daftar konsesi produk (HS 2022), contact points untuk issuing authority maupun receiving authority, spesimen SKA, dan spesimen tandatangan serta stempel pejabat penerbit SKA.

Sebanyak 5 negara telah melakukan notifikasi proses ratifikasi PTA D-8, yaitu Indonesia (2022), (2022), Iran (2016), Malaysia (2013), dan Turkiye (2011).

Tanggal 31 Oktober 2022 telah disepakati sebagai cut-off date implementasi D-8 PTA, namun keputusan tersebut harus memperoleh persetujuan Supervisory Committee (SC). Sekretariat D-8 akan menyelenggarakan Pertemuan The 7th Meeting of the Supervisory Committee (SC) of the D-8 PTA dan The 3rd Trade Ministers Council (TMC) of the D-8 pada tanggal 17–18 Juli 2023 di Dhaka, Bangladesh.

INDONESIA-CHILE CEPA (TRADE IN SERVICE)

Penandatanganan Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agreement of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile for the Incorporation of Provisions on Trade in Services dilakukan pada tanggal 21 November 2022 oleh Menteri Perdagangan RI dan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Internasional Chili. Dokumen praratifikasi telah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI per tanggal 21 Maret 2023.

Merujuk pada hasil rapat kerja Komisi VI DPR RI dan Kementerian Perdagangan pada tanggal 6 Juni 2023 bahwa Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan terkait Rencana Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Chili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement) untuk Penggabungan Ketentuan-ketentuan Perdagangan Jasa.

Perjanjian perdagangan Jasa dalam kerangka IC-CEPA akan memperkuat dan memperdalam kerja sama ekonomi yang tengah berlangsung antara Indonesia dan Chili melalui peluang akses pasar jasa. Perdagangan Jasa antara kedua negara mencakup hubungan ekonomi yang lebih luas dan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan Chili. Perjanjian perdagangan jasa di bawah IC-CEPA juga dapat berfungsi sebagai penggerak arus jasa yang lebih tinggi yang akan melengkapi implementasi kesepakatan IC-CEPA yang telah diimplementasikan pada tahun 2019. Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri Indonesia juga akan memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar Chile lainnya untuk sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan; jasa lingkungan; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Langkah ini akan semakin mendukung ekspor Indonesia ke kawasan Amerika Latin.



INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT (ICA) 2022

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, telah berhasil menandatangani International Coffee Agreement 2022 (ICA 2022) pada tanggal 8 Maret 2023.

Negara anggota ICO berpandangan bahwa fungsi ICO tidak lagi relevan dengan situasi aktual sektor kopi global, sehingga diperlukan modernisasi dan penajaman fungsi ICO melalui ICA baru guna mendorong terbentuknya sektor kopi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdayatahan, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan rantai nilai sektor kopi, utamanya petani.

ICA merupakan perjanjian multilateral antara pemerintah yang mewakili negara-negara penghasil kopi dan konsumen kopi. Keterlibatan Indonesia dalam perundingan ICA 2022 berkontribusi pada industri kopi dunia secara menyeluruh. Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan sektor kopi nasional dengan menambahkan "premixed coffee" pada definisi kopi di ICA 2022. Hal ini secara tidak langsung menjadi pencapaian Indonesia dalam industri kopi dunia dan kehidupan para petani lokal. Pencapaian penting lainnya adalah penekanan pada keberlanjutan sektor kopi pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan secara berimbang dan terintegrasi untuk keberlanjutan sektor kopi Indonesia dan juga dunia. Perjanjian ini mulai berlaku ketika dua pertiga dari negara anggota eksportir dan importir telah mendepositkan instrumen ratifikasi.

Terhitung tanggal 8 Februari 2023, sebanyak 9 negara, yang terdiri dari 8 negara eksportir kopi dan 1 negara importir kopi, telah menandatangani ICA 2022. Negara eksportir terdiri dari Brasil, Kosta Rika, Nikaragua, Peru, Togo, Venezuela, Panama, dan Kolombia, sedangkan negara importir terdiri dari Jepang.

Tanggal 31 Juli 2023 ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi negara untuk melakukan ratifikasi. Saat ini Indonesia tengah melakukan proses penerjemahan naskah perjanjian International Coffee Agreement 2022.

Indikator Kinerja Program 7:

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran "Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA". Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasional maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfaatan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi asymmetric information, Ditjen PPI sejak tahun

2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor. Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan advokasi tentang perjanjian perdagangan bebas. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri. Penyebarluasan informasi FTA oleh FTA Center diantaranya dilakukan melalui pelayanan konsultasi di kantor FTA Center, website dan coaching clinic. Setiap FTA centre memiliki tiga tenaga ahli untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI), akses pembiayaan dan tata cara ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran.

Adapun realisasi dan capaian pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan II 2022			Triwulan II 2023		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	730	36,5	2000	1127	56

Sumber: Ditjen PPI (2023)



Sampai dengan triwulan II 2023, FTA Center Bandung memiliki jumlah layanan terbanyak yaitu sebesar 590 layanan (52%) dengan 58,5% topik yang paling banyak diulas adalah Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). FTA Center Jakarta menempati urutan kedua dalam jumlah pelayanan yaitu 283 layanan (25%) dan 38% topik terbanyak adalah tentang akses pembiayaan dan tata cara ekspor. Pada urutan ketiga yang memberikan pelayanan terbanyak adalah FTA Center Semarang sebanyak 254 layanan (23%) dengan 52% terkait layanan akses pembiayaan dan tata cara ekspor, sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

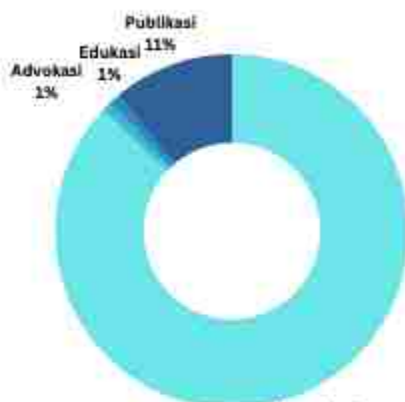
Gambar 21. Total Layanan FTA Center Triwulan II 2023 di Jakarta, Bandung dan Semarang



Sampai dengan triwulan II 2023, FTA Center di tiga kota memberikan layanan sebagaimana ditunjukkan gambar berikut ini, meliputi konsultasi sebanyak 985 layanan (87%), advokasi sebanyak 11 layanan (1%), edukasi sebanyak 125 layanan (11%), dan publikasi sebanyak 6 layanan (1%). Jumlah total pelaku usaha yang dilayani oleh ketiga FTA Center sebanyak 442 pelaku usaha. Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) menjadi topik yang paling banyak memperoleh perhatian dari masyarakat (45%), selebihnya adaiah terkait akses pembiayaan dan tata cara ekspor (31%) dan strategi promosi dan pemasaran (24%).

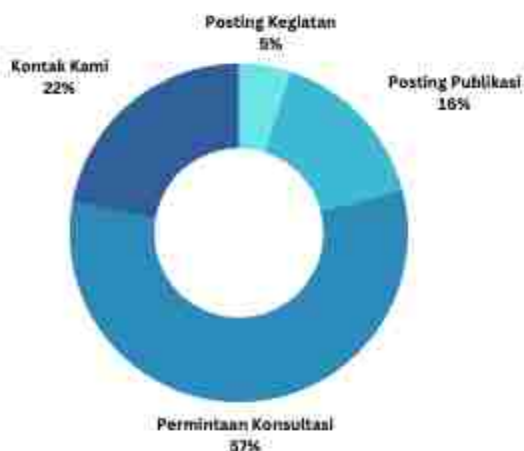
Website FTA Center

Sampai dengan triwulan II 2023, pelayanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 127 layanan yang terdiri dari posting kegiatan (6%), posting publikasi (23%), permintaan konsultasi (46%) dan kontak kami (25%).



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 22. Layanan FTA Center Triwulan II 2023



Sumber: Ditjen PPI (2023)

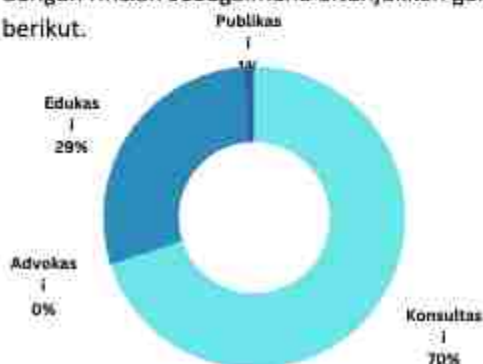
Gambar 23. Layanan Website FTA Center Triwulan II 2023



 <https://ftacenter.kemendag.go.id/>

FTA CENTER JAKARTA

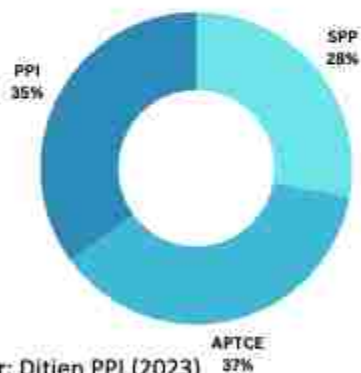
Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, FTA Center Jakarta didukung oleh tiga Tenaga Teknis yaitu Tenaga Teknis bidang Strategi Promosi dan Pemasaran (SPP), Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Total layanan yang dilakukan selama triwulan II 2023 adalah 283 layanan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 24. Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2023

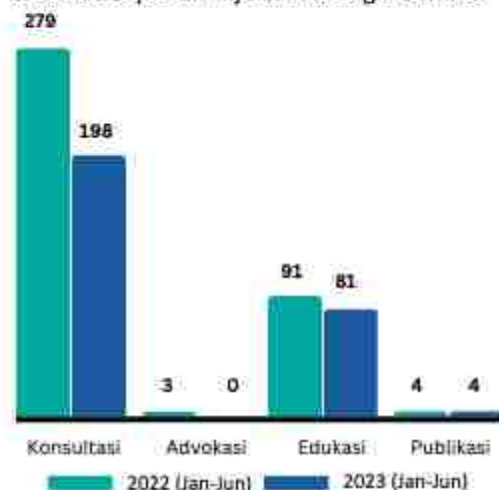
Dari 283 layanan tersebut, topik yang banyak diulas adalah Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 25. Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2023

Capaian layanan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 377 layanan. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 26. Perbandingan Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

Sementara itu, perbandingan capaian topik yang diulas pada triwulan II tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 27. Perbandingan Topik Layanan FTA Center Jakarta Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023



COACHING CLINIC FTA CENTER JAKARTA

Coaching Clinic FTA Center Jakarta dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juni 2023 secara daring dan luring di Kota Depok. Coaching Clinic ini merupakan kolaborasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, FTA Center Jakarta dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok dalam rangka mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional/Free Trade Agreement (FTA) oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah di Depok. Kolaborasi dimulai sejak seleksi peserta yang siap ekspor hingga pelaksanaannya.

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada hari pertama dilaksanakan secara daring untuk penyampaian materi oleh Tenaga Teknis FTA Center dan pada hari kedua secara luring untuk workshop atau praktik secara berkelompok, dan dihadiri oleh 38 (tiga puluh delapan) peserta pelaku usaha di Kota Depok.

Pelaksanaan hari pertama secara daring berisi pemaparan materi oleh para Tenaga Teknis FTA Center Jakarta yaitu:

- Implementasi Hasil Perjanjian Perdagangan Internasional oleh Tenaga Teknis Arif Hariyanto memaparkan perjanjian RCEP dan IK-CEPA yang telah diimplementasi Indonesia mulai tanggal 1 Januari 20



- Strategi Pemasaran yang Berdaya Saing di Pasar Global oleh Tenaga Teknis Sepri Situmeang
- Prosedur Ekspor dan Incoterms 2020 oleh Tenaga Teknis Gustian Mahardika

Pada sesi luring di hari kedua dilakukan praktik berikut:

- Pengisian Lembar Kerja Ekspor/Menghitung Harga Jual Ekspor
- Pengisian Form SKA
- Menyusun rencana pemasaran memasuki pasar global/Strategi Pemasaran (Merk Dagang dan Kemasan)

"Coaching Clinic FTA Center diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan saja, tetapi ditindaklanjuti oleh para pelaku usaha dengan konsultasi secara berkelanjutan kepada FTA Center hingga mampu memanfaatkan FTA untuk menembus pasar ekspor di negara mitra FTA."

Berdasarkan hasil studi tahun 2020, diketahui bahwa beberapa hambatan dalam utilisasi skema FTA yang telah diidentifikasi antara lain persyaratan dokumen yang rumit, informasi yang terbatas, dan kesulitan dalam memahami peraturan dan ketentuan. Untuk itu, Ditjen PPI memiliki kegiatan FTA Center yang bertujuan untuk menjelaskan informasi tentang PTA/FTA/CEPA, persyaratan dokumen, peraturan dan

ketentuan untuk dapat memanfaatkan fasilitas dalam PTA/FTA/CEPA.

FTA Center menyediakan layanan gratis yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Ke depan FTA Center akan semakin meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong pelaku usaha dan UMKM di daerah agar mampu go *internasional*.

KEGIATAN FTA CENTER JAKARTA



Sosialisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional dengan Disperindagkopukm Kota Tangerang, tanggal 10 Mei 2023

Konsultasi One on One PT. Enzym Bioteknologi Internusa mengenai Standar produk di negara-negara ASEAN dan sertifikasi yang dibutuhkan, tanggal 17 Juni 2023.

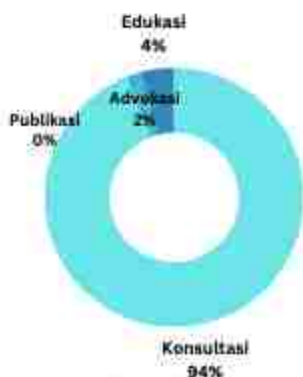


FGD Pembahasan Hasil Kajian Analisis Ekonomi dan Legal serta Rancangan Peta Jalan (Roadmap) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional, tanggal 30 Mei 2023



FTA CENTER BANDUNG

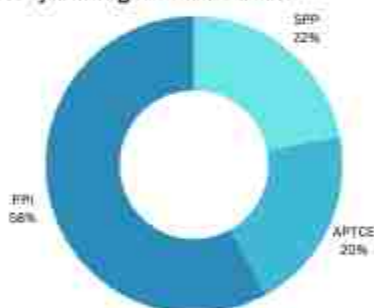
Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, FTA Center Bandung didukung oleh tiga Tenaga Teknis yaitu Tenaga Teknis bidang Strategi Promosi dan Pemasaran (SPP), Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Total layanan yang dilakukan sampai dengan triwulan II 2023 adalah 590 layanan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 28. Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2023

Dari 590 layanan tersebut, topik yang banyak diulas adalah Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 29. Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2023

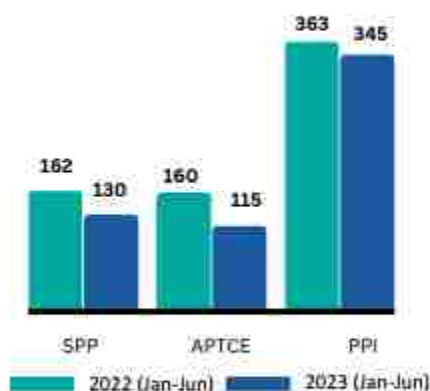
Capaian layanan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 685 layanan. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 30. Perbandingan Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

Sementara itu, perbandingan capaian topik yang diulas pada triwulan II tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 31. Perbandingan Topik Layanan FTA Center Bandung Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

KEGIATAN FTA CENTER BANDUNG



Konsultasi PT Mega Praha Bumi mengenai strategi ekspor untuk frozen singkong (071410) agar tidak terhambat regulasi dari negara tujuan mitra FTA-Australia dan New Zealand, tanggal 9 Juni 2023



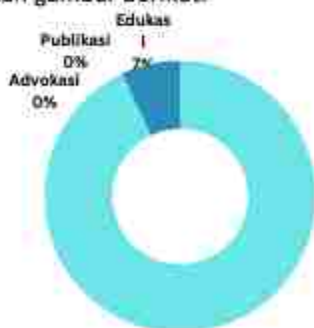
CV Madu Apk berkonsultasi untuk pencarian buyer produk madu (040900) ke negara mitra FTA-Malaysia, tanggal 8 Juni 2023



Konsultasi PT. Mekar Saluyu mengenai prosedur impor produk cabai dan registrasi sesuai dengan HS Code Cabai, tanggal 25 Mei 2023

FTA CENTER SEMARANG

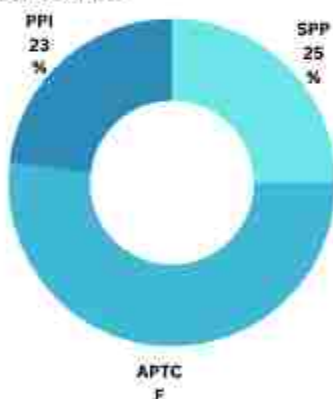
Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, FTA Center Semarang didukung oleh tiga Tenaga Teknis yaitu Tenaga Teknis bidang Strategi Promosi dan Pemasaran (SPP), Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) dan Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Total layanan yang dilakukan sampai dengan triwulan II 2023 adalah 254 layanan dengan rincian sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 32. Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2023

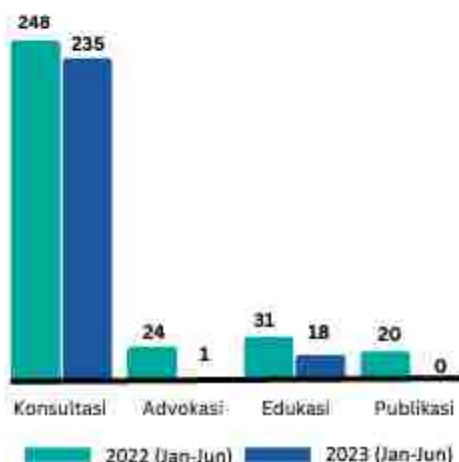
Dari 254 layanan tersebut, topik yang banyak diulas adalah Akses Pembiayaan dan Tata Cara Ekspor (APTCE) sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 33. Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2023

Capaian layanan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan layanan yang dilakukan pada periode yang sama di tahun 2022 yaitu sebesar 323 layanan. Perbandingan data tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 34. Perbandingan Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023

Sementara itu, perbandingan capaian topik yang diulas pada triwulan II tahun 2022 dan triwulan II tahun 2023 ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Ditjen PPI (2023)

Gambar 35. Perbandingan Topik Layanan FTA Center Semarang Triwulan II 2022 dan Triwulan II 2023



COACHING CLINIC FTA CENTER SEMARANG

Kegiatan coaching clinic FTA Center Semarang diselenggarakan di Kota Salatiga pada tanggal 8 Juni 2023 dengan tema "Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Kepada Pelaku Usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk Bersaing di Pasar Global". Coaching clinic dihadiri oleh 40 pelaku usaha yang mencakup wilayah Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Temanggung, Kab. Kendal dan Kota Salatiga.

Dalam sesi diskusi, pelaku usaha menyampaikan beberapa kendala dalam menjalankan prosedur ekspor maupun

memanfaatkan FTA, di antaranya:

- Hambatan pada pengajuan fasilitasi sertifikasi HACCP oleh pelaku usaha di Dinas Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM;
- Kurangnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha terkait fasilitasi oleh pemerintah untuk mendukung ekspor;
- Keterbatasan pelaku usaha dalam mengidentifikasi pasar dari produk yang dimiliki.



Berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat difasilitasi oleh FTA Center Semarang dengan melakukan konsultasi maupun kerjasama dengan stakeholder terkait. FTA Center menyediakan layanan gratis yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Sebelum pelaksanaan coaching clinic, peserta diberikan pre test untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap Free Trade Agreement

Rata-rata hasil dari pre test yang dilakukan adalah 69,74% dari 10 pertanyaan. Setelah Tenaga Teknis memberikan paparan, peserta diminta untuk mengisi post test untuk mengukur pemahaman mereka setelah mendapatkan materi. Rata-rata hasil dari post test yang dilakukan adalah 85,38%, dengan 15 peserta mendapatkan nilai 90%.

KEGIATAN FTA CENTER SEMARANG



Konsultasi CV. Nugroho Aneka Piranti mengenai dokumen ekspor furnitur yang harus disiapkan untuk ekspor ke Jepang dan Singapura, tanggal 6 Juni 2023



Pelepasan ekspor perdana produk Konjac Chips oleh CV. Tri Mitra Agro sebanyak 50 ton ke China, tanggal 12 Juni 2023

PT. Indotrade Maju Bersama Kota Semarang berkonsultasi mengenai pasir silika yang akan diekspor ke Tiongkok, tanggal 6 April 2023



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp181.592.401.000,-. Adanya kebijakan Automatic Adjustment pada tahun 2023 mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp15.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pada triwulan II sejumlah Rp166.592.401.000,-. Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2023 oleh Ditjen PPI adalah Rp 65.831.490.068,- atau dengan nilai capaian sebesar 39,52 persen. Realisasi anggaran Ditjen PPI triwulan II 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi Anggaran Triwulan II	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	82.518.839.000	28.162.663.126	34,08
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	54.173.562.000	24.714.786.346	45,62
Perundingan Perdagangan Jasa	5.150.000.000	1.955.008.107	37,96
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.150.000.000	3.208.130.007	63,75
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	7.400.000.000	2.101.403.879	28,40
Perundingan Perdagangan Bilateral	7.400.000.000	3.207.814.993	43,35
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.800.000.000	2.481.683.610	51,70
Total Ditjen PPI	166.592.401.000	65.831.490.068	39,52

Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2023)



Capaian tersebut lebih rendah dari capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya di mana pada tahun 2022 Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar 112.487.591.000,- rupiah yang pada triwulan II 2022 diblokir sebesar 6.624.380.000,- rupiah sehingga anggaran yang bisa digunakan pada triwulan II 2022 sebesar 105.863.211.000,- rupiah dengan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI adalah 43.146.287.189,- rupiah atau dengan nilai capaian sebesar 40,76 persen. Data perbandingan capaian triwulan II 2022 dan 2023 tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Aplikasi SAKTI, diolah (2023)

Gambar 36. Perbandingan Capaian Anggaran Januari-Juni 2022 dan 2023



5

Penutup

Pada tahun 2023, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan I 2023, progress pencapaian kinerja tujuh Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundingan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, dan penyebarluasan informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.



KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2023

1

Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara hybrid guna penyelesaian target perundingan

2

Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda

3

Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar

4

Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar stakeholders sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding

5

Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (government procurement), BUMN, Small Medium Enterprises (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan



UPAYA DALAM MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2023

1

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan virtual serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang mutually beneficial, serta pendekatan personal

2

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya

3

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan

4

Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan

5

Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra runding





LAMPIRAN

Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat
Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Pengukuran		Sumber Data
			Di	Dt	
1	Meningkatkan nilai pasar ekspor dan jasa digital internasional	1. Peringkat di e-ekspor yang termasuk dalam kategori perdagangan internasional berdasarkan jumlah transaksi	$Z = \frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \times 100$	$Z_t = \text{Perubahan nilai ekspor yang termasuk dalam kategori perdagangan internasional di tahun berjalan}$ $E_t = \text{Nilai ekspor kategori perdagangan yang termasuk dalam program perdagangan internasional di tahun berjalan}$ $E_{t+1} = \text{Nilai ekspor internasional tahun berikutnya di tahun berjalan}$	Data ekspor Indonesia yang dikumpulkan oleh BPS
		2. Indeks Nilai Tambah Regional (INTR) dengan negara mitra FTAs Indonesia	$\text{INTR}_{t+1} = \frac{\text{Nilai Tambah Regional}_{t+1}}{\text{Nilai Tambah}_{t+1}}$ $\text{Nilai Tambah}_{t+1} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{NTM}_{i,j,t+1} \times A_{i,j,t+1}$ $\text{Nilai Tambah}_{t+1} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{NTM}_{i,j,t+1} \times A_{i,j,t+1}$	$\text{INTR}_{t+1} = \text{Index Nilai Tambah Regional (INTR) dengan negara mitra FTA Indonesia}$ $\text{Nilai Tambah}_{t+1} = \text{INTR} \text{ di tahun berjalan}$ $\text{Nilai Tambah}_{t+1} = \text{INTR} \text{ di tahun berjalan dengan nilai tambah}$ $\text{NTM}_{i,j,t+1} = \text{Nilai Tambah Regional}_{i,j,t+1} \text{ yang termasuk dalam INTR}$ $A_{i,j,t+1} = \text{Jumlah data ekspor kategori perdagangan internasional yang termasuk dalam INTR}$	1. Data INTR yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional (DITJEN PERDAGANGAN INTERNASIONAL) 2. Data ekspor Indonesia yang dikumpulkan oleh BPS
		3. Realisasi Nilai Tambah Perdagangan Jasa di Ekspor Internasional	$Z_A = \sum Z_A$	$Z_A = \text{Jumlah realisasi nilai tambah perdagangan jasa di tahun berjalan}$ $Z_A = \text{Realisasi perdagangan perdagangan jasa dengan negara mitra di tahun berjalan}$	Informasi dan dokumen berdasarkan perdagangan perdagangan jasa di berbagai negara mitra Ekspor Perdagangan Perdagangan Jasa di Ekspor
2	Terdapat peningkatan volume ekspor jasa digital yang berbasis teknologi informasi	1. Peringkat perdagangan digital nasional dan perdagangan jasa digital ekspor Indonesia	$D = \frac{D_{t+1} - D_t}{D_t} \times 100$	$D_t = \text{Peringkat ekspor Indonesia yang berbasis teknologi digital}$ $D_{t+1} = \text{Peringkat ekspor Indonesia yang berbasis teknologi digital}$ $D_{t+1} = \text{Peringkat ekspor Indonesia yang berbasis teknologi digital}$	Informasi dan dokumen berdasarkan perdagangan perdagangan jasa digital ekspor Indonesia yang berbasis teknologi informasi
		2. Peringkat jasa digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi	$D_{t+1} = \frac{D_{t+1} - D_t}{D_t} \times 100$	$D_{t+1} = \text{Peringkat jasa digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi yang berbasis teknologi informasi}$ $D_t = \text{Peringkat jasa digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi}$ $D_{t+1} = \text{Peringkat jasa digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi}$	Informasi dan dokumen berdasarkan perdagangan perdagangan jasa digital ekspor Indonesia yang berbasis teknologi informasi
3	Terdapat peningkatan jumlah ekspor jasa digital yang berbasis teknologi informasi	1. Persentase perdagangan digital ekspor Indonesia yang berbasis teknologi informasi	$E = \frac{E_{t+1} - E_t}{E_t} \times 100$	$E_t = \text{Persentase ekspor digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi yang berbasis teknologi informasi}$ $E_{t+1} = \text{Persentase ekspor digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi}$ $E_{t+1} = \text{Persentase ekspor digital perdagangan Indonesia yang berbasis teknologi informasi}$	Informasi dan dokumen berdasarkan perdagangan perdagangan jasa digital ekspor Indonesia yang berbasis teknologi informasi
		2. Jumlah pemangku ekspor jasa digital yang berbasis teknologi informasi	$X = \sum X_t$	$X_t = \text{Jumlah pemangku ekspor digital yang berbasis teknologi informasi yang berbasis teknologi informasi}$ $X_t = \text{Jumlah pemangku ekspor digital yang berbasis teknologi informasi}$ $X_t = \text{Jumlah pemangku ekspor digital yang berbasis teknologi informasi}$	1. Data pemangku ekspor digital yang berbasis teknologi informasi yang berbasis teknologi informasi 2. Data pemangku ekspor digital yang berbasis teknologi informasi yang berbasis teknologi informasi

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.S. Rukmin Raya No. 3 08000 10130
Telp. 021-235228000, Fax. 50300 Pbx. 021-23522823
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 NOMOR : PR.01.01/01/PPI/PK/12/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebiasaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Zulkifli Hasan

Pihak Pertama

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 3 Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	BASARAH PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Penerimaan ekspor ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional Indeks Non-Tarif Indonesia (NTI) dengan negara mitra FTA Indonesia Keaktifan penandatangan perjanjian jasa di forum internasional	Persen Indeks Perjanjian	45 6,0 2
2	Tersedianya dukungan atau pengurangan tarif-tarif nasional serta tarif eksteri (p) rendah bagi perdagangan internasional Indonesia	Penerimaan pengurangan tarif-tarif nasional dan pengurangan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra Penerimaan pemberlakuan perjanjian perdagangan Indonesia yang diberikan dalam deklarasi/tautanen di tingkat regional dan internasional	Persen Persen	80 80
3	Tersedianya informasi implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Penerimaan penyelesaian/pelaksanaan dukungan melalui perjanjian perdagangan internasional ke mitra yang relevan Jumlah penerima keperluan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Persen Orang	100 2.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Perluasan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	84.768.839.000
2	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Perdagangan Internasional	58.323.562.000
3	Perundingan Perdagangan Jasa	7.000.000.000
4	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.000.000.000
5	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	10.000.000.000
6	Perundingan Perdagangan Bilateral	10.000.000.000
7	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	6.500.000.000
JUMLAH		181.592.401.000

Jakarta, 24 Desember 2022

Menteri Perdagangan


Zulkifli Hasan

Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional


Djumlio Bris Wicaksono

Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : II (Dua) Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional.	45	Persen	69,92	155,37
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia.	5,0	Indeks	4,82	103,65
	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2	Perjanjian	0	0
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra.	80	Persen	70	87,5
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80	Persen	40	50
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani.	100	Persen	50	50
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA.	2.000	Orang	827	56

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Triwulan : II (Dua) Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	62.518.839.000	28.162.663.126	34,08
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	54.173.562.000	24.714.786.346	45,62
Perundingan Perdagangan Jasa	5.150.000.000	1.955.008.107	37,96
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.150.000.000	3.208.130.007	63,75
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	7.400.000.000	2.101.403.879	28,40
Perundingan Perdagangan Bilateral	7.400.000.000	3.207.814.993	43,35
Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.800.000.000	2.481.683.610	51,70
Total Ditjen PPI	166.592.401.000	65.831.490.068	39,52

Jakarta, Juli 2023
 Direktur Jenderal
 Perundingan Perdagangan Internasional

Djatkiko Bris Witjaksono

Lampiran 5
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional
s.d Triwulan II Tahun 2023

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992	30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009	17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement	22 Januari 2019	24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010	13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995	30 Desember 1995 (Keppres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003	20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997	31 Maret 1998 (Keppres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998	13 Oktober 1999 (Keppres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001	14 November 2003 (Keppres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004	31 Juli 2008 (PerpresNO.52/2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Kappres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eight Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2008
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari penandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari 2023 (Perpres No.3/2023)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)		

Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009 1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
	ASEAN-India Free Trade Area (AITISA)	Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 November 2014 12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
	ASEAN-India Free Trade Area (AIIA)	Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	20 November 2014 18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
	ASEAN-India Free Trade Area (AIDTA)	Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009 29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
	First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.34/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Agreement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013)
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	dalam proses ratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	12 Juli 2023 (Perpres No.43/2023)
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei 2023	Belum diratifikasi
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni 2023	Belum diratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret 2023	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No.54/2011)



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright ©Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan
Internasional Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia

www.ditjenppi.kemendag.go.id